



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ESTIMASI PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DENGAN ACTIVITY-BASED COSTING**

**TESIS**

**LENI NOPILIA  
1006741532**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ESTIMASI PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DENGAN ACTIVITY-BASED COSTING**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi (M.E.)**

**LENI NOPILIA  
1006741532**

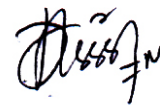
**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JULI 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Juli 2012



(Leni Nopilia)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Leni Nopilia

NPM : 1006741532

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012



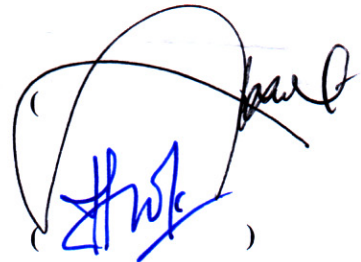
## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Leni Nopilia  
NPM : 1006741532  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Estimasi Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah  
Haji dengan Activity-Based Costing.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, SE., M.Soc., Sc



Penguji : Dr. Andi Fahmi

Penguji : Widyanti Soetjipto, M.Soc.Sc



Ditetapkan di :  
Tanggal :

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi pada program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

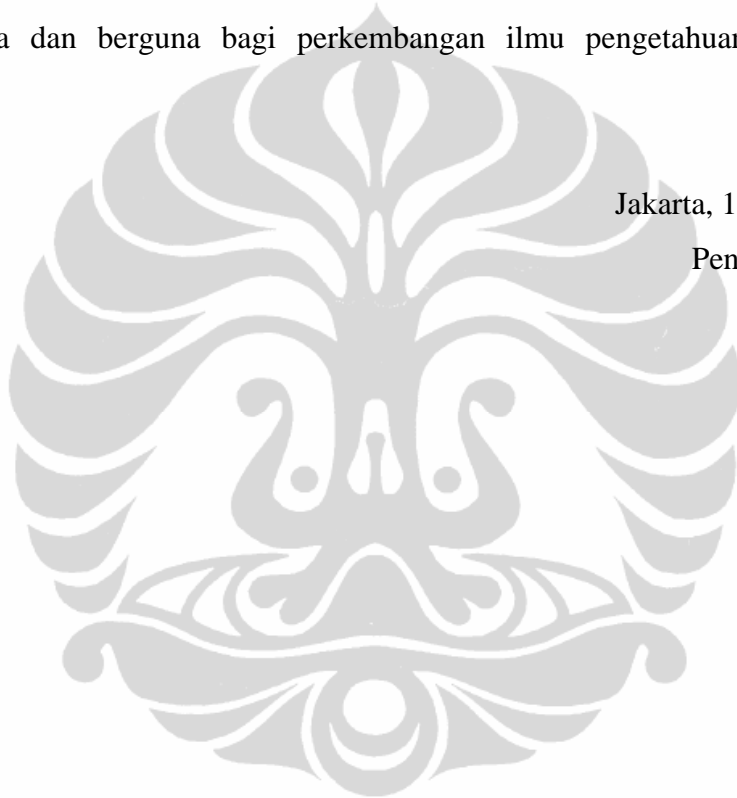
- (1) Bapak Arindra A.Zainal S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.
- (2) Bapak Dr. Andi Fahmi Lubis selaku Sekretaris Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.
- (3) Bapak Iman Rozani, M.Soc.Sc. selaku dosen pembimbing karya akhir yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta masukan dalam penulisan karya akhir.
- (4) Seluruh dosen, dan staf pengajar MPKP-FEUI, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di MPKP-FEUI.
- (5) Kedua orang tua tercinta dan adik tersayang, yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan karya akhir.
- (6) Seluruh pegawai Kementerian Agama, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan penjelasan selama penulis melakukan penulisan karya akhir.
- (7) Rekan-rekan kuliah seperjuangan MPKP-FEUI angkatan XXIII-A kelas sore dan kekhususan ekonomi keuangan negara dan daerah, terutama Bona, Pak Wahyu, Ferdi, Aninda, Mbak Endang, Indi, Fany, Meity, Mbak Ance, Firda, Mbak Windi, dan Mbak Cathy, terima kasih atas dukungan, kerjasama dan persahabatan yang sudah terjalin erat dan telah mewarnai hari demi hari selama menempuh pendidikan di MPKP-FEUI.
- (8) Staf administrasi MPKP, Pak Trimman, Pak Dwi dan Pak Iyus, terima kasih telah memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan selama menjalani pendidikan di MPKP-FEUI.

- (9) Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan karya akhir ini. Akhir kata, penulis berharap karya akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang

Jakarta, 10 Juli 2012

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

---

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leni Nopilia  
NPM : 1006741532  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Estimasi Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Activity-Based Costing**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Juli 2012  
Yang menyatakan



Leni Nopilia



## ABSTRAK

Nama : Leni Nopilia  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Estimasi Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan *Activity-Based Costing*

Perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dengan menggunakan *activity-based costing* (ABC) memberikan hasil yang berbeda dengan perhitungan yang selama ini dipergunakan oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji. Kementerian Agama belum mempergunakan metode kalkulasi biaya pada penetapan biaya haji tahun berjalan, karena hanya menggunakan estimasi berdasarkan realisasi biaya yang dikeluarkan tahun lalu. Perhitungan BPIH yang dilakukan dengan pendekatan ABC menghasilkan harga pokok jasa penyelenggaraan ibadah haji yang lebih akurat karena masing-masing *cost pool* per aktivitas telah dialokasikan ke dalam unit jasa dengan menggunakan *cost driver* yang relevan. Sehingga biaya yang dibebankan ke jamaah sesuai dengan penggunaan sumber daya.

Kata kunci:

*Activity-Based Costing* (ABC), *Cost Pool*, *Cost Driver*

## ABSTRACT

Name : Leni Nopilia  
Study Program : Master of Planning and Public Policy  
Title : Estimation of Cost Calculation for Hajj with Activity-Based Costing

Calculation of the cost of organizing the pilgrimage (BPIH) using activity-based costing (ABC) gives different results with calculations that are currently used by the Ministry of Religious Affairs as the organizer of the hajj. Ministry of Religious Affairs has not used the method of calculation on the cost of the current year costing pilgrimage, because only uses estimates based on the realization of the costs incurred last year. Calculation of BPIH is performed with the ABC approach to generating cost of goods services of organizing the Hajj more accurate because each cost pool per activity has been allocated to the unit services using cost drivers that are relevant. So that costs are charged to the pilgrims in accordance with use of resources.

Key words :

*Activity-Based Costing* (ABC), *Cost Pool*, *Cost Driver*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
<b>1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup .....	6
1.6 Manfaat Tesis .....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
<b>2 PENGERTIAN <i>ACTIVITY-BASED COSTING</i>.....</b>	<b>9</b>
2.1 Konsep Dasar Biaya .....	9
2.2 Perbaikan Sistem Perhitungan Biaya.....	13
2.3 Pengertian dan Konsep <i>Activity-Based Costing</i> .....	19
2.4 <i>Activity-Based Costing</i> pada Perusahaan Jasa, Manfaat, Keunggulan dan Keterbatasan.....	30
<b>3 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.....</b>	<b>33</b>
3.1 Tahapan Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	33
3.2 Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M .....	43
3.3 Rencana BPIH dan Perkembangan BPIH.....	48
<b>4 <i>ACTIVITY-BASED COSTING</i> DALAM PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.....</b>	<b>64</b>
4.1 Perhitungan Biaya dengan <i>Activity-Based Costing</i> .....	64
4.2 Perbandingan atas Perhitungan BPIH Pemerintah dengan Perkiraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atas biaya akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan pemerintah .....	82
<b>5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. *Direct Cost* Embarkasi Jakarta
- Tabel 2. Lampiran *Indirect Cost* Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Tanggal 21 Juli 2010
- Tabel 3. Laporan Aktivitas Keuangan Penyelenggaraan Haji 1431H/2010M
- Tabel 4. Kertas Kerja Laporan Aktivitas Keuangan
- Tabel 5. Beban Tenaga Kerja Tidak Langsung
- Tabel 6. Beban Konsumsi
- Tabel 7. Beban Langganan Daya dan Jasa
- Tabel 8. Beban Transportasi
- Tabel 9. Beban Sewa Pemandoran dan Perkantoran
- Tabel 10. Beban Pemeriksaan Kesehatan
- Tabel 11. Beban Perbekalan Perjalanan Haji
- Tabel 12. Beban Perlengkapan Penyelenggaraan Haji
- Tabel 13. Beban Operasional lainnya
- Tabel 14. Perbandingan *Indirect Cost* Tahap Pendaftaran
- Tabel 15. Perbandingan *Indirect Cost* Tahap Kedatangan/Pemulangan di Arab Saudi
- Tabel 16. Perbandingan *Indirect Cost* Tahap Keberangkatan/kepulangan di Embarkasi/Debarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG)
- Tabel 17. Perbandingan *Indirect Cost* Tahap Persiapan dan Pelaksanaan

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025, pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dalam pembangunan nasional serta basis etika sosial dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Terwujudnya pembangunan di bidang agama terlihat dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan. Salah satu indikasi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan dapat berupa meningkatnya jumlah permintaan masyarakat dari tahun ke tahun untuk menunaikan ibadah haji.

Untuk menindaklanjuti visi dan arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka Kementerian Agama di dalam RPJMN 2010-2014 merencanakan beberapa langkah pembangunan. Salah satu butir dalam langkah RPJMN 2010-2014 berhubungan dengan pelaksanaan haji, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada tahun 2010, melalui: peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai standar pelayanan minimal dalam rangka memperoleh sertifikat ISO 9000:2001; pemantapan penerapan dan pemanfaatan sistem informasi haji terpadu (Siskohat); penyediaan jaringan Siskohat di seluruh kabupaten/kota; peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji; pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji; dan penyiapan draft undang-undang tentang pengelolaan dana haji.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat *istitha'ah*<sup>1</sup> baik secara finansial, fisik

---

<sup>1</sup> Istitha'ah : orang islam yang dianggap mampu melaksanakan ibadah haji apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan seseorang untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga (Komisi Fatwa MUI, 2 feb 1979).

maupun mental. Menunaikan Ibadah haji harus dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas, minimal sekali seumur hidup. Pelaksanaan haji hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijah setiap tahun Hijriah, walaupun batas waktu pelaksanaan ibadah haji (miqat zamani)<sup>2</sup>, bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijah yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi terselenggaranya ibadah haji Indonesia. Mengingat pentingnya penyelenggaraan ibadah haji, maka penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas dan menyangkut nama baik serta martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya Arab Saudi.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia tentunya merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar. Ditinjau dari sisi struktur pasar, jasa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mempunyai dua jenis bentuk pasar: *pertama*, adalah jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler; *kedua*, adalah jasa penyelenggaraan ibadah haji khusus. Jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, dari segi pelayanan sampai dengan penentuan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan pada penyelenggaraan ibadah haji khusus, pemerintah menyerahkan pelayanan dan besarnya biaya haji pada pihak swasta yang menyelenggarakan.

Sejak tahun 1987 jumlah jamaah haji setiap negara dibatasi oleh kuota, sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT-OKI) di Amman, Jordania. Kuota untuk masing-masing negara telah ditetapkan secara seragam yaitu sebesar satu permil dari jumlah penduduk muslim. Artinya jika jumlah penduduk muslim Indonesia sebanyak 238 juta maka

---

<sup>2</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Miqat>, diakses tanggal 16 Juli 2012

Indonesia memperoleh kuota sebesar 238 ribu. Penetapan kuota haji di Indonesia dilakukan oleh Menteri Agama, baik kuota haji reguler maupun kuota haji khusus secara nasional dan provinsi dengan menggunakan prinsip adil dan proporsional.

Keterbatasan kuota haji (sisi penawaran) berakibat calon jamaah haji tidak dapat menunaikan ibadah haji pada tahun terdaftar sebagai jamaah (pada saat memperoleh porsi). Dengan kata lain, jumlah pendaftar (sisi permintaan) lebih besar dari kuota, sehingga mengakibatkan calon jamaah yang sudah mendapatkan nomor porsi masuk kedalam daftar tunggu keberangkatan haji sampai pada waktu giliran keberangkatan. Upaya pemerintah untuk meredam daftar tunggu calon haji adalah dengan menaikkan dana setoran awal haji pada tahun 2010. Tetapi upaya tersebut tidak berjalan sempurna, buktinya hingga tahun 2011 daftar tunggu calon haji tetap membludak, yakni 1,2 juta orang<sup>3</sup>. Antisipasi perkiraan mengenai jumlah permintaan penyelenggaraan ibadah haji menjadi semakin penting mengingat kuota hanya bertambah sedikit tetapi permintaan terus meningkat setiap tahun. Apabila hal ini tidak diantisipasi dan dibiarkan secara terus menerus, maka akan mengakibatkan kelebihan permintaan, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber dari persekongkolan atau kolusi.

Selain menetapkan kuota haji, Kementerian Agama juga merancang besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun berjalan. Dimana besarnya BPIH tersebut dihitung berdasarkan satuan biaya tahun lalu. Setelah rancangan BPIH ditetapkan, kemudian dirapatkan dalam rapat kerja komisi VIII DPR RI dengan membentuk panitia kerja (panja) BPIH kemudian dibahas dengan menentukan komponen per satuan kegiatan yang berada dalam koordinasi, tugas dan fungsi berbagai lembaga baik kementerian/non-kementerian yang terkait dalam penyusunan BPIH. Setelah rancangan BPIH dibahas, kemudian diusulkan draft peraturan presiden tentang besarnya BPIH sebelum akhirnya peraturan presiden tentang besarnya BPIH diumumkan.

BPIH disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang kemudian BPIH dikelola oleh Menteri Agama dengan

---

<sup>3</sup>Republika, 30 Januari 2011.

mempertimbangkan nilai manfaat. Nilai manfaat tersebut digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji. Pertanggungjawaban dari belanja operasional dituangkan dalam laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai. Apabila terdapat sisa dana operasional haji, maka dana tersebut dimasukkan ke dalam DAU (Dana Abadi Umat). Pengelolaan dan pengembangan DAU dilakukan untuk kemaslahatan umat Islam, yang meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Adapun lembaga yang sudah mengawasi penyelenggaraan ibadah haji sebanyak tujuh<sup>4</sup> antara lain DPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Selain pengawasan teknis penyelenggaraan ibadah haji, lembaga–lembaga tersebut diatas diharapkan dapat mengawasi pengelolaan BPIH.

Pemerintah menentukan besarnya BPIH, mengelola BPIH dan sebagai penyelenggara haji, dengan kata lain pemerintah berfungsi sebagai regulator dan operator pelaksanaan haji, maka hal tersebut mengindikasikan adanya monopoli. Berdasarkan laporan ICW setidaknya terdapat 20 bentuk monopoli Kementerian Agama, yaitu<sup>5</sup>:

1. Menyelenggarakan ibadah haji
2. Menetapkan persyaratan dan jenis kegiatan penyelenggaraan haji
3. Membentuk panitia penyelenggara dan menunjuk petugas operasional
4. Mengusulkan dan mengurus BPIH
5. Menerima, mengelola, menunjuk bank penerima pembayaran BPIH
6. Menentukan tata cara dan jumlah pengembalian BPIH
7. Menduduki kursi ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)

---

<sup>4</sup><http://news.okezone.com/read/2010/02/18/337/304756/komisi-pengawas-haji-dibentuk>, 18 Februari 2010

<sup>5</sup>Ketertutupan Informasi Penyelenggaraan Haji, Pintu Masuk Korupsi, diunduh dari <http://www.Hukumonline.com/berita/baca/hol18191/ketertutupan-informasi-penyelenggaraan-haji-pintu-masuk-korupsi> diakses pada tanggal 5 Juli 2012

8. Menetapkan tugas BP DAU
9. Menunjuk instansi pendaftar calon jamaah
10. Menetapkan tata cara dan jangka waktu pendaftaran
11. Mengatur WNI di luar negeri yang akan menunaikan ibadah haji
12. Mengatur kuota nasional
13. Menetapkan pola dan tata cara pembinaan jamaah
14. Menerbitkan pedoman manasik dan panduan perjalanan haji
15. Mengeluarkan paspor
16. Menunjuk pelaksana transportasi
17. Menyediakan akomodasi jemaah haji
18. Menetapkan penyelenggara haji khusus
19. Mengatur penyelenggaraan haji khusus, dan
20. Mengatur ketentuan penyelenggaraan perjalanan umrah.

Sistem monopoli ini diasumsikan menyebabkan membengkaknya BPIH, karena tidak terbukanya peran swasta untuk aktif menyelenggarakan haji. Padahal asumsi tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya, karena dalam menentukan besaran BPIH, pemerintah tidak menggunakan metode kalkulasi biaya. Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan menggunakan sistem kalkulasi biaya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pertanyaan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah “Berapakah sebenarnya biaya dari penyelenggaraan ibadah haji untuk setiap jamaah.”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menghitung biaya sebenarnya dari penyelenggaraan ibadah haji untuk setiap jamaah.”

## **1.4 Metodologi Penelitian**

Metode perhitungan yang digunakan adalah metode *Activity Based Costing* (ABC), dimana dengan metode ABC biaya dihitung berdasarkan aktivitas karena diyakini memberikan pengukuran biaya yang jauh lebih akurat. Informasi biaya yang didapat dari metode ABC tidak hanya berasal dari biaya produk atau



jasa/layanan yang diberikan, tetapi juga biaya yang berasal dari aktivitas/proses penyelenggaraan haji. Pada awalnya, metode ABC hanya diterapkan pada perusahaan manufaktur, sampai akhirnya dunia usaha berkembang dan metode ABC digunakan pada perusahaan jasa, baik profit maupun non profit.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi *action research/applied research*. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelusuran literatur/penelitian kepustakaan.

Pada tahap awal penelitian, dilakukan proses mengumpulkan, dan mempelajari artikel-artikel, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan teori metode ABC serta kasus-kasus yang berhubungan dengan penerapan metode ABC. Khususnya penerapan ABC di perusahaan jasa.

2. Penelitian lapangan.

Penelitian dilakukan dengan peninjauan secara langsung pada Kementerian Agama. Data diperoleh dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara observasi dan wawancara, untuk mendapatkan data finansial maupun non finansial. Dari kedua data tersebut diperoleh data primer yang terdiri dari alur proses pelayanan, aktivitas penyelenggaraan haji baik aktivitas utama maupun pendukung. Sedangkan data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen atau laporan tertulis yang disusun oleh pihak Kementerian Agama, yang terdiri dari laporan keuangan biaya penyelenggaraan ibadah haji, laporan operasional penyelenggaraan ibadah haji dan sumber daya (anggaran) yang dimiliki.

### 1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler pada tahun 2010 di embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JPG). Karena pada perhitungan biaya hajireguler sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah, sedangkan penelitian pada embarkasi Jakarta-Pondok Gede dilakukan karena Jakarta merupakan embarkasi yang cukup kompleks. Perhitungan BPIH pada tahun 2010 digunakan, karena pada tahun 2010 biaya haji mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

## 1.6 Manfaat Tesis

Memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyesuaikan kembali komponen-komponen biaya dalam perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang di tanggung jamaah haji dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai rincian perhitungan komponen-komponen dalam penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis akan membagi tesis menjadi 5 bab yang kemudian dijabarkan dalam beberapa sub bab. Adapun gambaran singkat tentang isi bab demi bab adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan.

Bab ini merupakan cerminan dari tesis secara keseluruhan dan berisi tentang latar belakang permasalahan, diikuti dengan pembahasan tentang tujuan penulisan dan pokok permasalahan. Pada bab ini, penulis juga menguraikan metodologi penelitian yang akan diterapkan dan di akhiri dengan uraian tentang sistematika penulisan.

Bab 2: Pengertian *Activity-Based Costing*.

Bab ini membahas tentang konsep biaya, sistem perhitungan biaya, pengertian *activity-based costing* (ABC), langkah-langkah dalam merancang ABC, manfaat ABC, kelebihan dan kekurangan dari ABC.

Bab 3: Gambaran Umum Pelaksanaan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M.

Bab ini menggambarkan tentang pelaksanaan ibadah haji Tahun 1431H/2010M, dari mulai pendaftaran sampai dengan pemulangan jamaah haji, struktur organisasi penyelenggara ibadah haji dan gambaran biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan sumber dana dan perubahan biaya haji setiap tahun.

Bab 4: Analisa *Activity Based Costing* dalam Perhitungan Biaya Ibadah Haji.

Bab ini memperhitungkan *activity-based costing* atas rangkaian aktivitas penyelenggaraan ibadah haji, sehingga diperoleh estimasi perhitungan biaya haji yang mendekati *real cost*. Selain itu dilakukan perbandingan atas perhitungan

BPIH pemerintah dengan perkiraan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) atas konsumsi dan akomodasi yang dikeluarkan pemerintah.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran.

Bab ini berisikan tentang kesimpulan bagaimana pemerintah menghitung penetapan BPIH serta saran sebagai bahan rekomendasi untuk memperbaiki perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dengan dasar penetapan besarnya biaya haji pada tahun berikutnya.



## **BAB 2**

### **PENGERTIAN ACTIVITY-BASED COSTING**

## 2.1 Konsep Dasar Biaya

Menurut Hansen dan Mowen (2007) biaya adalah kas atau setara kas, yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat saat ini atau masa mendatang bagi suatu perusahaan (istilah manfaat masa mendatang berarti pendapatan). Biaya yang manfaatnya sudah diperoleh akan menjadi beban, sedangkan biaya yang belum terpakai diklasifikasikan sebagai aset dan muncul di laporan posisi keuangan. Contoh: usaha foto copy membeli mesin foto copy dengan mengeluarkan uang kas perusahaan sejumlah Rp1,5 juta. Mesin foto copy adalah biaya bagi perusahaan karena untuk memperolehnya perusahaan harus mengeluarkan kas sedangkan mesin tersebut memberikan manfaat ke perusahaan di masa depan. Setelah mesin foto copy dipakai, biaya mesin foto copy berubah menjadi beban, yaitu beban penyusutan. Setiap tahunnya rupiah dalam bentuk aset mesin foto copy berkurang sebanyak penyusutan yang diperhitungkan. Dari ilustrasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara biaya yang diklasifikasikan sebagai beban dan biaya sebagai aset adalah waktu.

Menetapkan biaya secara akurat pada obyek biaya sangat penting. Akurasi merupakan konsep relatif dan mempunyai hubungan yang wajar serta logis dari metode pembebanan biaya yang sedang digunakan. Misalnya, kita ingin menentukan biaya makan siang untuk Ali, seorang mahasiswa yang sering pergi ke seven eleven. Salah satu pendekatan perhitungan biaya adalah dengan menghitung jumlah pelanggan seven eleven antara jam 12:00 sampai dengan jam 13:00 dan kemudian membagi total penerimaan yang diterima oleh seven eleven selama periode ini. Misalkan setelah dibagi diperoleh Rp.25.000,- per orang. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa Ali menghabiskan Rp.25.000,- per hari untuk makan siang.

Pendekatan lain adalah pergi makan siang bersama Ali dan mengamati berapa biaya yang dihabiskan. Misalkan Ali memilih pizza sepotong dan minuman ringan berukuran medium, dengan biaya Rp 20.000,-. Ini membuktikan, tidak sulit untuk

melihat biaya mana yang lebih akurat, karena biaya Rp.25.000,- pada perhitungan sebelumnya, terdistorsi oleh pola konsumsi pelanggan lain (terjadi subsidi silang). Ternyata, konsumen lain makan siang dengan harga Rp.35.000,- dengan menu mini pizza, salad, dan minuman ringan berukuran besar. Kesimpulan dari ilustrasi diatas, bahwa distorsi biaya dapat menghasilkan keputusan yang salah dan evaluasi yang kurang.

Sistem akuntansi biaya disusun untuk mengukur dan menentukan biaya pada obyek biaya. Obyek biaya adalah suatu item atau aktivitas yang ada pada produk, pelanggan, departemen, proyek, kegiatan dan lain-lain dimana biaya diukur dan dibebankan. Biaya yang menjadi obyek aktivitas, dihitung sebagai unit dasar dari pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, jika ingin menentukan biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk memproduksi sepeda, maka obyek biayanya adalah sepeda, atau ingin menentukan biaya pengembangan mainan baru, maka obyek biaya adalah proyek pembangunan mainan baru.

Salah satu obyek biaya yang paling penting adalah *output* dari organisasi. Jenis *output* dari organisasi ada dua, yaitu produk nyata dan jasa. Produk nyata adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan input tenaga kerja dan modal seperti tanaman, tanah, dan mesin. Contoh produk nyata adalah televisi, hamburger, mobil, komputer, pakaian, dan furnitur. Sedangkan jasa adalah aktivitas yang dilakukan organisasi untuk digunakan oleh pelanggan atau aktivitas yang dilakukan pelanggan untuk menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Jasa juga diproduksi dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan input modal. Contoh jasa dengan menggunakan aktivitas pelayanan kepada pelanggan adalah perlindungan asuransi, perawatan medis, perawatan gigi, dan perawatan pemakaman. Berbeda dengan sewa mobil, penyewaan video, atau sewa hotel dimana layanan kepada pelanggan menggunakan produk atau fasilitas organisasi.

Jasa berbeda dari produk nyata pada tiga dimensi yaitu: *intangibility*, *perishability*, dan *inseparability*. *Intangibility* berarti bahwa pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar layanan sebelum membeli. Dengan demikian, jasa yang tidak berwujud produk. *Perishability* berarti jasa tidak dapat

disimpan sedangkan *inseparability* berarti produsen dan pembeli jasa layanan melakukan kontak langsung untuk bertukar penggunaan fasilitas jasa. Pada dasarnya, jasa sering tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Misalnya, pemeriksaan mata membutuhkan kehadiran pasien dan dokter mata. Tetapi pada produk nyata, produsen tidak perlu memiliki kontak langsung dengan pembeli barang-barang mereka. Misalnya Pembeli mobil tidak perlu memiliki kontak dengan para insinyur dan pekerja jalur perakitan yang memproduksi mobil tersebut.

Menurut Carter dan Usry (2004: 40), biaya dalam hubungannya dengan produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

#### 1. Biaya Manufaktur

Biaya manufaktur disebut juga biaya produksi atau biaya yang merupakan penjumlahan dari tiga elemen biaya, yaitu :

- A. Biaya bahan baku langsung (*direct material cost*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi.
- B. Biaya tenaga kerja langsung (*direct labor cost*) adalah jumlah pengorbanan yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku menjadi barang jadi dan dapat dibebankan secara ekonomis ke produk tertentu. Biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya utama (*prime cost*). Sedangkan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya *overhead*, disebut sebagai biaya konversi (*conversion cost*).
- C. Biaya *overhead* (*factory-overhead cost*) adalah biaya manufaktur yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke barang atau jasa tertentu (*output*). Biaya *overhead* merupakan cakupan semua biaya manufaktur, kecuali yang dicatat sebagai biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya *overhead* terdiri dari: biaya bahan baku tidak langsung/biaya bahan penolong; biaya tenaga kerja tidak langsung (*indirect labor cost*); biaya reparasi dan pemeliharaan (*repair and maintenance cost*); biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap, antara lain: biaya penyusutan mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya yang

digunakan untuk keperluan pabrik; biaya yang timbul akibat berlalunya waktu, antara lain: biaya asuransi mesin, kendaraan, dan biaya asuransi lainnya yang digunakan untuk keperluan pabrik; biaya *overhead* lainnya yang merupakan pengeluaran secara tunai antara lain: biaya listrik, air, komunikasi, dan biaya lain sejenis yang dikeluarkan oleh pabrik.

Jika dilihat dari segi biaya *overhead* pabrik, maka biaya ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) *Overhead* pabrik variabel, yakni biaya *overhead* pabrik yang jumlahnya mengalami perubahan sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya: energi, perlengkapan dan sebagian biaya tenaga kerja tidak langsung
- 2) *Overhead* pabrik tetap, yaitu biaya *overhead* pabrik yang jumlahnya tetap (tidak berubah) sampai batas tertentu walaupun volume kegiatan mengalami perubahan. Contohnya: gaji mandor, penyusutan, sewa, pajak kekayaan dan asuransi.

## 2. Biaya Komersial (non manufaktur)

Biaya komersial terdiri dari dua klasifikasi biaya, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk atau jasa. Biaya pemasaran terdiri dari biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya pengiriman. Sedangkan biaya administrasi adalah biaya yang terkait dengan penelitian, pengembangan dan administrasi yang tidak dibebankan ke biaya produksi dan pemasaran.

Biaya sebuah produk untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal mengacu pada biaya produksi, maka biaya produksi yang melekat pada unit yang terjual diakui sebagai beban harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Biaya produksi yang melekat pada unit yang tidak dijual dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca keuangan. Sedangkan biaya penjualan, dan biaya administrasi dipandang sebagai biaya periode (harus dipotong pada setiap periode) sehingga dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi. Biaya periode merupakan biaya nonproduksi, biaya tersebut tidak pernah muncul dalam neraca keuangan. Berikut

contoh dari laporan laba rugi berdasarkan klasifikasi fungsional untuk perusahaan manufaktur.

<b>Manufacturing Organization Income Statement For the Year Ended December 31, 2010</b>		
Sales		\$2,000,000
Less: Cost of goods sold		<u>1,300,000</u>
Gross margin		\$ 700,000
Less operating expenses:		
Research and development	\$100,000	
Selling	300,000	
Administrative	<u>150,000</u>	<u>\$ 550,000</u>
Operating Income		<u>\$ 150,000</u>

**Gambar 2.1** *Income Statement Manufacturing Organization*

Sumber: Don, R.H., Maryanne, M.M. & Liming, G., *Cost Management : Accounting and Control*, 6th ed., 2006 (p. 31).

## 2.2 Perbaikan Sistem Perhitungan Biaya

Sistem perhitungan biaya yang lebih baik tidak menggunakan pemerataan dalam pengalokasian biaya-biaya sumber daya yang digunakan pada obyek biaya dan memberikan pengukuran yang lebih baik atas biaya tidak langsung yang digunakan oleh obyek biaya yang berbeda. Pemerataan biaya dapat menyebabkan kalkulasi biaya produk atau jasa menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi menghabiskan sumber daya yang lebih sedikit tetapi memiliki biaya per unit yang lebih tinggi. Sedangkan pada kalkulasi biaya produk yang terlalu rendah menghabiskan sumber daya yang lebih banyak tetapi justru memiliki biaya per unit yang lebih rendah. Perusahaan yang biaya produknya lebih rendah mungkin melakukan penjualan yang sebenarnya mengalami kerugian, meskipun terkesan bahwa penjualannya menguntungkan. Jadi penjualan yang dilakukan menghasilkan lebih sedikit pendapatan dibandingkan sumber daya yang digunakan. Sementara perusahaan yang biaya produknya lebih tinggi bisa jadi menetapkan harga yang terlalu tinggi atas produknya, sehingga kehilangan pangsa pasar yang direbut oleh pesaing pada produk sejenis.



Pada abad ke-19<sup>6</sup>, sistem akumulasi biaya dikembangkan untuk menyerap semua biaya, dengan menelusuri biaya-biaya yang ada. Sehingga biaya dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Biaya Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat pada obyek biaya, artinya beban penelusuran atas biaya tersebut layak dilakukan secara ekonomis. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh: gaji pengajar pelatihan perpajakan adalah biaya langsung ke obyek biaya yaitu pelatihan perpajakan.

2. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat ke objek biaya. Beban untuk menelusuri biaya tersebut juga tidak layak dilakukan secara ekonomis (biaya penelusuran lebih besar daripada jumlah biaya yang dibebankan ke produk/jasa). Biaya tidak langsung terdiri dari biaya *overhead*. Misal: biaya gaji kepala divisi pelatihan adalah biaya tidak langsung untuk semua pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat pengembangan akuntansi (PPA) atau gaji pengawas pabrik yang mengawasi produksi sejumlah minuman ringan yang pembotolannya dilakukan di pabrik pepsi. Biaya gaji pengawastersebut tetap terkait dengan obyek biaya pepsi-cola, karena pengawasan juga dilakukan pada produksi dan penjualan pepsi-cola.

Menurut Horngren, Datar dan Rajan (2011) dalam bukunya *Cost Accounting-A Manajerial Emphasis*, faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya menjadi biaya langsung atau biaya tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Materialitas biaya yang bersangkutan

Semakin besar nilai suatu biaya, semakin besar kemungkinan biaya tersebut dilacak secara ekonomis pada obyek biaya tertentu. Biaya dengan nilai kecil digolongkan pada biaya yang tidak material, karena untuk melacak keberadaan biaya tersebut pada obyek biaya tertentu, mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada nominal biaya yang akan diperhitungkan. Misalnya

---

<sup>6</sup>Hugh, C., David, H., & Ellis, J., Management Accounting and Principles, 2005 (p. 60)

pada suatu perusahaan pemesanan katalog, akan lebih ekonomis melacak biaya kurir pengantar paket pada satu pelanggan (biaya langsung) daripada melacak biaya kertas faktur yang terdapat dalam satu paket (biaya tidak langsung), karena waktu dari staf administrasi penjualan lebih baik dihabiskan untuk mengumpulkan informasi dari pelanggan dalam upaya pemasaran daripada menelusuri biaya kertas faktur.

## 2. Ketersediaan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengelompokkan biaya sebagai biaya langsung. Contohnya penggunaan kode balok (*barcode*), cara ini memungkinkan perusahaan melacak sejumlah bahan yang sebelumnya diperlakukan sebagai biaya tidak langsung menjadi biaya langsung. Bagian komponen sebuah produk memiliki kode balok yang dapat dipindai (*scan*) pada setiap titik proses produksi. *Barcode* akan terbaca kedalam arsip biaya manufaktur hanya dengan menggoyangkan tongkat. Cara ini lebih cepat dan efisien penggunaannya untuk membantu tugas karyawan supermarket dalam memasukan biaya setiap item yang dibeli oleh pelanggan.

## 3. Desain Operasi

Mengklasifikasikan biaya sebagai biaya langsung lebih mudah jika perusahaan mempunyai klasifikasi pada obyek biaya, seperti spesifik produk atau pelanggan tertentu. Sebagai contoh perusahaan kimia mengklasifikasikan perusahaan abu soda sebagai biaya abu soda.

Penelusuran biaya ke obyek biaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

### 1. Penelusuran langsung (*direct tracing*).

Penelusuran langsung adalah proses mengidentifikasi dan menetapkan biaya pada obyek biaya dengan cara khusus yaitu dengan melakukan pengamatan fisik pada suatu obyek biaya. Sebagai contoh, asumsikan bahwa departemen pembelian adalah obyek biaya. Gaji supervisor bagian pembelian dimasukkan dalam perhitungan pembelian barang adalah contoh biaya yang secara khusus dapat diidentifikasi (dengan pengamatan fisik) pada obyek biaya (bagian pembelian). Idealnya, semua biaya harus dibebankan pada obyek biaya dengan menggunakan penelusuran langsung. Sayangnya, sangat sering tidak

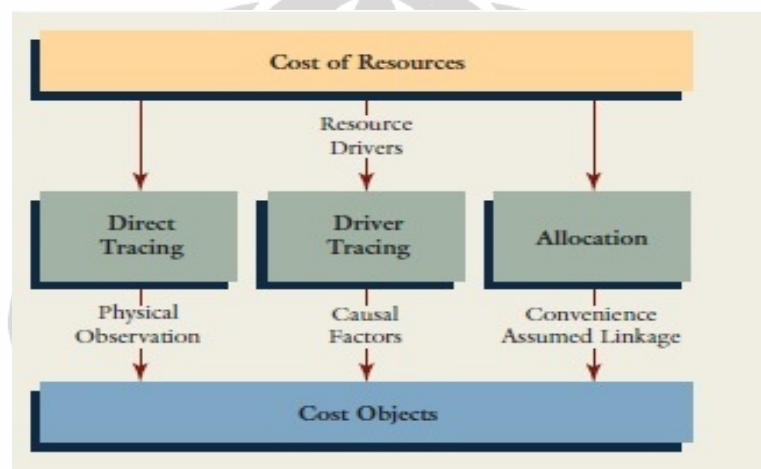
mungkin untuk langsung mengamati secara fisik jumlah sumber daya yang dikonsumsi pada sebuah obyek. Pendekatan terbaik berikutnya adalah menggunakan hubungan sebab akibat untuk mengidentifikasi penelusuran.

## 2. Penelusuran driver (*driver tracing*)

Pemicu biaya adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya, aktivitas dan pendapatan. *Driver tracing* adalah penggunaan driver untuk membebankan biaya pada obyek biaya. Walaupun perhitungan *driver tracing* kurang tepat dibandingkan dengan *direct tracing*, tetapi *driver tracing* sangat akurat jika menggunakan hubungan sebab dan akibat. Misalnya, mempertimbangkan biaya listrik untuk pabrik jeans. Manajer pabrik mungkin ingin tahu berapa banyak listrik digunakan untuk menjalankan mesin jahit. Mengamati fisik secara langsung berapa banyak listrik yang digunakan untuk mengukur konsumsi daya dari mesin jahit, mungkin tidak praktis. Dengan demikian, *driver* seperti "jam mesin" dapat digunakan untuk menetapkan biaya listrik. Jika biaya listrik per jam mesin adalah \$0,50 dan mesin jahit menggunakan jam mesin 20.000 dalam satu tahun, maka \$10.000 dari biaya listrik ( $\$0,50 \times 20.000$ ) akan dibebankan untuk aktivitas menjahit.

Sedangkan biaya tidak langsung, tidak dapat ditelusuri ke obyek biaya. Ini berarti tidak mempunyai hubungan sebab akibat antara biaya dengan obyek biaya atau penelusuran tidak layak secara ekonomis. Pembebanan biaya tidak langsung ke obyek biaya dinamakan alokasi. Alokasi dibebankan ke aktivitas melalui basis yang bersifat sembarang, karena tidak ada hubungan sebab akibat, mengalokasikan biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau semacam asumsi. Misalnya, mempertimbangkan biaya penggunaan pemanasan dan pencahayaan pabrik yang memproduksi lima produk, dimana biaya tersebut harus dibebankan pada setiap produk. Jelas sulit untuk melihat adanya hubungan sebab akibat antara satu produk dengan produk lainnya. Sebuah cara yang mudah untuk mengalokasikan biaya ini adalah dengan menetapkan proporsional jam tenaga kerja langsung yang digunakan pada setiap produk.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembebanan biaya ke obyek biaya dibagi menjadi tiga, yaitu *direct tracing*, *driver tracing* dan alokasi. Mengidentifikasi pemicu biaya dan menilai kualitas hubungan sebab akibat, jauh lebih mahal daripada menggunakan *directtracing* atau alokasi. Bahkan, salah satu keuntungan dari alokasi adalah sederhana dan murah untuk diterapkan. Namun, alokasi adalah metode pembebanan biaya yang paling tidak akurat, dan penggunaannya harus dihindari sebisa mungkin. Dalam banyak kasus, *driver tracing* meningkatkan akurasi perhitungan yang lebih besar daripada biaya tambahan yang ditimbulkan karena menggunakan *driver tracing*.



**Gambar 2.2 Cost Assignment Methods**

Sumber: Don, R.H., Maryanne, M.M. & Liming, G., Cost Management: Accounting and Control, 6thed., 2006 (p. 27).

Sistem perhitungan biaya diatas diperbaiki karena alasan-alasan berikut :

1. Peningkatan keanekaragaman produk.

Pelanggan menuntut produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan mereka dan untuk membedakan dengan para pesaing, perusahaan membuat serta menjual makin banyak produk dibandingkan masa lalu. Misalnya saat ini bank-bank menawarkan berbagai jenis layanan yang berbeda: ATM, kartu kredit, layanan investasi dan asuransi. Produk-produk yang berbeda membutuhkan sumber daya yang juga berbeda untuk membuatnya karena ada perbedaan volume, proses dan kompleksitas. Sumber daya yang diperlukan oleh produk-produk yang berbeda ini tidak dapat diukur oleh sistem kalkulasi biaya yang sederhana, karena akan mengakibatkan biaya produk yang tidak akurat dan keliru.

## 2. Peningkatan biaya tidak langsung.

Kemajuan teknologi dalam proses produksi telah meningkatkan biaya tidak langsung dan menurunkan biaya langsung, terutama tenaga kerja manufaktur langsung. Sebagai contoh, otomatisasi pabrik, seperti *computer integrated manufacturing* (CIM) dan *flexible manufacturing system* (FMS), telah mengurangi biaya tenaga kerja manufaktur langsung secara besar-besaran. Komputer di ruang pabrik memberikan instruksi untuk memasang dan menjalankan peralatan dengan cepat dan otomatis. Komputer secara akurat mengukur ratusan parameter produksi dan secara langsung mengendalikan proses manufaktur untuk menghasilkan *output* berkualitas tinggi. Sedangkan tenaga kerja manufaktur hanya berfungsi sebagai pendukung, seperti penjadwalan produksi, desain, rekayasa produk dan proses. Karena tenaga kerja manufaktur bukan merupakan pemicu biaya (*cost driver*) dari biaya-biaya pendukung, maka pengalokasian biaya tidak langsung berdasarkan tenaga kerja manufaktur sering kali tidak akurat karena jumlah jam kerja yang digunakan pada berbagai produk berbeda.

## 3. Kemajuan teknologi informasi.

Pembaruan sistem perhitungan biaya memerlukan lebih banyak pengumpulan data dan analisis sehingga membuat sistem perhitungan biaya menjadi lebih rinci. Kemajuan teknologi informasi yang dibarengi oleh penurunan biaya penelusuran data membuat pembaharuan sistem perhitungan biaya menjadi lebih murah.

## 4. Persaingan di pasar produk.

Ketika pasar menjadi lebih kompetitif, manajer merasa perlu memperoleh informasi tentang biaya yang lebih akurat untuk membantu membuat keputusan strategis yang penting, seperti menentukan harga produk dan produk mana yang harus dijual. Menetapkan harga yang benar dan mengambil keputusan tentang bauran produk merupakan hal yang sangat penting di pasar yang kompetitif.

### 2.3 Pengertian dan Konsep *Activity-Based Costing* (ABC)

Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki sistem perhitungan (kalkulasi) biaya adalah dengan menerapkan sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas (*activity-based costing* = ABC). Sistem ABC memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai obyek biaya pokok (fundamental). Aktivitas bisa berupa kejadian, tugas atau unit kerja dengan tujuan khusus, contohnya: perancangan produk, penyetelan mesin, pengoperasian mesin, dan pendistribusian produk. Sistem ABC menghitung biaya setiap aktivitas serta membebankan biaya ke produk dan jasa berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa.

Menurut Douglas T. Hicks *activity-based costing* sebagai berikut :

*“Activity based costing is a cost accounting concept based on the premise that product require an organization to perform activities and that those activities require an organization to incur cost. In activity based costing, system are designed so that any cost that cannot be attributed directly to a product flow into the activities that make them necessary and that the cost of each activity then flows to the product(s) that make the activity necessary based on their respective consumption of that activity”.*

Sistem ABC dengan banyak aktivitas menjadi kompleks dan tidak praktis untuk dioperasikan, sedangkan sistem ABC dengan terlalu sedikit aktivitas mungkin tidak cukup handal untuk mengukur hubungan sebab akibat antara pemicu biaya (*cost driver*) dengan berbagai biaya tidak langsung. Untuk itu diperlukan deskripsi aktivitas yang membentuk dasar dari sistem ABC, yang disebut sebagai *daftar aktivitas* atau *kamus aktivitas*. Ketika membahas sistem ABC, ada tiga pedoman yang harus selalu diingat, yaitu :

1. Penelusuran biaya langsung.

Sistem ABC bertujuan mengklasifikasikan kembali sejumlah biaya tidak langsung menjadi biaya langsung dengan mengevaluasi apakah sejumlah biaya yang saat ini diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung dapat ditelusuri ke obyek biaya.

2. Pool biaya tidak langsung.

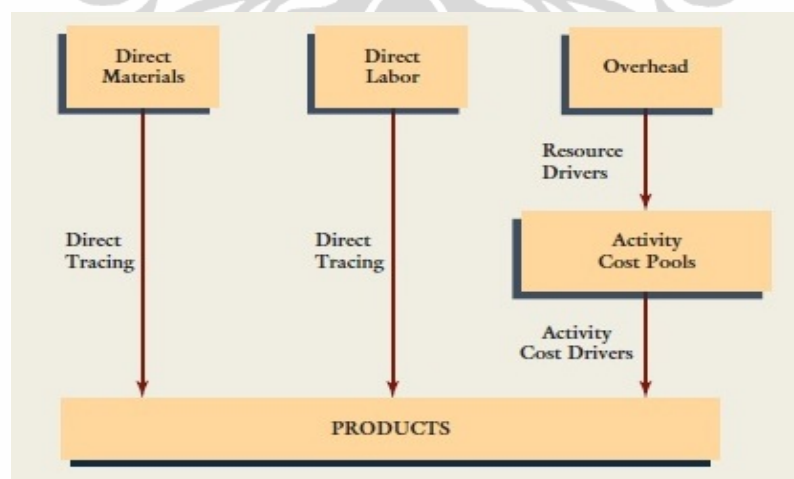
Sistem ABC membentuk pool biaya tidak langsung yang lebih sedikit dan terkait dengan aktivitas yang berbeda. Misalnya biaya pool distribusi, dimana

upah supir truk, biaya pemindahan kemasan produk, dan semua biaya yang terkait dengan biaya distribusi masuk ke dalam pool ini. Satu pool biaya tidak langsung belum bersifat homogen, dikarenakan biaya dari beberapa aktivitas dalam satu pool biaya memiliki hubungan sebab akibat yang lemah. Contohnya: biaya pada perancangan produk, penyetulan mesin dan pendistribusian produk dimasukkan dalam satu pool biaya, maka hubungan sebab akibat diantara ketiga biaya tersebut sangat lemah.

### 3. Dasar alokasi biaya.

Untuk setiap pool biaya aktivitas, ukuran aktivitas yang dilaksanakan berfungsi sebagai dasar alokasi biaya. Misalnya sebuah pabrik mengidentifikasi pengukuran (penyetelan) jam untuk mengukur aktivitas mesin, maka jumlah jam penyetelan mesin dijadikan sebagai dasar alokasi biaya.

Logika sistem ABC adalah pool biaya aktivitas terstruktur secara layak dengan dasar alokasi biaya aktivitas tertentu, dan merupakan pemicu biaya dari pool biaya tersebut. Sehingga menghasilkan kalkulasi biaya aktivitas yang lebih akurat. Berikut hubungan *activity-based system* dengan biaya yang telah dibahas



**Gambar 2.3 Activity-Based Costing Model**

Sumber: Don, R.H., Maryanne, M.M. & Liming, G., Cost Management : Accounting and Control, 6th ed., 2006 (p. 96).

Dalam sistem ABC, dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya *overhead* disebut sebagai pemicu (*driver*). Pemicu sumber daya (*resource driver*) adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya

ke berbagai aktivitas berbeda yang menggunakan sumber daya tersebut. Pemicu biaya (*cost driver*) adalah variabel, seperti tingkat aktivitas atau volume, yang menjadi dasar timbulnya biaya dalam rentang waktu tertentu. Artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dengan perubahan tingkat biaya total. Sebagai contoh, jika biaya desain produk berubah sejalan dengan perubahan jumlah komponen produk, jumlah komponen adalah pemicu biaya atas biaya desain produk.

Pemicu biaya dari suatu biaya variabel adalah tingkat aktivitas atau volume yang perubahannya proporsional dengan perubahan biaya variabel. Sebagai contoh, jumlah mobil yang dirakit merupakan pemicu biaya atas biaya setir. Jika pekerja perakitan dibayar berdasarkan jam kerja, maka jumlah jam perakitan adalah pemicu biaya atas biaya perakitan (*variabel*). Biaya yang bersifat tetap dalam jangka pendek tidak mempunyai pemicu biaya dalam jangka pendek namun mungkin mempunyai pemicu biaya dalam jangka panjang. Misalnya biaya untuk menguji printer warna Hewlett-Packard, terdiri atas peralatan departemen pengujian dan biaya staf yang tidak mudah berubah, sehingga bersifat tetap dalam jangka pendek jika dikaitkan dengan perubahan volume produksi. Dalam kasus ini, volume produksi bukan merupakan pemicu biaya bagi biaya pengujian dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, Hewlett-Packard akan meningkatkan atau mengurangi peralatan dan staf departemen pengujian sampai ke tingkat yang dibutuhkan untuk mendukung volume produksi di masa depan. Dalam jangka panjang volume produksi merupakan pemicu biaya bagi biaya pengujian.

Ada dua jenis pemicu biaya (*cost driver*), yaitu :

1. Pemicu sumber daya (*resources driver*) merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Pemicu sumber daya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke *cost pool* tertentu. Contoh *resources driver* adalah persentase dari total yang digunakan oleh suatu aktivitas.

*Cost pool* yang dibentuk harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang homogen, dan merupakan suatu kumpulan dari biaya tidak langsung yang variasi



biayanya dapat dijelaskan oleh satu pemicu biaya. Sehingga biaya tidak langsung dapat dibebankan ke masing-masing aktivitas tersebut berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi. *Cost pool* berguna untuk menentukan *indirect cost rate* yang merupakan tarif biaya *overhead* per unit *cost driver* yang dihitung untuk setiap kelompok aktivitas. Tarif kelompok dihitung dengan rumus total biaya *overhead* untuk kelompok aktivitas tertentu dibagi dasar pengukuran aktivitas kelompok tersebut.

2. Pemicuaktivitas (*activity driver*) adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas berdasarkan obyek biaya. Pemicu aktivitas digunakan untuk membebankan biaya dari *cost pool* ke obyek biaya. Contoh *activity driver* adalah jumlah suku cadang yang digunakan dalam produk akhir untuk mengukur konsumsi aktivitas penanganan bahan setiap produk.

Pemicu aktivitas (*activity driver*) merupakan dasar-dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk, pelanggan atau obyek biaya final (*final cost object*) lainnya. *Activity cost drivers* adalah suatu ukuran kuantitatif dari *output* aktivitas, dengan contoh sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Activity Cost Drivers**

<b>Aktivitas</b>	<b>Activity Cost Driver</b>
- Menjalankan mesin	- Jam mesin
- Mengeset mesin	- Jam mengeset
- Penjadwalan produksi	- Menjalankan produksi
- Penerimaan bahan	- Bahan yang diterima
- Pendukung produk-produk yang ada	- Sejumlah produk
- Memperkenalkan produk-produk baru	- Jumlah produk baru yang diperkenalkan
- Pemeliharaan mesin	- Jam pemeliharaan
- Modifikasi karakteristik produk	- Pemberitahuan perubahan teknik

Sumber: Islahuzzaman, *Activity Based Costing Teori dan Aplikasi*, cetakan ke-1, 2011 (hal. 44).

Sistem ABC biasanya menggunakan hirarki biaya untuk mengklasifikasikan biaya tidak langsung menjadi pool biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya atau dasar alokasi biaya yang berbeda atau perbedaan kesulitan dalam menentukan hubungan sebab akibat (atau manfaat yang diterima). Ada empat

tingkatan yang digunakan untuk mengidentifikasi klasifikasi diatas yaitu sebagai berikut :

a. Biaya tingkat unit *output* (*output unit-level costs*).

Biaya aktivitas yang dilaksanakan pada setiap unit produk atau jasa individual. Misalnya biaya operasi mesin cetak (terdiri dari biaya listrik, penyusutan mesin dan reparasi) yang terkait dengan aktivitas pengoperasian mesin cetak otomatis merupakan biaya tingkat unit *output*, karena biasanya biaya aktivitas ini meningkat seiring dengan penambahan unit *output* yang diproduksi (atau jam mesin yang digunakan).

b. Biaya tingkat *batch* (*batch-level costs*).

Biaya aktivitas yang berkaitan dengan kelompok produk atau jasa, dan bukan dengan setiap unit produk atau jasa individual. Misalnya biaya pengirimandikelompokkan berdasarkan pengiriman yang dilakukan, umumnya menggunakan kode *batch* yang sama pada setiap pengiriman. Bagi pembeli, yang membeli berbagai jenis bahan langsung maka biaya pembelian dapat berjumlah sangat besar, karena barang yang dikirim dikelompokkan lagi berdasarkan jenis bahan. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya tingkat *batch* karena biaya aktivitas ini meningkat seiring dengan penambahan *batch*.

c. Biaya pendukung produk/jasa (*product/service-sustaining costs*).

Merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk mendukung setiap produk atau jasa tanpa menghiraukan jumlah unit atau *batch* yang dibuat. Contohnya biaya desain dan biaya keluhan pelanggan. Besarnya biaya desain sangat tergantung pada waktu yang dihabiskan oleh perancang untuk merancang dan memodifikasi produk berdasarkan kompleksitas pesanan. Sedangkan biaya keluhan pelanggan, umumnya akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu.

d. Biaya pendukung fasilitas (*facility-sustaining costs*).

Biaya aktivitas yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa individual namun mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Contohnya biaya administrasi umum, biaya ini sulit menemukan hubungan sebab akibat yang erat antara jenis biaya dengan dasar alokasi biaya. Ketiadaan hubungan sebab

akibat menyebabkan beberapa perusahaan tidak mengalokasikan biaya tersebut ke barang dan jasa tetapi langsung mengurangi secara terpisah dari laba operasi.

Setelah memahami konsep dasar ABC, diperlukan pendekatan tujuh langkah perhitungan (kalkulasi) biaya dalam sistem ABC, yaitu:

1. Mengidentifikasi produk yang menjadi obyek biaya. Misal obyek biaya adalah lensa kamera S3 dan CL5. Tujuan yang pertama adalah menghitung total biaya, sedangkan tujuan kedua, menghitung biaya per unit dari merancang, membuat dan mendistribusikan lensa-lensa tersebut.
2. Mengidentifikasi biaya langsung produk. Perusahaan mengidentifikasi biaya langsung berikut: biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya pembersihan serta perawatan cetakan. Pada sistem kalkulasi biaya yang digunakan sebelumnya, perusahaan mengalokasikan biaya pembersihan dan perawatan cetakan sebagai biaya tidak langsung ke produk dengan menggunakan jam tenaga kerja manufaktur langsung. Pada sistem ABC, biaya tersebut dapat ditelusuri langsung sebagai biaya tingkat *batch* karena jenis lensa hanya dapat dibuat dengan cetakan khusus, yaitu lensa sederhana dan lensa canggih.
3. Memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Perusahaan mengidentifikasi enam aktivitas untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk, yaitu: perancangan, penyetelan mesin cetak, pengoperasian mesin cetak, pengaturan pengiriman, pendistribusian lensa dan administrasi serta pengelolaan proses. Pengidentifikasi dasar alokasi biaya dapat dilakukan dengan menentukan jumlah pool aktivitas dan ketersediaan data yang bisa diandalkan.
4. Mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Pada langkah ini biaya yang ditanggung oleh perusahaan dibebankan ke aktivitas. Sebagai contoh semua biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan pengiriman kemasan dalam ukuran meter kubik dibebankan ke pool biaya distribusi. Beberapa biaya dapat langsung diidentifikasi pada aktivitas tertentu, contohnya biaya yang langsung diidentifikasi pada aktivitas desain adalah biaya bahan untuk mendesain

produk, gaji yang dibayarkan kepada teknisi desain dan penyusutan peralatan yang digunakan dalam departemen desain. Sedangkan biaya yang perlu dialokasikan ke beberapa aktivitas adalah gaji teknisi bagian produksi dimana dialokasikan jam kerja teknisi tersebut pada aktivitas perancangan, penyetelan mesin cetak dan pengoperasian mesin cetak.

5. Menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung.

**Tabel 2.2 Tarif per Unit dari Setiap Dasar Alokasi Biaya**

(Langkah 4)			(Langkah 3)		(Langkah 5)		Hubungan Sebab Akibat antara Dasar Alokasi Biaya dan Biaya Aktivitas
Aktivitas	Kategori Hirarki Biaya	Total Biaya Tidak Langsung	Kuantitas Dasar Alokasi Biaya		Tarif Alokasi Biaya Overhead Aktivitas		
Perancangan	Pendukung Produk	450.000	100	Bagian Meter Persegi	4.500	Per Bagian Meter Persegi	Cetakan cangkih (dengan bagian lebih banyak dan daerah permukaan yang lebih luas) membutuhkan biaya tidak langsung departemen perancangan yang lebih besar
Penyetelan Mesin Cetak	Tingkat <i>Batch</i>	300.000	2.000	Jam Penyetelan	150	Per Jam Penyetelan	Biaya tidak langsung. Penyetelan meningkat seiring dengan peningkatan jam penyetelan.
Pengoperasian Mesin Cetak	Tingkat Unit <i>Output</i>	637.500	12.750	Jam Mesin Cetak	50	Per Jam Mesin Cetak	Biaya tidak langsung pengoperasian mesin cetak meningkat seiring dengan peningkatan jam mesin cetak.
Pengiriman	Tingkat <i>Batch</i>	81.000	200	Pengiriman	405	Per Pengiriman	Biaya pengiriman yang terjadi untuk menyiapkan <i>batch</i> yang akan dikirim meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pengiriman.
Distribusi	Tingkat Unit <i>Output</i>	391.500	67.500	Pengiriman Dalam Meter Kubik	5,80	Per Pengiriman Dalam Meter Kubik	Biaya distribusi meningkat seiring dengan peningkatan pengiriman kemasan dalam meter kubik.
Administrasi	Pendukung Fasilitas	255.000	39.750	Jam Tenaga Kerja Manufaktur Langsung	6,415	Per Jam Tenaga Kerja Manufaktur Langsung	Permintaan akan sumber daya administratif meningkat seiring dengan peningkatan jam tenaga kerja manufaktur langsung.

Sumber: Charles, T.H., Srikant, M.D, & George, F., Cost Accounting, A Manajerial Emphasis, 12th ed., 2006 (p. 151).

6. Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk.
7. Menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung. Berikut contoh langkah 6 dan 7

**Tabel 2.3 Direct Cost&Indirect Cost**

Deskripsi Biaya	60.000 Unit		15.000 Unit		Total
	Lensa Sederhana (S3)		Lensa Kompleks (CL5)		
	Total	per Unit	Total	per Unit	
Direct Costs					
Direct Material	1.125.000	18,75	675.000	45,00	1.800.000
Direct Manufacturing Labor	600.000	10,00	195.000	13,00	795.000
Direct Mold Cleaning and Maintenance Costs	120.000	2,00	150.000	10,00	270.000
<b>Total Direct Costs (Step 2)</b>	<b>1.845.000</b>	<b>30,75</b>	<b>1.020.000</b>	<b>68,00</b>	<b>2.865.000</b>
Indirect Costs of Activities					
Design					
S3, 30 Parts-Sq.Ft. X \$4.500	135.000	2,25			450.000
CL5, 70 Parts-Sq.Ft. X \$4.500			315.000	21,00	
Setup Of Molding Machines					
S3, 500 Setup-Hours X \$150	75.000	1,25			300.000
CL5, 1.500 Setup-Hours X \$150			225.000	15,00	
Machine Operations					
S3, 9.000 Molding Machine-Hours X \$50	450.000	7,50			637.500
CL5, 3.750 Molding Machine-Hours X \$50			187.500	12,50	
Shipment Setup					
S3, 100 Shipments X \$405	40.500	0,67			81.000
CL5, 100 Shipments X \$405			40.500	2,70	
Distribution					
S3, 45.000 Cubis Feet Delivered X \$5,8	261.000	4,35			391.500
CL5, 22.500 Cubis Feet Delivered X \$5,8			130.500	8,70	
Administration					
S3, 30.000 Dir. Manuf. Labor-Hours X \$6,4151	192.453	3,21			255.000
CL5, 9.750 Dir. Manuf. Labor-Hours X \$6,4151			62.547	4,17	
<b>Total Indirect Costs Allocated (Step 6)</b>	<b>1.153.953</b>	<b>19,23</b>	<b>961.047</b>	<b>64,07</b>	<b>2.115.000</b>
<b>Total Costs (Step 7)</b>	<b>2.998.953</b>	<b>49,98</b>	<b>1.981.047</b>	<b>132,07</b>	<b>4.980.000</b>

Sumber: Charles, T.H., Srikant, M.D, & George, F., Cost Accounting, A Manajerial Emphasis, 12th ed., 2006 (p. 152).

Sedangkan Blocher, dkk (2008), menentukan tiga langkah dalam merancang sistem ABC, yaitu :

1. Mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas.

Pada tahap ini, perusahaan melakukan analisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas perusahaan. Biaya sumber daya merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Pada umumnya biaya sumber daya tercatat dalam akun-akun tertentu dalam sistem akuntansi, yaitu pada sub rekening buku besar, seperti bahan, persediaan, bangunan, peralatan, gaji dan tunjangan. Proses produksi yang semakin kompleks melibatkan banyak aktivitas didalamnya, sehingga diperlukan keputusan untuk menentukan berapa banyak aktivitas yang diperlukan pada pusat aktivitas.

2. Membebankan biaya sumber daya ke aktivitas.

Aktivitas menimbulkan biaya sumber daya. Pemicu biaya digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Biaya sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas dengan cara penelusuran langsung (*direct tracing*) untuk mengukur pemakaian sumber daya pada aktivitas. Tahap ini dinamakan pemicu sumber daya (*resource drivers*).

3. Membebankan biaya aktivitas ke obyek biaya.

Apabila biaya aktivitas telah diketahui, selanjutnya perlu dilakukan pengukuran biaya aktivitas per unit. Hal ini dilakukan dengan mengukur biaya per unit *output* yang diproduksi pada aktivitas tersebut. Selanjutnya pemicu aktivitas digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke obyek biaya. Tahap ini dinamakan pemicu aktivitas biaya (*activity cost drivers*).

Aktivitas tersebut di atas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Aktivitas bernilai tambah (*value added activity*).

Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang perlu dipertahankan dalam bisnis karena dapat menambah nilai bagi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas bernilai tambah disebut biaya bernilai tambah (*value added activity cost*). Suatu aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai nilai tambah apabila secara simultan memenuhi tiga kondisi yaitu aktivitas menghasilkan perubahan, perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya,

dan aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain dilakukan. Setelah aktivitas bernilai tambah diidentifikasi, kemudian dapat didefinisikan *value-added cost*, yaitu biaya untuk melakukan aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi yang sempurna. Tersirat dalam definisi tersebut, bahwa aktivitas bernilai tambah mungkin berisi tindakan yang tidak penting yang menciptakan biaya yang tidak perlu.

2. Aktivitas tidak bernilai tambah (*non-value added activity*).

Aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak menambah nilai suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tidak bernilai tambah disebut biaya tidak bernilai tambah (*non-value added activity cost*). Aktivitas ini merupakan aktivitas yang tidak dapat memenuhi salah satu dari tiga kondisi yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam operasi manufaktur, ada lima aktivitas yang menyebabkan pemborosan, yaitu penjadwalan, perpindahan, menunggu, pemeriksaan dan penyimpanan.

Kondisi persaingan mendikte perusahaan harus menghasilkan produk yang pelanggan inginkan, tepat waktu, dan dengan biaya serendah mungkin<sup>7</sup>. Ini berarti bahwa sebuah organisasi harus terus berusaha untuk perbaikan biaya. Dalam hal ini, *Kaizen Costing* mengarahkan pada mengurangi *waste* dalam proses bisnis, *quality control* yang akurat, *just in time delivery*, standarisasi pekerjaan, dan menggunakan peralatan yang efisien. Manajemen aktivitas adalah bagian mendasar dari *Kaizen Costing*. Aktivitas manajemen dapat mengurangi biaya dalam empat cara sebagai berikut:

1. Penghapusan aktivitas (*activity elimination*).

Penghapusan aktivitas berfokus pada aktivitas tidak bernilai tambah. Setelah aktivitas yang tidak bernilai tambah teridentifikasi, kemudian diikuti dengan pengurangan ukuran dari aktivitas.

---

<sup>7</sup>Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, Liming Guan, *Cost Management - Accounting and Control*, 6th Edition South-Western College Pub(2007) hal. 433.

2. Pemilihan aktivitas (*activity selection*).

Memilih aktivitas yang disebabkan oleh strategi bersaing. Strategi berbeda menyebabkan aktivitas yang berbeda. Dalam hal ini strategi berbiaya paling rendah yang seharusnya dipilih.

3. Pengurangan aktivitas (*activity reduction*).

Pengurangan aktivitas dilakukan dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas. Kegiatan pengurangan aktivitas mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan merupakan strategi jangka pendek untuk memindahkan aktivitas tidak bernilai tambah menuju titik eliminasi. Misalnya dengan meningkatnya kualitas produk, keluhan pelanggan biasanya menurun, sehingga berakibat biaya pelayanan keluhan pelanggan menurun.

4. Pembagian aktivitas (*activity sharing*).

Pembagian aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomi, contohnya adalah produk baru dirancang agar dapat menggunakan suku cadang yang telah dibuat untuk produk lain. Dengan menggunakan suku cadang yang sudah ada maka biaya per satuan aktivitas menjadi berkurang.

Adapun tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa sistem ABC akan memberikan manfaat adalah sebagai berikut :

1. Jumlah biaya tidak langsung signifikan telah dialokasikan dengan hanya menggunakan satu atau dua pool biaya saja.
2. Semua atau sebagian besar biaya tidak langsung diidentifikasi sebagai biaya tingkat unit *output* (sejumlah kecil biaya tidak langsung diuraikan sebagai biaya tingkat *batch*, biaya pendukung produk, atau biaya pendukung fasilitas).
3. Produk memerlukan beragam permintaan akan sumber daya karena perbedaan volume, tahap-tahap pemrosesan, ukuran *batch* atau kompleksitas.
4. Produk yang dibuat dan dipasarkan dengan baik oleh perusahaan menghasilkan laba yang rendah; sementara produk yang kurang baik justru memiliki laba yang tinggi.



5. Terjadi perbedaan pendapat antara staf operasional pabrik dengan staf akuntansi mengenai biaya manufaktur dan pemasaran produk serta jasa.

#### **2.4 Activity-Based Costing pada Perusahaan Jasa, Manfaat, Keunggulan serta Keterbatasan ABC**

Menurut Brinker (1992), karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa, yaitu:

1. *Output* seringkali sulit didefinisikan
2. Pengendalian aktivitas pada permintaan jasa kurang dapat didefinisi
3. *Cost* mewakili proporsi yang lebih tinggi dari total *cost* pada seluruh kapasitas yang ada dan sulit untuk menghubungkan antara *output* dengan aktivitasnya. *Output* pada perusahaan jasa adalah manfaat dari jasa itu sendiri yang kebanyakan tidak terwujud, contoh: kecepatan suatu jasa, kualitas suatu informasi, kepuasan konsumen. *Output* pada perusahaan jasa tidak berwujud membuat perhitungan menjadi sulit. Sekalipun sulit, dewasa ini bisnis jasa menggunakan metode *activity-based costing* pada bisnisnya.

Perusahaan jasa umumnya mengimplementasikan beberapa bentuk sistem ABC untuk mengidentifikasi bauran produk yang menguntungkan, meningkatkan efisiensi dan memuaskan pelanggan. Pendekatan umum sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sama dengan perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam pool yang homogen dan diklasifikasikan sebagai biaya tingkat unit *output*, biaya tingkat *batch*, biaya pendukung produk/jasa atau biaya pendukung fasilitas. Pool biaya tersebut terkait dengan aktivitas, kemudian biaya itu dialokasikan ke produk atau pelanggan dengan menggunakan dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biaya tersebut. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang juga harus menghadapi masalah pengukuran pool biaya aktivitas, pengidentifikasian serta pengukuran dasar alokasi.

*Cooperative bank* menggunakan pendekatan pool biaya yang homogen ketika mengimplementasikan sistem *activity-based costing* pada operasi retail banking. Bank tersebut menghitung biaya dari berbagai aktivitas, seperti melaksanakan transaksi melalui ATM, membuka dan menutup rekening, mengadministrasikan hipotek, dan memroses transaksi visa. Kemudian menggunakan tarif biaya

aktivitas untuk menghitung biaya berbagai produk, seperti rekening cek, hipotek dan kartu visa. Informasi yang diperoleh dari sistem ABC akan membantu *the cooperative bank* dalam memperbaiki sistem yang digunakan, mengidentifikasi produk menguntungkan dan mengenali segmentasi pelanggan.

Untuk itu dalam dalam penerapan *activity based costing* pada perusahaan jasa diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. *Identifying and costing activities.*

Mengidentifikasi dan menerapkan biaya perhitungan aktivitas dalam pengoperasian perusahaan.

2. *Special challenger.*

Perusahaan jasa dan manufaktur pada umumnya memiliki permasalahan yang serupa. Misalnya, kesulitan mengalokasikan biaya ke dalam aktivitas. Selain itu, jasa tidak dapat menjadi persediaan, namun jasa yang tidak digunakan, tetap menimbulkan biaya.

3. *Output diversity.*

Perusahaan jasa juga memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi *output* yang ada. Keanekaragaman *output* menggambarkan aktivitas pendukung yang berbeda sehingga sulit untuk dijelaskan atau ditentukan.

Manfaat sistem *activity-based costing* (ABC) bagi manajemen, antara lain :

1. ABC menyajikan biaya produk, kemampuan memperoleh laba, keputusan-keputusan strategis mengenai harga jual, lini produk, pasar pelanggan, dan pengeluaran modal dengan akurat dan informatif.
2. ABC memberikan pengukuran biaya pemicu aktivitas dengan akurat, sehingga membantu manajer memperbaiki produk, membuat keputusan pemilihan desain produk, mengalokasikan biaya, dan membantu mempertinggi berbagai nilai proyeksi.
3. ABC membantu manajer dalam mengakses informasi tentang biaya-biaya yang relevan dalam membuat keputusan bisnis.

### Keunggulan Metode ABC

1. Suatu pengkajian ABC dapat meyakinkan manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk lebih kompetitif. Sebagai hasilnya pihak manajemen dapat meningkatkan mutu dan fokus pada pengurangan biaya.
2. ABC membantu dalam pengambilan keputusan pihak manajemen.
3. ABC membuat manajemen berada pada posisi dimana dapat dilakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar.
4. ABC membantu manajemen dalam melakukan analisis volume produk, untuk mencari *break even* pada produk bervolume rendah.
5. Melalui analisis biaya dan pola konsumsi sumber daya, manajemen dapat merencanakan kembali proses manufaktur dalam mencapai pola keluaran yang lebih bermutu dan efisien.

Selain memiliki keunggulan, ABC memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Pengalokasian. Sekalipun data tersedia, banyak biaya yang perlu dialokasikan ke produk atas dasar ukuran volume, karena tidak dapat ditemukan aktivitas khusus yang ditimbulkan. Hal ini terjadi pada biaya *facility-sustaining* seperti membersihkan pabrik dan mengatur proses produksi.
2. Banyak biaya yang dihilangkan dalam analisis. Misalnya biaya pemasaran, periklanan, riset dan pengembangan dan klaim jaminan. Tetapi pada perhitungan biaya tradisional, biaya pemasaran dan administratif tidak termasuk ke dalam biaya produk karena pada *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) termasuk biaya periode.
3. Sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diterapkan serta seperti kebanyakan manajemen inovasi, ABC seringkali memerlukan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengembangkan/melaksanakan hingga pada tahap berhasil.

## BAB 3

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Ibadah Haji terdiri dari beberapa tahap, antara satu tahap dengan tahap lainnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, untuk menyelesaikan semua rangkaian kegiatan tersebut memerlukan waktu yang berbeda antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah memberlakukan sistem gelombang untuk mengurangi penumpukan jamaah haji pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun biaya dari keseluruhan pelaksanaan haji didanai oleh 5 (lima) sumber dana, yaitu dibebankan kepada jamaah haji, dana hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian Agama, APBN Kementerian Kesehatan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji merupakan setoran awal jamaah haji yang diinvestasikan ke dalam jasa giro, deposito dan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara seri sukuk dana haji Indonesia (SDHI) yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji Kementerian Agama sejak tahun 2006. Berikut ini beberapa tahapan dari proses penyelenggaraan ibadah haji.

#### 3.1. Tahapan Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji

##### 1. Tahap pendaftaran

Pendaftaran jamaah haji dilakukan di kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten/kota sesuai domisili calon jamaah haji<sup>8</sup> dengan prinsip pelayanan keberangkatan berdasarkan nomor urut pendaftaran (*nomor pors*) yang diberlakukan sejak tahun 1425H/2005M dengan menggunakan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Di Kankemenag kabupaten/kota, calon jamaah haji menunjukkan buku tabungan yang sudah dilegalisir oleh bank sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.6 Tahun 2010 tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran jamaah haji.

lima ratus ribu rupiah)<sup>9</sup>, KTP, surat keterangan sehat dari puskesmas domisili. Kemudian mengambil dan mengisi formulir surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan melakukan foto. Pada prinsipnya foto bisa dimana saja, tetapi di Kankemenag juga menyediakan, dengan biaya per orang Rp.85.000,-. Setelah mengisi SPPH calon jamaah haji datang ke bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) dengan menunjukkan SPPH, kemudian pihak bank melakukan entry data, mentransfer uang setoran awal jamaah ke rekening menteri agama, dan mencetak lembar bukti setoran awal BPIH sebagai tanda bukti memperoleh porsi haji.

Selanjutnya calon jamaah haji kembali datang ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk menyerahkan tanda bukti setoran awal BPIH paling lambat 2 hari setelah ke bank. Pada waktu nomor porsi sudah masuk dalam urutan keberangkatan tahun berjalan, Kankemenag Kabupaten/Kota memberitahukan kepada calon jamaah haji untuk siap-siap melakukan pelunasan. Setelah peraturan presiden tentang besarnya BPIH diumumkan, calon jamaah haji segera melakukan pelunasan BPIH agar tidak melewati batas waktu setor yang telah ditetapkan. Jamaah yang terlambat melakukan pelunasan, akan dipanggil pada tahun berikutnya. Bagi jamaah yang melakukan pelunasan, pihak bank mengeluarkan bukti setoran pelunasan BPIH, dan kemudian jamaah haji datang kembali ke Kankemenag Kabupaten/Kota dengan membawa bukti pelunasan tersebut dengan membawa berkas dan membawa bukti pelunasan ke Kankemenag Kabupaten/Kota, setelah itu Kankemenag tersebut mengirim lembar merah bukti pelunasan ke kanwil Kementerian Agama provinsi untuk ditukar dengan buku manasik.

## 2. Tahap Persiapan

Persiapan yang dilakukan berupa:

---

<sup>9</sup>Valy (2012, Februari 22). Personal interview customer service bank syariah mandiri (BSM). Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan jumlah tabungan yang diwajibkan oleh pihak BSM agar rekening bank tidak tertutup oleh sistem, yang besarnya di setiap bank berbeda, dan kemudian uang tersebut dikembalikan setelah jamaah pulang dari tanah suci tanpa dikenakan biaya administrasi.

#### A. Mental dan fisik.

Mental dan fisik diperlukan untuk dapat melakukan seluruh rangkaian haji.

#### B. Material (bekal).

Diharapkan jamaah membawa material (bekal) secukupnya (tidak berlebihan) dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara haji.

#### C. Pengelompokan.

Pengelompokan bimbingan jamaah haji diatur berdasarkan domisili jamaah dan keluarga. Setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan dalam 1 regu dan diketuai oleh 1 orang kepala regu (karu). Setiap 4 regu (45 orang) dikelompokkan dalam satu rombongan yang diketuai oleh 1 orang kepala rombongan (karom). Karom dan karu mendapatkan insentif masing-masing sebesar SAR.360,- dan SAR.250,- dengan jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten//kota. Pengelompokan bimbingan jamaah haji dilakukan bagi pendaftar haji mandiri, yang tidak melalui kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Umumnya jamaah haji mandiri 30% dari seluruh keberangkatan jamaah haji<sup>10</sup>.

#### D. Bimbingan manasik haji.

Jamaah haji yang masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji dan diberikan bimbingan manasik haji dengan 2 sistem yaitu kelompok dan massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di KUA kecamatan dengan 11 (sebelas) kali pertemuan sedangkan bimbingan massal di kabupaten/kota oleh kantor Kementerian Agama kabupaten/kota minimal 4 (empat) kali pertemuan. Biaya bimbingan manasik haji, buku paket bimbingan manasik dan buku pedoman karom dan karu di danai oleh dana optimalisasi setoran awal haji.

---

<sup>10</sup>Amud (2012, Mei 12). Personal interview pelaksana pada seksi haji Kankemenag Jakarta Pusat.

#### E. Pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan

Pembinaan di puskesmas yang dilakukan bagi calon jamaah haji sehat dan risiko tinggi<sup>11</sup> namun dengan memperhatikan faktor risiko tingginya. Kemudian jamaah haji melakukan imunisasi meningitis, mendapatkan buku ICV (surat keterangan bahwa jamaah haji telah diimunisasi meningitis), buku kesehatan jamaah haji (BKJH) dan buku panduan berhaji sehat. Pada semua kegiatan ini jamaah haji hanya dibebankan Rp.10.000,- dan pendapatan tersebut dimasukkan ke dalam PNBK Kementerian Kesehatan. Sisa dari biaya-biaya diatas ditanggung oleh pemerintah melalui APBN Kementerian Kesehatan<sup>12</sup>.

#### F. Persiapan dokumen

Pembuatan paspor dan visa haji merupakan dokumen yang paling utama. Salah satu syarat untuk mendapatkan visa haji adalah dilampirkannya buku ICV. Biaya paspor dan visa haji jamaah di danai oleh dana optimalisasi setoran awal haji sedangkan paspor petugas haji diurus dan ditanggung sendiri.

### 3. Tahap Pemberangkatan

Tahapan pemberangkatan terdiri dari:

A. Selama perjalanan dari tempat tinggal sampai di asrama haji embarkasi biaya transportasi dari tempat tinggal sampai asrama haji embarkasi merupakan tanggungan jamaah haji sendiri. Tetapi transportasi bagi jamaah provinsi Banten transportasinya di tanggung oleh pemerintah daerah provinsi Banten.

#### B. Di asrama haji embarkasi

Dengan menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) dan bukti setor lunas, jamaah haji masuk ke asrama haji, kemudian menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji, memeriksakan kesehatan fisik (pemeriksaan akhir), menimbang dan memeriksakan barang bawaan

<sup>11</sup>Jamaah haji risiko tinggi yaitu semua jamaah haji yang mempunyai/mengidap penyakit/kondisi tertentu dimana penyakit/kondisi tertentu ini dapat memperburuk kesehatannya selama perjalanan ibadah haji berlangsung.

<sup>12</sup>Vaksin Haji Masih Dipungut Bayaran, diunduh dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/10/11/136360888/Vaksin-Haji-Masih-Dipungut-Bayaran>, di akses diakses tanggal 29 Maret 2012.

(koper). Selanjutnya jamaah menempati kamar yang telah disediakan; dianjurkan mengikuti pembinaan manasik haji; menerima paspor, gelang identitas dan uang *living cost* (biaya hidup selama di Arab Saudi) sebesar SAR.1500,- atau USD.405,-. Semua biaya selama di asrama haji didanai oleh dana optimalisasi setoran awal haji.

#### C. Di bandara embarkasi

Jamaah haji embarkasi Jakarta diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (kloter) dengan menggunakan pesawat maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan kapasitas 455 orang, yang terdiri dari 450 orang jamaah haji, 1 orang tim pemandu haji daerah (TPHI) sebagai ketua kloter, 1 orang tim pembimbing ibadah haji daerah (TPIHI), dan 3 orang tim kesehatan haji daerah (TKHI) sebagai pelayan kesehatan. Biaya penerbangan ditanggung oleh jamaah haji dimana Garuda sebagai maskapai yang ditunjuk menghitung biaya penerbangan dengan sistem sewa carter. Aktivitas angkutan penerbangan haji Garuda dibantu maskapai dengan menyewa pesawat dari tujuh lessor (pihak lessor yang dibidik untuk pengadaan pesawat berasal dari Eropa, Turki, Amerika Serikat, dan China) hanya 1 yang merupakan pesawat milik Garuda<sup>13</sup>. Tetapi harga sewa carter pesawat Garuda sudah termasuk biaya antar jemput jamaah dengan bis dari embarkasi/debarkasi ke bandara keberangkatan/kepulangan masing-masing. Biaya transportasi dari embarkasi antara Lampung menuju bandara Soekarno Hatta ditanggung sebagian oleh jamaah sebagian lagi oleh pemerintah daerah provinsi Lampung<sup>14</sup>.

#### 4. Tahap Kedatangan di Arab Saudi

Pada jamaah haji gelombang I, kedatangan di Arab Saudi melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah sedangkan gelombang II, melalui bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Bagi jamaah haji dengan tujuan Madinah (gelombang I) dikenakan *surcharge landing*. Setelah tiba di bandara, jamaah

<sup>13</sup>Biaya Angkutan Haji Diperkirakan Sulit Turun, diunduh dari, <http://doniismanto.com/2011/04/29/290411-biaya-angkutan-haji-diperkirakan-sulit-turun/>, diakses tanggal 29 Maret 2012.

<sup>14</sup>Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/527/B.VI/HK/2010.



menunggu diruang yang tersedia untuk diperiksa, pemeriksaan tersebut berupa pemeriksaan paspor oleh petugas imigrasi, pemeriksaan badan, pemeriksaan buku kesehatan jamaah oleh petugas bandara Arab Saudi, dan pemeriksaan koper oleh petugas bea cukai. Kemudian paspor diberikan kepada petugas maktab wukala bandara, kemudian diserahkan dan disimpan oleh muasassah Adilla Madinah, untuk ditempel stiker bus naqobah. Setelah diperiksa barang bawaan diserahkan kepada pengangkut barang (ummal) untuk dibawa ke lapangan parkir tempat bis. Kemudian jamaah haji menerima tiket bis dari naqobah (organisasi angkutan darat) untuk perjalanan antar kota perhajian selama di Arab Saudi. Dua hari sebelum berangkat ke Makkah, ketua rombongan dan ketua regu, harus mengecek paspor rombongannya di muasassah Madinah.

Gelombang I melanjutkan perjalanan menuju Madinah sedangkan gelombang II ke Makkah. Biaya pelayanan umum yang terdiri dari biaya naqobah pelayanan muasassah/maktab dan perkemahan armina di tanggung oleh masing-masing jamaah selain itu biaya pemondokan Makkah dan Madinah juga di tanggung oleh jamaah, sedangkan dana optimalisasi setoran awal haji menanggung biaya catering (kecuali di Makkah), pelayanan bongkar muat dan angkutan barang.

#### 5. Tahap Pelaksanaan

Perjalanan jamaah haji gelombang pertama, *di Madinah*, jamaah haji melaksanakan ibadah selama 8 hari dan penempatan pemondokan dilakukan oleh Majmuah (group). Gedung yang ditempati jamaah semuanya bertingkat, gedung dengan tingkat 4 ada yang menggunakan lift dan ada yang menggunakan tangga, sedangkan gedung yang lebih dari 4 tingkat menggunakan lift. Adapun Pelayanan yang diberikan oleh Majmuah (pengusaha hotel/pemondokan) adalah mengatur penempatan kamar bagi jamaah haji, menyediakan air di pemondokan, menyediakan tenaga angkut barang-barang jamaah haji, menyediakan bimbingan (Mursyid) dan bis untuk ziarah. Usai menjalankan ibadah di Madinah, jamaah haji gelombang I

berangkat menuju *Bir Ali*, yang merupakan tempat miqat<sup>15</sup> haji dan umrah, baru kemudian berangkat menuju Makkah.

*Di Makkah*, jamaah haji menetap selama  $\pm 20$  hari, setiap jamaah haji masuk ke pemondokan sesuai hasil qur'ah (pengundian) kemudian melakukan kewajiban umrah (thawaf, sa'i dan tahallul). Selama di Makkah jamaah haji diurus oleh maktab dimana setiap maktab menampung  $\pm 2.500 - 3.000$  jamaah haji. Pelayanan yang diberikan antara lain pengurusan administrasi, penempatan dikamar-kamar pada saat tiba, penyediaan air, penyediaan haris (penjaga gedung), tenaga angkut untuk mengangkut barang-barang, pengurusan jamaah haji tersesat jalan, sakit dan wafat serta bimbingan ibadah. Di Makkah, jamaah haji tidak diberikan makan, untuk itu disarankan agar jamaah haji memilih makanan yang bersih dan terlindungi dari pencemaran. Bagi yang akan membayar Dam dianjurkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi (Bank Al Rajhi/Bank Pembangunan Islam). Setelah selesai ibadah di Makkah kemudian jamaah melakukan persiapan menuju Arafah. Bagi jamaah haji yang sakit/udzur, keberangkatan ke Arafah diatur tersendiri dengan safari wukuf<sup>16</sup> sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) diatur oleh pihak rumah sakit yang bersangkutan. Dalam hal jamaah udzur yang tidak mungkin ikut safari wukuf, maka dibadal haji kan dengan biaya pemerintah Indonesia, melalui PPIH Arab Saudi.

*Di Arafah*, jamaah haji menetap selama 1 hari 1 malam, setiap jamaah haji masuk ke kemah yang telah disediakan oleh maktab. Kemudian bermalam di Arafah, setelah itu bersiap-siap menuju Muzdalifah. *Di Muzdalifah*, jamaah haji hanya bermalam (mabit) tetapi tidak menetap, dan mengambil beberapa batu/kerikil untuk melontar jumrah di Mina. Penempatan jamaah haji di areal mabit Muzdalifah terbagi 2 (dua), yaitu sebagian besar berada dalam areal

---

<sup>15</sup> Tempat seseorang harus mulai menggunakan pakaian ihram untuk melintas batas tanah suci, dan berniat hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya.

<sup>16</sup> Memberangkatkan jamaah calon haji Indonesia yang sakit dan tidak mampu berjalan menuju Arafah untuk wukuf dan biasanya menggunakan ambulans atau mobil dan tidak menginap.

terbuka yang dipagar besi dan sebagian lagi di kemah Muzdalifah di luar pagar. Setelah lewat tengah malam jamaah haji berangkat menuju Mina.

*Di Mina*, jamaah haji menetap selama 4 hari bagi jamaah yang ibadah dengan nafar tsani dan 3 hari bagi nafar awal. Mina didatangi oleh jamaah haji pada tanggal 8 Dzulhijah atau sehari sebelum wukuf di Arafah, jamaah haji tinggal di sini sehari semalam. Setelah selesai wukuf kemudian jamaah kembali lagi menempati kemah sesuai maktab untuk melontar jamrah aqabah<sup>17</sup> dengan memotong rambut (tahallul awal) pada hari nahr (10 dzulhijah). Ada beberapa rombongan yang berangkat menuju Masjidil Haram di Makkah untuk melaksanakan thawaf ifadhah dan sa'i. Dengan selesainya thawaf ifadhah maka gugurlah seluruh larangan selama berpakaian ihram (tahallul tsani). Kemudian kembali lagi ke Mina, untuk melakukan lontar jumrah ula, wustha dan aqabah dengan nafar awal atau nafar tsani<sup>18</sup>. Fasilitas pelayanan angkutan darat jamaah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus yang disebut dengan satuan operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina (Satop Armina) dengan sistem tarauddi (yaitu sistem angkutan shuttle, dimana armada angkutan secara berkelompok menjemput jamaah dari perkemahan sampai ke tempat tujuan dan berputar kembali menjemput jamaah yang lain). Satop Armina dibagi menjadi 3 (tiga) satuan tugas (satgas) sesuai dengan tempat kerjanya, yaitu satgas Arafah, satgas Muzdalifah dan satgas Mina. Pada masing-masing satgas mempunyai pos pelayanan yang terdiri dari pos komando, pos pelayanan dan pos pembantu pada masing-masing kemah (maktab). Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama yaitu memberikan pelayanan umum, kesehatan dan ibadah. Sedangkan pemondokan jamaah haji diurus oleh maktab, adapun pelayanan yang diberikan maktab antara lain: penempatan jamaah haji di tenda, pengurusan jamaah haji yang tersesat jalan, sakit dan wafat serta bimbingan ibadah dan pengurusan pemberangkatan ke Makkah.

---

<sup>17</sup>Aqabah merupakan salah satu tempat pelemparan jumrah. Sekali melontar jumrah menggunakan 7 batu kerikil (tempat pelemparan jumrah lainnya adalah : Ula dan Wustha).

<sup>18</sup>Disebut Nafar Tsani atau Nafar Akhir karena jamaah melontar jumrah selama 4 hari (tgl : 10,11,12 dan 13 Dzulhijah). Sedangkan pada Nafar Awal jamaah meninggalkan Mina pada tgl 12 Dzulhijah.

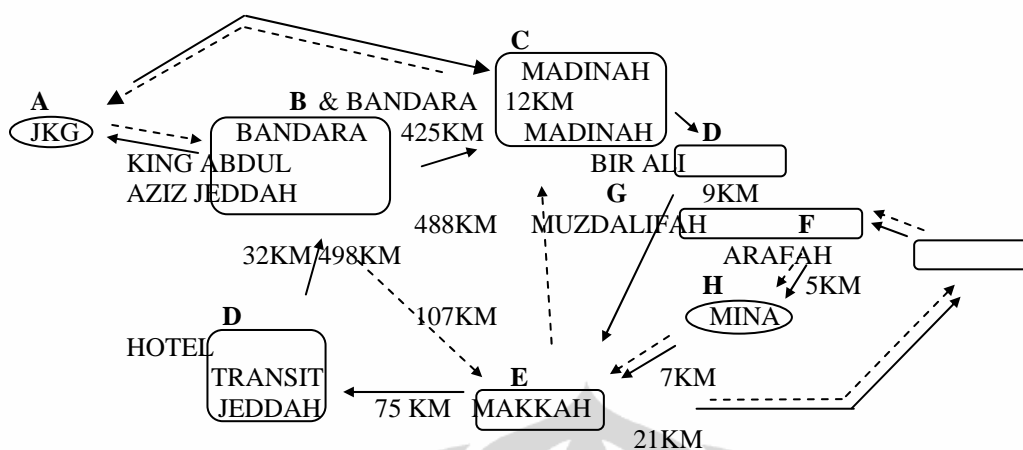
*Di Makkah setelah kembali dari Mina*, jamaah haji menetap selama  $\pm$  2 s.d 3 hari. Pada tahap ini jamaah melakukan thawaf ifadah dan sa'i bagi yang belum, serta thawaf wada (thawaf perpisahan dengan ka'bah Al Musyarrafah, masjidil haram dan sekaligus dengan tanah haram Makkah). Setelah itu jamaah meninggalkan Makkah menuju hotel transit di Jeddah. *Di hotel transit Jeddah*, jamaah haji istirahat selama 1 hari. Akomodasi yang disediakan bagi jamaah haji di Jeddah adalah gedung bertingkat dilengkapi lift dan AC, diberikan konsumsi 3 kali, penyediaan air dan penyediaan tenaga angkut untuk mengangkut barang. Dari hotel transit jamaah berangkat ke Bandara Udara King Abdul Aziz. Ketua kloter dibantu ketua regu/rombongan membagikan paspor dan boarding pass kepada jamaah, 8 jam sebelum berangkat ke bandara. pemeriksaan paspor dan barang bawaan oleh petugas di bandara, kembali menuju ke Tanah Air<sup>19</sup>.

Pada perjalanan jamaah haji gelombang kedua, setelah tiba di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah, jamaah membaca niat haji<sup>20</sup> dan langsung menuju Makkah untuk melaksanakan rukun haji. Ada pula yang mengenakan pakaian ihram bagian bawah (bagi laki-laki) di bandara Soekarno Hatta sejam sebelum boarding, dan mengenakan pakaian ihram bagian atas dua jam sebelum mendarat kemudian 20-an menit sebelum mendarat, ketua kloter akan mengumumkan bahwa pesawat akan melintasi miqat Qarnul Manazil, dan semua jamaah disarankan segera berniat umrah. Proses ibadah haji di Makkah sampai dengan di Mina sama dengan jamaah haji gelombang pertama. Kemudian dari Mina jamaah haji berangkat menuju pemondokan di Madinah dan melaksanakan ibadah Arbain di masjid Nabawi. Setelah selesai melaksanakan ibadah di Madinah, jamaah berangkat menuju bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang terletak di kota Madinah. Tiga jam sebelum jamaah haji dipulangkan ketua kloter dibantu ketua regu/rombongan membagikan paspor dan boarding pass kepada jamaah.

---

<sup>19</sup>Tata Urutan Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Haji, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

<sup>20</sup>Sesuai dengan keputusan komisi fatwa MUI tgl 28 Maret 1980 dan 19 Sept 1981



**Keterangan:**

- > Perjalanan jamaah umrah/haji gelombang I  
 <-----< Perjalanan jamaah umrah/haji gelombang II

**Gambar 3.1 Proses Pelaksanaan Ibadah Haji**

Sumber: Buku Tuntunan Praktis Perjalanan Haji, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Maret 2010 (hal. 180).

#### 6. Tahap Pemulangan

Setibanya di King Abdul Aziz International Airport Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah jamaah haji istirahat ditempat yang telah disediakan. Tiga jam sebelum pesawat berangkat jamaah haji akan dipersilahkan masuk ke dalam gate/pintu yang ditentukan dengan menyiapkan paspor untuk pemeriksaan oleh petugas imigrasi Arab Saudi dan pemeriksaan boarding pass oleh petugas penerbangan. Setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dilakukan pemeriksaan kembali paspor haji oleh petugas imigrasi dan buku kesehatan oleh petugas kesehatan, kemudian pada buku kesehatan haji diberi stempel kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji (K3JH). Selesai semua pemeriksaan di bandara Soekarno Hatta, jamaah haji menaiki bus yang sudah disiapkan menuju ke asrama haji debarkasi atau ke rumah masing-masing. Kemudian pihak penerbangan membagikan air zamzam sebanyak 5 liter tiap orang.

Bagi jamaah haji yang transit di asrama haji, barang bawaan/kopernya diambil di asrama haji. Jamaah haji yang dijemput di asrama haji dapat langsung pulang ke rumah masing-masing, sedangkan jamaah transit dapat menginap di asrama haji debarkasi. Semua keperluan jamaah haji transit

diurus oleh petugas daerah yang bersangkutan dengan biaya konsumsi selama transit ditanggung oleh jamaah haji. Sesampainya di kampung halaman (di rumah masing-masing), bila ada jamaah haji yang sakit dalam waktu 14 hari sejak kedatangan dapat berobat di puskesmas atau rumah sakit setempat tanpa dikenakan biaya. Bila dalam waktu 14 hari jamaah haji tidak sakit, maka K3JH dikirim ke puskesmas/dinas kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

### **3.2. Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M**

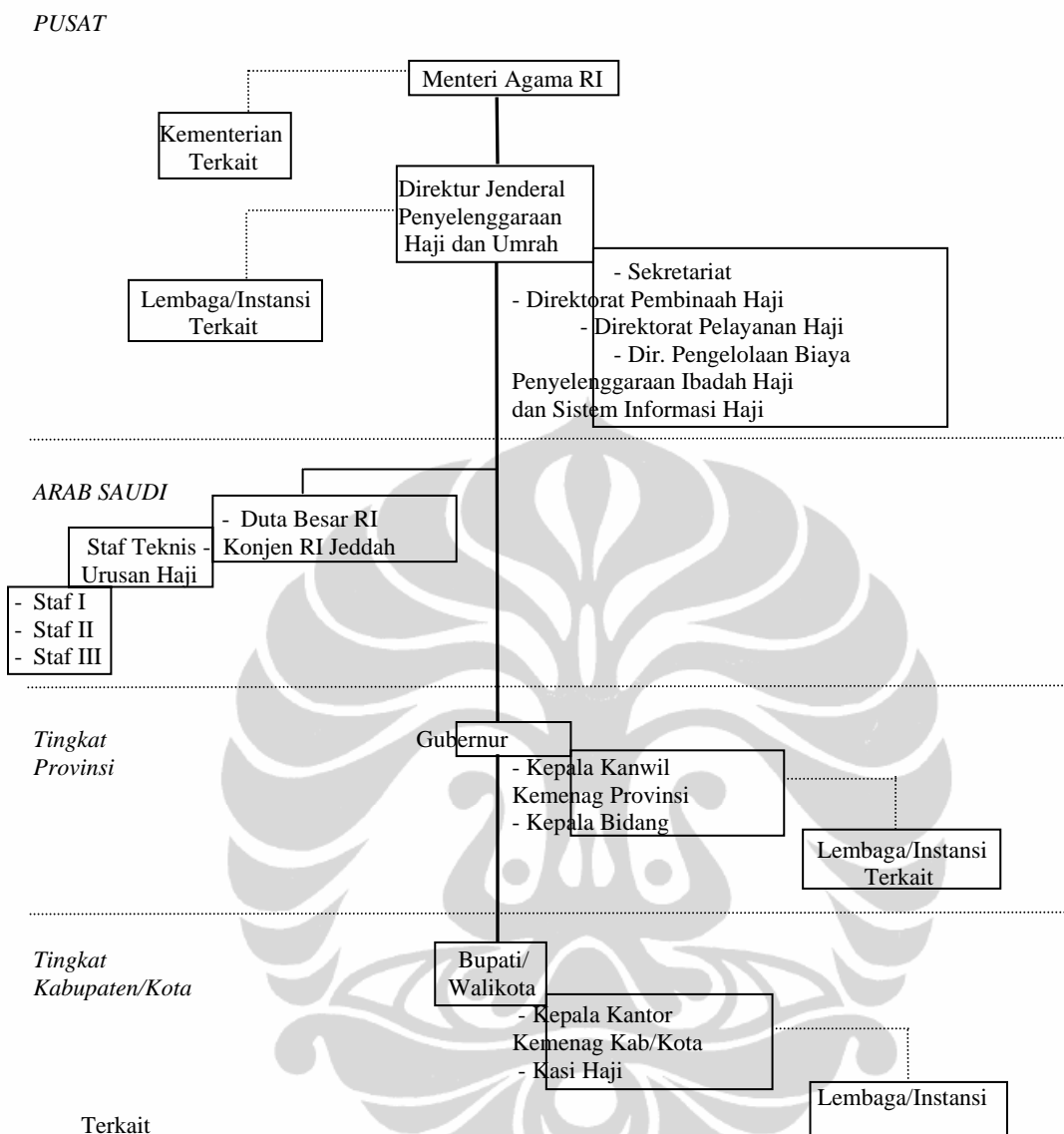
Organisasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi organisasi sistem permanen dan organisasi sistem non-permanen (kepanitiaan). Organisasi sistem permanen yaitu susunan organisasi penyelenggaraan haji yang melekat pada struktur organisasi kementerian/lembaga. Unit organisasi ini terdiri atas Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Perhubungan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menteri Agama sebagai koordinator di tingkat pusat, dibantu oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (ditjen PHU). Ditjen PHU mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan menteri agama. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri dari sekretariat direktorat jenderal, direktorat pembinaan haji, direktorat pelayanan haji, direktorat pengelolaan BPIH dan sistem informasi haji.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 2006, tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, sekretariat ditjen PHU terdiri dari bagian perencanaan dan informasi, bagian keuangan, bagian ortala & kepegawaian, dan bagian umum. Direktorat pembinaan haji terdiri dari subdit penyuluhan haji, subdit bimbingan jamaah, subdit bimbingan petugas, dan subdit bina haji khusus dan umrah. Direktorat pelayanan haji terdiri dari subdit pendaftaran jamaah, subdit penyiapan dokumen haji, subdit akomodasi, dan subdit perjalanan. Sedangkan direktorat pengelolaan BPIH dan sistem informasi haji

terdiri dari subdit BPIH, subdit dana non BPIH, subdit pemantauan dan evaluasi, dan subdit pengembangan sistem informasi haji.

2. Gubernur sebagai koordinator di tingkat provinsi, dibantu oleh kepala kantor wilayah (kakanwil) Kementerian Agama provinsi selaku kepala staf penyelenggaraan haji provinsi. Kakanwil bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat provinsi, dibawah koordinasi gubernur dan dibantu oleh kepala bidang urusan haji selaku sekretaris penyelenggaraan ibadah haji tingkat provinsi. Struktur organisasi kantor kementerian agama provinsi terbagi dalam sepuluh tipologi, tergantung dari dominasi agama yang ada di provinsi tersebut.
3. Bupati/walikota sebagai koordinator di tingkat kabupaten/kota, dibantu oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota selaku kepala staf penyelenggaraan haji kabupaten/kota. Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dibantu oleh kepala seksi penyelenggara haji dan umrah selaku sekretaris penyelenggaraan ibadah haji dan bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat kabupaten/kota. Struktur organisasi kantor kementerian agama kabupaten/kota terbagi dalam 45 tipologi, tergantung dari dominasi agama yang ada di kabupaten/kota tersebut.
4. Duta besar RI di Arab Saudi sebagai koordinator dan konsulat jenderal RI di Jeddah sebagai koordinator harian, dibantu oleh staf teknis urusan haji (STUH) selaku kepala staf penyelenggaraan haji. Tugas dan fungsi STUH dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji meliputi penyediaan rumah/pemondokan, katering, transportasi, serta penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi jamaah/petugas haji di Arab Saudi.



**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Sumber: Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M (hal. 7).

Sedangkan organisasi sistem non-permanen dalam penyelenggaraan ibadah haji terdiri atas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di tingkat pusat, embarkasi, dan Arab Saudi dimana susunan personilnya melibatkan instansi/unit terkait pada saat operasional haji (masa pemberangkatan, operasional di Arab Saudi, dan masa pemulangan). Berdasarkan undang-undang, pada saat operasional haji menteri agama dapat mengangkat/membentuk Panitia penyelenggaraan ibadah haji dengan susunan sebagai berikut:



#### 1. PPIH Pusat.

PPIH pusat dipimpin oleh salah seorang pejabat eselon II pada ditjen PHU. Secara umum PPIH pusat mempunyai tugas mengarahkan, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan tugas-tugas operasional penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, termasuk memantau keberangkatan dan kepulangan jamaah di seluruh embarkasi, serta memberikan penerangan/penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan media center haji. PPIH Pusat tahun 1431H/2010M diangkat oleh menteri agama Republik Indonesia sebelum pelaksanaan ibadah haji dimulai.

#### 2. PPIH embarkasi.

PPIH embarkasi dipimpin oleh kakanwil Kementerian Agama provinsi yang mewilayahi embarkasi setempat. Susunan kepanitiaan PPIH Embarkasi disesuaikan dengan kondisi riil masing-masing embarkasi dengan mengacu kepada struktur organisasi PPIH pusat. PPIH embarkasi pada dasarnya bertugas melayani pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji di embarkasi, memberikan pelayanan penerimaan jamaah transit, akomodasi, dokumen, penerbangan, imigrasi, bea dan cukai, kesehatan, perbekalan, keamanan dan perlindungan kepada jamaah haji di embarkasi. PPIH embarkasi tahun 1431H/2010M dibentuk oleh dirjen PHU atas usul kakanwil Kementerian Agama provinsi embarkasi setempat.

#### 3. PPIH provinsi dipimpin oleh kakanwil Kementerian Agama provinsi dan dibantu oleh kepala bidang penyelenggara ibadah haji masing-masing provinsi.

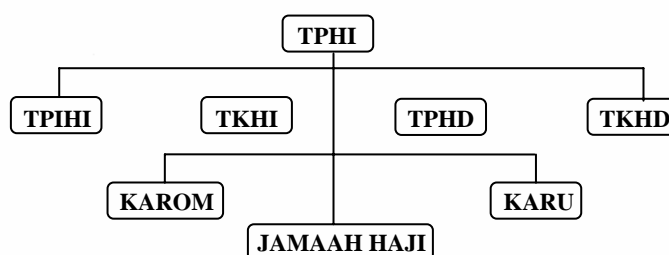
#### 4. PPIH Arab Saudi.

PPIH Arab Saudi dipimpin oleh staf teknis urusan haji, dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut: daerah kerja Jeddah membawahi 2 sektor, daerah kerja Makkah membawahi 14 sektor dan daerah kerja Madinah membawahi 8 sektor. PPIH Arab Saudi secara umum mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji.

Untuk melaksanakan tugasnya PPIH Arab Saudi menyelenggarakan fungsi pelayanan umum, pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan perumahan dan katering. PPIH Arab Saudi tahun 1431H/2010M dibentuk oleh Dirjen PHU sebelum pelaksanaan ibadah haji dimulai.

5. Petugas kloter yang menyertai jamaah sejak ditanah air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Petugas kloter terdiri dari tim pemandu haji Indonesia (TPHI) 1 orang, tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI) 1 orang, dan tim kesehatan haji Indonesia (TKHI) terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang tenaga perawat. Petugas kloter dibentuk oleh kakanwil provinsi masing-masing atas usulan dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Selain TPIHI, TPHI dan TKHI terdapat petugas kloter daerah yang dibentuk dan didanai oleh pemerintah daerah masing-masing yaitu tim pemandu haji daerah (TPHD) dan tim kesehatan haji daerah (TKHD). Kuota dari TPHD dan TKHD mengurangi kuota jamaah haji provinsi masing-masing.

Sedangkan kepala regu dipilih dari jamaah haji dari masing-masing kelompok terbang, dengan perhitungan 1 kepala regu memimpin 10 orang jamaah haji (1 regu terdiri dari 11 orang). Begitu pula dengan kepala rombongan, dipilih dari kelompok regu yang ada dalam satu kelompok terbang, dengan perhitungan 1 kepala rombongan memimpin 4 regu (1 rombongan terdiri dari 45 orang).



**Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kloter**

Sumber: Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M (hal. 13).

### 3.3. Rencana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perkembangan BPIH

Rencana BPIH yang diajukan oleh Kementerian Agama, kemudian mendapat persetujuan DPR dan disahkan oleh presiden, diumumkan sebagai biaya hajiper jamaah. Semua dana BPIH pada rekening menteri agama (cq. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah), baik yang berasal dari setoran awal maupun pelunasan dikelola oleh Direktorat Pengelolaan BPIH Kementerian Agama sejak tahun 2006. Sebelum pelaksanaan haji dimulai, dana tersebut didebet sebagai uang muka beberapa pengeluaran seperti uang muka katering, pemondokan, sewa kantor, sewa wisma, dan uang muka kerja masing-masing embarkasi. Setelah itu, baru kemudian dilakukan pelunasan terhadap transaksi dari semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Semua pendapatan dan biaya penyelenggaraan haji yang telah dikeluarkan dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan keuangan biaya penyelenggaraan ibadah haji maksimal tiga bulan setelah berakhirnya pelaksanaan ibadah haji. Berikut perhitungan biaya langsung dan tidak langsung yang mendapatkan persetujuan DPR pada tanggal 21 Juli 2010:

#### 1. Biaya Langsung

Pada perhitungan biaya langsung, semua biaya ditanggung oleh jamaah haji, dimana besarnya biaya disetiap embarkasi berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena biaya penerbangan yang dikenakan pada setiap embarkasi berbeda. Berikut ini rincian BPIH tahun 2010 pada embarkasi Jakarta:

**Tabel 3.1 Biaya Langsung**

<b>A</b>	<b>Biaya Penerbangan Jamaah Haji</b>	<b>USD 1.755</b>
1	Tiket Indonesia-Arab Saudi PP	1.691
2	<i>Surcharge landing</i> Madinah	50
3	<i>Airport tax</i> di Arab Saudi	14
<b>B</b>	<b>General Service Fee KSA</b>	<b>USD 277</b>
1	Pelayanan Muasassah Thawwafah, Al Adilla dan Maktab Wukala Al Muwajad	SAR 294
2	Perkemahan di Armina	SAR 300
3	Angkutan darat (Naqobah) Jeddah, Makkah, Madinah dan Armina	SAR 435
<b>C</b>	<b>Biaya Akomodasi di Arab Saudi</b>	<b>USD 927</b>
1	Sewa pemondokan di Makkah	SAR 2.850
2	Sewa pemondokan di Madinah	SAR 600
<b>D</b>	<b>Living Cost (SAR.1.500,-)</b>	<b>USD 405</b>
<b>TOTAL BPIH</b>		<b>USD 3.364</b>

Sumber: Peraturan Presiden No.51 Tahun 2010 tentang BPIH.

#### A. Biaya penerbangan terdiri dari

- 1) Harga tiket Indonesia-Arab Saudi PP dibayarkan kepada PT. Garuda Indonesia dan apabila ada kerugian/keuntungan pada saat penerbangan haji merupakan tanggung jawab maskapai<sup>21</sup>. Biaya penerbangan tersebut merupakan harga sewa carter penerbangan<sup>22</sup>, dimana PT. Garuda Indonesia juga menyewa pesawat dari tujuh lessor (sebanyak 14 pesawat dari total 15 pesawat yang digunakan untuk melayani penerbangan haji). Tetapi biaya penerbangan tersebut sudah termasuk biaya transportasi darat dari embarkasi/debarkasi ke bandara keberangkatan/kepulungan masing-masing<sup>23</sup>.
- 2) *Surcharge landing* Madinah
- 3) Biaya *airport tax* di Arab Saudi. Sedangkan biaya *airport tax* dalam negeri di masukkan ke dalam biaya tidak langsung.

#### B. *General Service Fee the Kingdom of Saudi Arabia* yang terdiri dari

- 1) Pelayanan Muasassah Thawwafah, Muasassah Al Adilla dan Maktab Wukala Al Muwajad
- 2) Perkemahan di Armina
- 3) Angkutan darat (Naqobah) Jeddah, Makkah, Madinah dan Armina. Biaya ini merupakan harga kesepakatan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dengan pendekatan G to G<sup>24</sup> dan sudah menerapkan sistem *reward* dan *punishment* atas pelayanannya. Sebagai contoh perusahaan catering Al Fatani di Madinah diberikan sanksi pemotongan 25 persen pesanan makanan jamaah karena sudah dua kali menyajikan makanan basi, sebaliknya perusahaan catering Andaluz

<sup>21</sup>Selisih Biaya Penerbangan Ibadah Haji Bukan Hak Pemerintah, diunduh dari <http://news.Detik.com/read/2009/03/19/224022/1102216/10/selisih-biaya-penerbangan-ibadah-haji-bukan-hak-pemerintah>, diakses tanggal 29 Maret 2012.

<sup>22</sup>Biaya Angkutan Haji Diperkirakan Sulit Turun, diunduh dari, <http://doniismanto.com/2011/04/29/290411-biaya-angkutan-haji-diperkirakan-sulit-turun/>, diakses tanggal 29 Maret 2012.

<sup>23</sup>Catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji audited tahun 1431H/2010M hal.12.

<sup>24</sup>Laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Rancangan Perubahan Undang- Undang No.17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji Hal.33.

menggantikan pesanan dari Al Fatani karena dinilai memiliki kinerja yang baik dan belum pernah tersandung masalah<sup>25</sup>.

### C. Biaya pelayanan di Arab Saudi, biaya ini terdiri dari

- 1) Biaya pemondokkan di Makkah, bilamana terjadi harga kurang dari harga yang ditentukan, maka pemerintah akan mengembalikan ke jamaah. Tetapi jika harga pemondokan melebihi dari harga yang ditentukan, maka pemerintah juga yang akan menutupi kelebihannya dengan menggunakan dana hasil optimalisasi setoran awal haji.
- 2) Biaya pemondokan Madinah, bilamana jamaah haji yang ditempatkan di wilayah non Markaziyah (lebih dari 600 meter dari Masjid Nabawi - dihitung dari pelataran masjid) atau harga pemondokan kurang dari SAR.500,- maka jamaah diberikan uang pengembalian pemondokan sebesar SAR.100,-<sup>26</sup>.

D. *Living cost*, perlakuan pemerintah terhadap biaya ini berbeda dari biaya yang lain, dimana komponen *living cost* yang ditanggung oleh jamaah haji dikembalikan lagi kepada jamaah tanpa membedakan pelayanan yang diterima.

Total biaya yang ditanggung oleh jamaah haji gelombang I (landing di Madinah, dikenakan *surcharge landing*) adalah USD.3.364,- setara dengan Rp.30.400.468,- (dengan asumsi 1 USD = Rp.9.037,-) dan gelombang II sebesar USD.3.314,- setara dengan Rp.29.948.618,-.

### 2. Biaya Tidak Langsung

Pada biaya tidak langsung, biaya dibebani pada empat sumber dana<sup>27</sup>, yaitu dana hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian Agama, APBN Kementerian Kesehatan, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

<sup>25</sup>Katering Jamaah Haji Basi Lagi, diunduh dari <http://www.haluankepri.com/news/nasional/6165-katering-jamaah-haji-basi-lagi.html>, di akses tanggal 28 Maret 2012.

<sup>26</sup> Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1431H/2010M, hal.40 dan catatan atas laporan keuangan (CALK) laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431H/2010M audited hal.13

<sup>27</sup>Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1431H/2010M, hal.57.

A. Komponen biaya tidak langsung yang didanai oleh hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji:

- 1) Biaya penerbangan petugas kloter dan non kloter
- 2) *General service fee King of Saudi Arabia* (KSA) untuk petugas
  - a. Pelayanan Muasassah Thawwafah, Muasassah & Maktab petugas kloter
  - b. Biaya perkemahan Armina petugas kloter
  - c. Angkutan darat/transportasi
- 3) Biaya operasional dan petugas kloter, non kloter dan jamaah di Arab Saudi
  - a. Akomodasi
  - b. Sewa kantor, gudang dan tempat pelayanan jamaah haji
  - c. Konsumsi
  - d. Transportasi darat (angkutan jamaah dari pemondokan ke Masjidil Haram)
  - e. Pelayanan bongkar muat dan angkutan barang (bandara, hotel transit, pemondokan Madinah dan Makkah)
  - f. Administrasi dan perlengkapan operasional kantor
  - g. Pemeliharaan dan langganan daya jasa
  - h. Media center haji
  - i. Biaya penunjang operasional
- 4) Biaya operasional di dalam negeri
  - a. Konsumsi petugas kloter dan jamaah
  - b. Biaya operasional asrama haji embarkasi
  - c. Peningkatan fasilitas dan rehabilitasi asrama haji
  - d. Passenger service charge bandara
  - e. Paspor jamaah haji dan dokumen administrasi penyelenggaraan ibadah haji (DAPIH) jamaah haji dan petugas
  - f. Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT)
  - g. Identitas jamaah dan petugas haji
  - h. Qur'ah pemondokan di Makkah
  - i. Jasa konsultan manajemen dan lawyer
  - j. Pembinaan dan bimbingan jamaah dan petugas haji
  - k. Image building
  - l. Pengelolaan dan pelaporan keuangan BPIH
  - m. Penyusunan dan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan
  - n. Penyiapan transportasi udara
  - o. Rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan haji
  - p. Media center dalam negeri
  - q. Penyusunan dan penggandaan buku dan laporan
  - r. Operasional penyelenggaraan haji
  - s. Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji

5) *Safeguarding* dan *contingency* (diperuntukan sebagai cadangan operasional apabila terjadi perubahan alokasi pembiayaan yang tidak dapat dihindari)

6) Komponen Kementerian Kesehatan

Total biaya tidak langsung hasil pembahasan dengan DPR pada tanggal 21 Juli 2010 adalah sebesar Rp.1.051.151.691.454,-Total rencana biaya tidak langsung diatas kemudian diubah oleh Keputusan Dirjen PHU Nomor D/577 tahun 2010 tentang rencana kerja anggaran BPIH tahun 1431H/2010M tanggal 20 September 2010, terdiri dari:

**Tabel 3.2 Biaya Tidak Langsung**

No	Keterangan biaya	Jumlah
1	Penerbangan petugas kloter dan non kloter (Kementerian Agama)	USD. 1.439.818
2	<i>General service fee</i> , biaya pemondokan petugas kloter Kementerian Agama dan biaya operasional petugas di Arab Saudi	SAR. 40.565.741
3	<i>General service fee</i> dan biaya pemondokan petugas kloter Kementerian Kesehatan dan biaya operasional petugas di Arab Saudi	SAR. 7.629.287
4	Biaya operasional dalam negeri (Direktorat Pelayanan Haji)	Rp. 109.892.366.918
5	Biaya operasional dalam negeri (Direktorat Pembinaan Haji)	Rp. 19.096.993.843
6	Biaya operasional dalam negeri (Direktorat Pengelolaan BPIH dan SIH)	Rp. 813.977.390.200
7	Biaya operasional dalam negeri (Sekretariat Ditjen PHU)	Rp. 17.209.500.000

Total **rencana biaya tidak langsung** dari **dana setoran awal jamaah haji** berdasarkan Keputusan Dirjen PHU No.D/577 tahun 2010 tanggal 20 September 2010 sebesar **Rp.1.594.054.128.361,-**. Seluruh biaya, baik biaya langsung maupun tidak langsung berasal dari pendapatan dibawah ini, yaitu:

**Tabel 3.3 Pendapatan Penyelenggaraan Ibadah Haji**

No	Sumber Pendapatan	Jumlah (Rp.)
1	Setoran BPIH Biasa	5.924.516.456.189
2	Setoran BPIH Khusus	73.055.820.264
3	Pendapatan Jasa Giro	
	USD	2.419.162.296
	IDR	2.251.731.635
4	Pendapatan - Pengelolaan Setoran Awal	1.045.948.858.815
5	Pengembalian Administrasi Setoran Lunas	28.308.637
6	Pendapatan Surplus Asuransi	822.530.224
7	Selisih Kurs	12.509.602.778
8	Pendapatan lain-lain Arab Saudi (dari Pengembalian Sewa Rumah dan Naqobah apabila terdapat jamaah yang meninggal)	133.210.861
9	Sisa Saldo Awal Kas & Bank Kanwil	1.212.486.267
10	Pendapatan lain - lain Pusat	16.534.881.722
11	Pendapatan yang Belum Diakui - Bunga Deposito	38.444.184.014
12	Pendapatan yang Belum Diakui - SBSN (SDHI)	43.672.335.158
<b>Jumlah</b>		<b>7.161.549.568.860</b>

Sumber: Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M (*audited*).

Bilamana terjadi selisih lebih antara pendapatan dan beban penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan maka kelebihan tersebut dipindahkan ke rekening dana abadi umat (DAU) sesuai dengan bab I, pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Selisih lebih tersebut diatas merupakan hasil efisiensi BPIH tahun berjalan.

Sedangkan biaya tidak langsung yang didanai oleh APBN dan APBD, adalah sebagai berikut:

1. Komponen biaya tidak langsung yang didanai APBN Kementerian Agama<sup>28</sup>:
  - A. Perjalanan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi, yang terdiri dari: uang harian amirull hajj, pengendali mutu, tim advance, petugas tata usaha haji (TUH) Jeddah, temus TUH Jeddah, petugas dan temus daker (Jeddah, Makkah, dan Madinah).
  - B. Pengadaan atribut petugas haji PPIH Arab Saudi, yang terdiri dari: pengadaan pakaian seragam, jaket, rompi, koper dan jas (khusus amirull hajj dan pengendali mutu).
  - C. Jasa konsultan aplikasi qur'ah perumahan haji.
  - D. Jasa konsultan aktuarial asuransi jiwa sebesar Jasa konsultan hukum kontrak penerbangan sebesar Orientasi tenaga musiman/temus di Arab Saudi sebesar Perjalanan tim pengendalian petugas PPIH Arab Saudi.
  - E. Pemeriksaan kesiapan pemondokan dan katering jamaah haji di Arab Saudi.
  - F. Perjalanan luar negeri komisi pengawasan haji Indonesia.
  - G. Penyuluhan/penyebaran informasi melalui media TV (talk show interaktif), melalui program acara “informasi haji dan umrah”, “Multazam” dan “Mahrom”.
  - H. Penyuluhan/penyebaran informasi melalui media radio, melalui program siaran “panggilan ka'bah” dan “Mabrur”.
  - I. Produksi film dokumenter perhajian.
  - J. Poster pendaftaran haji.

<sup>28</sup> Sumber: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-KL) Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama.



- K. Buku pedoman tugas karu dan karom.
- L. Buku modul I (kebijakan penyelenggaraan haji), modul II (uraian tugas petugas kloter), modul III (uraian tugas petugas PPIH Arab Saudi), modul IV (uraian tugas petugas kesehatan), modul V (penyelesaian kasus), VI (manasik haji bagi petugas).
- M. Buku laporan pelaksanaan tugas (TPHI dan TPIHI) dan Buku pencatatan dan pelaporan TPHI, TPIHI dan PPIH.
- N. Blanko surat pendaftaran pergi haji (SPPH).

Total **biaya tidak langsung** yang didanai oleh **APBN Kementerian Agama** adalah **Rp.69.610.210.000,-**.

APBN Kementerian Agama satuan kerja (satker) haji, terbagi menjadi dua, yaitu Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Atase Haji pada kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) Jeddah. Anggaran Atase Haji pada KBRI Jeddah terpisah dari Direktorat PHU, karena pada tahun 2010 satker Atase Haji merupakan salah satu satker yang dibawah oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Adapun APBN Direktorat PHU, Kementerian Agama pada tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.4 APBN Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	16.513.574.000,-
2	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	145.800.000.000,-
3	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	40.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>162.353.574.000,-</b>

Sedangkan APBN Atase Haji pada kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Jeddah, Kementerian Agama pada tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.5 APBN Atase Haji Jeddah**

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	1.200.000.000,-
2	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1.800.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>3.000.000.000,-</b>

Tetapi APBN satker Atase Haji pada KBRI Jeddah tersebut diatas, tidak termasuk belanja pegawai Atase Haji, karena belanja pegawainya sudah diperhitungkan pada APBN Kementerian Luar Negeri.

2. Komponen biaya tidak langsung yang didanai APBN Kementerian Kesehatan<sup>29</sup>:
- A. Perjalanan TKHI (kloter), yang terdiri dari: uang harian, transport Jakarta-Jeddah PP, *airport tax* dalam negeri dan Arab Saudi dan *surcharge landing* Madinah.
  - B. Perjalanan PPIH (non kloter), yang terdiri dari: Uang harian (Makkah, Madinah dan Jeddah), transport Jakarta-Jeddah PP, *airport tax* dalam negeri dan Arab Saudi.
  - C. Perjalanan tenaga penghubung rumah sakit Arab Saudi (RSAS) / temus, yang terdiri dari uang harian Makkah, Madinah dan Jeddah.
  - D. Perjalanan pengemudi ambulans, yang terdiri dari uang harian Makkah, Madinah dan Jeddah.
  - E. Perjalanan petugas kebersihan, yang terdiri dari uang harian Makkah, Madinah dan Jeddah.
  - F. Perjalanan petugas pengawasan dan pengendalian.
  - G. Pengadaan buku kesehatan jamaah haji, buku panduan berhaji sehat, buku panduan prosedur operasional kesehatan haji, formulir pencatatan dan pelaporan, buku laporan TKHI kloter, buku saku kesehatan kloter, buku profil kesehatan haji Indonesia, manual surveilans kesehatan haji, buku pedoman pencatatan dan pelaporan, buku pedoman pemeriksaan kesehatan, buku pedoman pembinaan kesehatan jamaah haji dan biaya pengiriman buku.
  - H. Pakaian seragam operasional kesehatan haji embarkasi – debarkasi.
  - I. Sewa perkantoran administrasi pelayanan kesehatan dan sewa gudang obat di Jeddah.
  - J. Pelaksanaan operasional embarkasi - debarkasi haji.
  - K. Sewa kendaraan dan sarana komunikasi untuk operasional di Arab Saudi.
  - L. Pengembangan aplikasi sistem siskohatkes dan pengembangan jaringan internet di Arab Saudi.
  - M. Penyediaan vaksin dan perbekalan kesehatan haji dan biaya distribusi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Sumber: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-KL) Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan.

N. Pembinaan dan pengawasan kesehatan haji (terdiri dari 48 kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia).

O. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan haji.

Total **biaya tidak langsung** yang didanai oleh **APBN Kementerian Kesehatan** adalah **Rp.132.937.408.000,-**

APBN Kementerian Kesehatan satuan kerja Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 sebagai berikut:

**Tabel 3.6 APBN Pusat Kesehatan Haji**

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	119.419.350.000,-
2	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	44.100.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>163.519.350.000,-</b>

Tetapi APBN satker satuan kerja Pusat Kesehatan Haji tersebut diatas, tidak termasuk anggaran vaksin dan perbekalan kesehatan haji; dan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan haji. karena anggaran tersebut berada di Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sedangkan anggaran pembinaan dan pengawasan kesehatan haji berada pada 48 kantor kesehatan pelabuhan.

3. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang didanai APBD:

A. Pemda DKI Jakarta memberikan pelayanan tambahan berupa katering dan transportasi.

B. Pemda Aceh memberikan pelayanan tambahan berupa uang dari wakaf Aceh sebesar ±SAR.1.250,-.

C. Pemda Sumatera Selatan memberikan pelayanan tambahan berupa uang saku sebesar Rp.1.000.000,- per jamaah.

D. Pemda Sumatera Barat memberikan pelayanan tambahan berupa 1 kg rendang.

E. Pemda Banten memberikan pelayanan tambahan berupa uang saku sebesar SAR.100,-

<sup>30</sup>Sumber: RKA-KL Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2010.

F. Pemda Jawa Tengah memberikan pelayanan tambahan berupa penggantian kehilangan

Pelaksanaan tambahan pelayanan yang didanai oleh APBD harus dikoordinasikan dengan Kementerian Agama karena kondisi tersebut dapat menimbulkan kecemburuan bagi daerah tertentu terutama jika pelayanan tersebut diberikan di Arab Saudi<sup>31</sup>. Dana dari APBD ini sulit dihitung ke dalam nominal rupiah, karena didominasi pada fasilitas atau bantuan berupa pelayanan.

Adapun perkembangan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Perkembangan Biaya Ibadah Haji**

No	Tahun		ONH			Penyelenggara
	Masehi	Hijriah	Zona	Udara (Rp)	Udara (USD)	
1	1980	1400		1.577.000		Dir. Bimas Islam & Urhaj
2	1981	1401		1.943.000		sda
3	1982	1402		2.110.000		sda
4	1983	1403		2.320.700		sda
5	1984	1404		3.075.570		sda
6	1985	1405		3.128.500		sda
7	1986	1406		3.212.000		sda
8	1987	1407		3.212.000		sda
9	1988	1408		4.560.000		sda
10	1989	1409		5.150.000		sda
11	1990	1410		5.320.000		sda
12	1991	1411		6.000.000		sda
13	1992	1412		6.475.000		sda
14	1993	1413		6.700.000		sda
15	1994	1414		6.900.000		sda
16	1995	1415		7.070.000		sda
17	1996	1416		7.290.000		sda
18	1997	1417		7.551.000		sda
19	1998	1418		8.805.000		sda
20	1999	1419		27.373.000		sda
21	2000	1420		17.758.000		sda
22	2001	1421	II (pkt A)	22.000.000		sda
23	2002	1422	II	800.000	2.677,00	sda
24	2003	1423	II	1.000.000	2.677,00	sda
25	2004	1424	II	967.500	2.675,00	Dir. PHU
26	2005	1425	II	963.266	2.668,23	sda
27	2006	1426	II	722.327	2.732,44	sda
28	2006	1427	II	466.864	2.851,70	sda
29	2007	1428	II	400.100	2.925,90	sda
30	2008	1429	Jakarta	501.000	3.430,00	sda
31	2009	1430	Jakarta	100.000	3.444,00	sda
32	2010	1431	Jakarta		3.364,00	sda

Sumber: Data dan Profil Penyelenggaraan Haji, Direktorat Jenderal Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Tahun 2010

<sup>31</sup>Laporan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431H/2010M hal.60.



**Gambar 3.4 Siklus Perkembangan Biaya Ibadah Haji**

Pada masa penjajahan Belanda<sup>32</sup>, penyelenggaraan ibadah haji dilakukan untuk menarik hati rakyat sehingga mengesankan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak menghalangi umat Islam melaksanakan ibadah haji meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang sebenarnya kurang bermartabat, dimana pengangkutan haji dilakukan dengan kapal Kongsi Tiga yaitu kapal dagang yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dagangan, demikian juga tempat istirahat jamaah haji di kapal sama dengan kapal yang mengangkut ternak. Faktor yang dominan dalam masalah perjalanan haji pada masa penjajahan, adalah keamanan di perjalanan dan fasilitas angkutan jamaah haji yang masih sangat minim. Namun demikian hal tersebut tidak mengurangi animo dan keinginan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan jumlahnya mulai meningkat secara cepat sejak tahun 1910.

Pada tahun 1921 umat Islam mulai bergerak melakukan upaya perbaikan ibadah haji yang dipelopori KH Ahmad Dahlan, dengan menuntut Kongsi Tiga melakukan perbaikan pelayanan pengangkutan ibadah haji Indonesia. Pada tahun 1922 *volksraad* mengadakan perubahan pada *pelgrims ordannantie*, sedangkan *Hoofdbestuur* Muhammadiyah mengutus anggotanya, KHM Sudjak dan M Wirjopertomo ke Makkah untuk meninjau dan mempelajari masalah yang menyangkut perjalanan haji. Hasil dari upaya-upaya tersebut ditetapkan dalam Ordonansi Haji 1922 pemerintah Hindia Belanda. Ordonansi tersebut diantaranya mengatur mengenai angkutan jamaah haji, keamanan dan fasilitas

<sup>32</sup> Laporan Akhir Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia, tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Perancangan Perubahan Undang-Undang No.17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji.

angkutan selama dalam perjalanan. Karena kedua permasalahan, yaitu keamanan dan fasilitas angkutan pada dasarnya telah teratasi, maka dengan sendirinya jumlah jamaah haji Indonesia pada saat itu terus melonjak.

Pada tahun 1928, Muhammadiyah mengaktifkan penerangan tentang cita-cita perbaikan perjalanan haji, sedangkan Nahdatul Ulama melakukan pendekatan dengan pemerintah Saudi Arabia dengan mengirimkan utusan, KH Abdul Wahab Abdullah dan Syech Ahmad Chainaim Al Amir, menghadap Raja Saudi Arabia (Ibnu Saud) guna menyampaikan keinginan untuk memberikan kemudahan dan kepastian tarif haji (yang ketika itu banyak diselenggarakan oleh (syech-syech) melalui penetapan tarif oleh Baginda Raja. Pada tahun 1930 diselenggarakan Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau dimana dicetuskan pemikiran untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji Indonesia. Pada tahun 1932, berkat perjuangan anggota *Volskraad*, Wiwoho dan kawan-kawan, *Pelgrims Ordanantie* 1922 dengan *Staatblaad* 1932 Nomor 544 mendapat perubahan pada artikel 22 dengan tambahan artikel 22a yang memberikan dasar hukum atas pemberian ijin bagi organisasi *banafide* bangsa Indonesia (umat Islam Indonesia) untuk mengadakan pelayaran haji dan perdagangan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1948 mengirimkan misi haji ke Makkah yang beranggotakan: KRH Moh. Adnan, H Ismail Banda, H Saleh Suady, H Samsir Sultan Ameh, untuk menghadap Raja Saudi Arabia, Ibnu Saud dan pada tahun itu juga bendera Merah-Putih pertama kali dikibarkan di Arafah. Pada tahun 1949 jumlah jamaah haji yang diberangkatkan mencapai 9.892 orang dan pada tahun 1950 mencapai angka 10.000 orang ditambah 1.843 orang yang berangkat secara mandiri. Penyelenggaraan ibadah haji pada masa ini dilakukan oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang berada di setiap Keresidenan. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk lebih memberikan kekuatan legalitas penyelenggaraan haji, pada tanggal 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslim Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani kegiatan penyelenggaraan haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) yang diketuai oleh KHM Sudjak. Kedudukan PPHI lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya surat dari Kementerian Agama, ditandatangani oleh Menteri Agama RIS KH. Wahid Hasyim, Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950, kemudian disusul dengan surat edaran Menteri Agama RI di Yogyakarta Nomor A.III/I/648 tanggal 9 Februari 1950 yang menunjuk PPHI sebagai satu-satunya wadah yang sah, disamping pemerintah, untuk mengurus dan menyelenggarakan perjalanan haji Indonesia. Sejak saat inilah dengan

berdasarkan legalitas yang kuat, masalah haji ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.

Pada tahun 1952 dibentuk perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim yang disetujui oleh Menteri Agama sebagai satu-satunya perusahaan yang menjadi panitia haji. Besarnya jumlah masyarakat yang berminat untuk menunaikan ibadah haji, sementara fasilitas yang tersedia sangat terbatas, Menteri Agama memberlakukan sistem *quotum*, yaitu jumlah jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari masing-masing daerah dengan pertimbangan skala prioritas. Meski ketika itu kecenderungan terus meningkatnya biaya haji terjadi, namun tetap saja jumlah masyarakat yang melakukan ibadah haji tetap juga meningkat. Sebagai informasi, pada tahun 1949 biaya haji sebesar Rp.3.395,14 dan pada tahun 1950 dan 1951 meningkat dua kali lipat menjadi sebesar Rp 6.487,25.

Selanjutnya pada tahun 1962, dibentuklah sebuah panitia yang mandiri yaitu Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH). Panitia ini diberikan kewenangan penuh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dan pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua panitia atas persetujuan Menteri Agama, tanpa melibatkan Departemen Agama secara langsung. Pada tahun 1962, biaya haji sebesar Rp. 60.000 dan pada tahun 1963 biaya haji naik signifikan hampir 3,5 kali lipat menjadi Rp 200.000. Tidak lebih dari 2 tahun, pada tahun 1964 pemerintah mengambil alih kewenangan PPPH dengan membubarkannya, selanjutnya kewenangan tersebut diserahkan kembali kepada Dirjen Urusan Haji (DUHA).

Pada tahun 1964 biaya haji tidak lagi disubsidi pemerintah sehingga biayanya meningkat dua kali lipat dimana biaya dengan kapal laut ditetapkan sebesar Rp.400.000 sedangkan dengan pesawat udara ditentukan sebesar Rp 1.400.000. Pada tanggal 1 Desember 1964 dibentuk PT. Arafat, perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji melalui jalur laut. PT. Arafat dibentuk untuk menjawab kesulitan angkutan laut bagi jamaah haji, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Pada tahun 1965, akibat situasi kenegaraan yang tidak menentu, paska peristiwa G-30S-PKI, berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, mengakibatkan nilai rupiah terhadap mata uang asing mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga dengan Keputusan Menteri Urusan Haji Nomor 132/1965 tentang biaya perjalanan haji menggunakan kapal laut ditentukan

sebesar Rp.2.260.000. Kenaikan biaya haji yang sangat drastis ini tidak menurunkan minat calon haji, terbukti jumlah jamaah haji pada tahun 1965 mencapai 15.000 orang.

Pada tahun 1966 dilakukan perubahan struktur dan tata organisasi Menteri Urusan Haji dan tugas penyelenggaraan haji dialihkan di bawah wewenang Direktur Jenderal Urusan Haji, Departemen Agama, termasuk mengenai penetapan besaran biaya, sistem manajerial dan bentuk organisasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 Tahun 1966. Pada tahun tersebut, penetapan biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu haji dengan kapal laut, haji berdikari dan haji dengan pesawat udara. Dengan diberlakukannya kembali calon jamaah haji berdikari, maka sejak tahun 1967 penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan kepada Menteri Agama melalui Keputusan Presiden nomor 92 Tahun 1967 yang memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menentukan besarnya biaya haji.

Pada tahun 1968 biaya haji kembali ditetapkan oleh Dirjen Urusan Haji dengan Keputusan Nomor 111 Tahun 1968. Pada tahun 1968 calon jamaah haji mulai merasakan bahwa pelayanan perjalanan haji yang dilakukan oleh swasta biayanya lebih mahal dibandingkan dengan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Di samping itu banyak calon jamaah haji yang keberangkatannya diurus oleh biro-biro perjalanan haji swasta ketika itu, mengalami gagal berangkat menunaikan ibadah haji dikarenakan keterbatasan alat transportasi laut. Bercermin pada pengalaman buruk yang dialami oleh masyarakat calon jamaah haji, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 menetapkan kebijaksanaan bahwa seluruh pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diproses dan diurus oleh pemerintah, dan mengharapakan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji melalui prosedur resmi sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah ikut serta bertanggungjawab secara penuh dalam penyelenggaraan haji, baik dari penentuan biayanya sampai kepada pelaksanaan serta menjalin hubungan dengan Arab Saudi, yang mulai dilaksanakan sejak pada tahun 1970. Pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 penyelenggaraan ibadah haji tidak banyak mengalami perubahan kebijakan. Pada tahun 1974, sebuah peristiwa tragis terjadi yaitu pesawat udara *Martin Air* yang mengangkut jamaah haji Indonesia mengalami kecelakaan di Colombo, yang menelan korban sebanyak 1.126 orang.



Pada tahun 1976 dilakukan perubahan tata kerja dan struktur organisasi penyelenggaraan ibadah haji, dimana pelaksanaan haji dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), Departemen Agama. Dengan mempertimbangkan banyaknya permasalahan perjalanan haji dengan kapal laut yang tidak dapat diselesaikan, termasuk pailitnya PT Arafat, maka mulai tahun 1979 pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/OT.001/Phb-79 memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara. Pada awal penghapusan jamaah haji dengan kapal laut tersebut, kejadian tragis kembali terjadi, dimana pesawat udara yang mengangkut jamaah haji Indonesia mengalami kecelakaan untuk kedua kalinya di Colombo, yang disebabkan karena kesalahan navigasi pesawat *Loft Leider*. Jamaah haji yang meninggal ketika itu adalah sebanyak 960 orang.

Pada tahun 1981, keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan haji dihentikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden No.53 Tahun 1981 yang mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya oleh pemerintah. Namun demikian, sekitar tahun 1985, pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Mulai tahun 1991 pemerintah menyempurnakan peraturan tentang penyelenggaraan haji dengan peraturan nomor 245 tahun 1991, yang menuangkan penekanan pada pemberian sanksi yang jelas kepada swasta yang tidak melaksanakan tugas penyelenggaraan haji sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sentralisasi kebijakan dan monopoli sangat mewarnai penyelenggaraan haji pada fase ini, dimana manajemen penyelenggaraan haji diadopsi dengan basis sistem birokrasi tradisional sebagaimana dilakukan pada masa kolonial Belanda. Sorotan masyarakat terhadap inefisiensi dan biaya tinggi dalam segenap proses penyelenggaraan ibadah haji mewarnai perubahan kebijakan pada tahapan masa/fase ini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998, pemerintah menghapus monopoli angkutan haji dengan mengizinkan kepada perusahaan penerbangan asing, Saudi Arabian Airlines, untuk melaksanakan angkutan haji. Akibat kebijakan tersebut,

biaya angkutanpenerbangan dapat ditekan dari US\$ 1.750,- menjadi US\$1.200,-. Penurunan tarif ini jugadisebabkan karena penghapusan pengenaan royalti per jamaah haji sebesar US\$100,- per penumpang kepada pemerintah ArabSaudi (sebagai kompensasi atas diikutsertakannyaSaudi Arabian Airlines dalam pengangkutan jamaah haji Indonesia).

Setelah 54 tahun penyelenggaraan ibadah haji, baru pada tahun 1999 pertama kaliditerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajisebagai pijakan yang kuat dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Sejak keluarnya UU No. 17tahun 1999, penyelenggaraan haji Indonesia bersandar pada ketentuan perundang-undangan ini.Sedangkan pelaksanaan haji di Arab Saudi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dinegara tersebut sebagaimana tercantum dalam ‘Taklimatul Hajj’<sup>33</sup> yang mengatur berbagai aspekpelaksanaan haji, seperti pemondokan, transportasi, dan ketentuan teknis pelaksanaan ibadahseperti jadwal waktu pelemparan jumrah dan transportasi jamaah haji untuk Arafah-Muzdalifah-Mina dengan sistem *taraddudi*.

---

<sup>33</sup>Taklimatul Hajj merupakan perundingan yang membahas ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Biasanya diselenggarakan sebelum musim haji berlangsung yang di ikuti negara-negara muslim dunia di Arab Saudi.

## BAB 4

### ACTIVITY BASED COSTING DALAM PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

#### 4.1 Perhitungan Biaya dengan *Activity Based Costing*

Sistem ABC biaya penyelenggaraan haji dihitung berdasarkan konsumsi aktivitas. Dengan demikian semakin banyak konsumsi aktivitas yang terjadi dalam penyelenggaraan haji, semakin besar pula biaya yang dialokasikan ke dalam perhitungan biaya ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.

##### 1. Biaya langsung

Biaya langsung penyelenggaraan ibadah haji adalah biaya yang langsung ditelusuri dan besarnya cukup material dibandingkan dengan biaya penelusurannya. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung.

##### A. Biaya bahan langsung

Biaya bahan langsung adalah biaya pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh jamaah haji. Biaya ini terdiri dari biaya-biaya, sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Biaya Langsung**

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Formulir surat pendaftaran pergi haji	20.000
2	Surat keterangan sehat dan pemeriksaan kesehatan di puskesmas	10.000
3	Paket foto untuk dokumen haji	85.000
4	Manasik haji	300.000
5	Pemeriksaan laboratorium darah, urine dan toraks 2 posisi	160.000
6	Imunisasi meningitis dan kartu ICV bagi jamaah haji	100.000
7	Paspor	255.000
8	Sampul paspor dan materai	25.000
9	Pengurusan visa	30.000
10	DAPIH	4.500
11	Gelang identitas	7.000
12	Buku paket manasik dan biaya pengiriman 10%	9.350
13	Buku kesehatan jamaah haji (BKJH)	7.500
14	Buku panduan berhaji sehat	3.500
15	Asuransi	100.000
16	Koper	350.000
17	Transport PP	15.281.567
18	Airport tax bandara Soekarno Hatta	50.000
19	Airport tax bandara KAAIA Jeddah atau AMAA Makkah	126.518
20	Surcharge landing	451.850

(Sambungan Tabel 4.1)

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
21	Biaya Naqobah	1.048.292
22	Pelayanan muasassah dan maktab	708.501
23	Akomodasi di embarkasi	60.000
24	Akomodasi di Madinah	1.445.920
25	Kemah di Armina	722.960
26	Akomodasi di Makkah	7.282.617
27	Sewa hotel transit di Jeddah	192.789
28	Akomodasi di debarkasi	60.000
29	Konsumsi di embarkasi Jakarta	75.000
30	Konsumsi di bandara kedatangan KAAIA Jeddah atau AMAA Makkah	19.279
31	Konsumsi di Madinah	347.021
32	Konsumsi di Armina	518.121
33	Konsumsi di Makkah	1.330.246
34	Konsumsi di bandara kepulauan KAAIA Jeddah atau AMAA Makkah	19.279
35	Konsumsi di hotel transit	57.837
36	Konsumsi di debarkasi Jakarta	75.000
36	Biaya DAM	988.045
<b>Total</b>		<b>Rp 32.327.693</b>

**Total biaya langsung** bagi jamaah haji **gelombang I** adalah sebesar **Rp.32.327.693,-** sedangkan jamaah haji **gelombang II** sebesar **Rp.31.625.617,-**.

#### B. Biaya tenaga kerja langsung

Biaya tenaga kerja langsung adalah semua biaya tenaga kerja yang langsung terkait dengan aktivitas penyelenggaraan haji, yaitu tenaga kerja yang bersifat permanen dan non-permanen (kepanitiaan). Biaya tersebut terdiri dari:

**Tabel 4.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung**

No	Keterangan	Satuan				Jumlah (Rp.)
1	Uang harian petugas kloter - Kemenag	1.554	org	770.000	40 hr	47.863.200.000
2	Uang harian petugas kloter - Kemenkes	2.332	org	700.000	40 hr	65.296.000.000
3	Uang harian amirul hajj dan pengendali mutu	19	org	770.000	60 hr	877.800.000
4	Uang harian petugas TUH Jeddah	16	org	770.000	90 hr	1.108.800.000
5	Uang harian PPIH daker & sektor Jeddah	73	org	770.000	76 hr	4.271.960.000
6	Uang harian PPIH daker & sektor Madinah	115	org	770.000	76 hr	6.729.800.000
7	Uang harian PPIH daker & sektor Makkah	284	org	770.000	66 hr	14.432.880.000
8	Uang harian PPIH sektor Bir Ali & penimbangan barang	6	org	770.000	76 hr	351.120.000

(sambungan Tabel 4.2)

9	Uang harian PPIH sektor terminal hijrah & <i>check point</i>	8	org	770.000	76	hr	468.160.000
10	Uang harian PPIH sektor airport	9	org	770.000	76	hr	526.680.000
11	Uang harian PPIH kesehatan Jeddah	25	org	700.000	75	hr	1.312.500.000
12	Uang harian PPIH kesehatan Madinah	85	org	700.000	75	hr	4.462.500.000
13	Uang harian PPIH kesehatan Makkah	200	org	700.000	66	hr	9.240.000.000
14	Uang makan PPIH embarkasi	22	org	1.050.000	2	keg	46.200.000
15	Transport PPIH embarkasi	22	org	200.000	2	keg	8.800.000
16	Honorarium PPIH embarkasi	22	org	1.300.000	2	keg	57.200.000
17	Insentif kepala rombongan emb. JKG	479	org	867.552	1	keg	415.123.632
18	Insentif kepala regu emb. JKG	1.914	org	602.467	1	keg	1.153.000.707
19	Gaji Dityan&Ditbina Haji			337.880.073	10	bln	3.378.800.731
20	Honor kegiatan Dityan&Ditbina Haji			104.079.195	10	bln	1.040.791.958
21	Jasa profesi keg.Dityan&Ditbina Haji			71.481.839	10	bln	714.818.393
<b>Jumlah</b>							<b>163.756.135.411</b>

Jumlah biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp.163.756.135.411,- dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Biaya panitia penyelenggara haji non kloter yang ditanggung oleh jamaah haji reguler dan haji khusus (220.041orang) yaitu sebesar Rp.156.941.400.000,-maka per orang menanggung biaya sebesar Rp.713.237,-
- 2) Biaya yang ditanggung oleh jamaah haji di embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) yaitu sebesar Rp.1.680.324.339,- jumlah ini ditanggung oleh jamaah haji embarkasi Jakarta yaitu sebanyak 7.563 orang jamaah berasal dari provinsi DKI Jakarta, 8.651 orang dari provinsi Banten, dan hanya 2.924 orang yang berasal dari provinsi Lampung<sup>34</sup>. Maka per orang menanggung biaya sebesar Rp.87.800,-
- 3) Biaya tenaga kerja langsung lainnya selain butir A dan B yaitu sebesar Rp.5.134.411.072,- ditanggung oleh 196.606 orang, maka per orang menanggung biaya sebesar Rp.26.115,-. Jamaah haji khusus tidak diperhitungkan, karena kepengurusan penyelenggaraan haji khusus dilakukan oleh subdit bina haji khusus dan umrah pada Direktorat Jenderal Pembinaan Haji, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (biaya tersebut sudah dikeluarkan dalam perhitungan)

<sup>34</sup> Dalam laporan operasional haji kanwil Kementerian Agama provinsi Lampung tahun 2010, disebutkan ada beberapa jamaah yang tidak transit di embarkasi antara Lampung, yaitu 1.944orang asal kota Bandar Lampung, 493 asal kota Metro dan 487orang asal kab.Lampung Selatan. Calon jamaah haji tersebut transit di embarkasi Jakarta, karena belum memadainya fasilitas di embarkasi antara Lampung.

- 4) Gaji pada kanwil dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dikeluarkan dari perhitungan, karena jika diperhitungkan maka biaya penyelenggaraan haji menjadi terlalu tinggi.

Total **biaya tenaga kerja langsung** yang ditanggung per jamaah haji adalah **Rp.827.153,-**.

## 2. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya lain-lain yang diperhitungkan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Dalam perhitungan biaya langsung melalui dua tahapan, yaitu dengan cara :

- A. Identifikasi Aktivitas sebagai Dasar Alokasi Biaya dan Membebankan Biaya Tidak Langsung pada Setiap Dasar Alokasi Biaya (Tahap Pertama).  
Pada tahap ini, biaya tidak langsung dikumpulkan ke dalam *cost pool*. *Cost pool* yang dibentuk harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang homogen, dan merupakan suatu kumpulan dari biaya tidak langsung yang variasi biayanya dapat dijelaskan oleh satu pemicu biaya. Sehingga biaya tidak langsung dapat dibebankan ke masing-masing aktivitas tersebut berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi.

Proses identifikasi dalam sistem ABC merupakan hal yang penting karena dasar alokasi dari biaya-biaya jasa adalah aktivitas, sehingga dapat dengan jelas menentukan biaya mana yang berhubungan langsung dengan jasa dan biaya mana yang memerlukan penelusuran lebih lanjut sebelum dibebankan ke jasa. Adapun aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di embarkasi Jakarta, yaitu :

- 1) Tahap Pendaftaran
- 2) Tahap Persiapan
- 3) Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta
- 4) Tahap Pemberangkatan di bandara Soekarno Hatta
- 5) Tahap Kedatangan di bandara Arab Saudi
- 6) Tahap Pelaksanaan
- 7) Tahap Pemulangan di Arab Saudi
- 8) Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta

Langkah berikutnya setelah melakukan identifikasi aktivitas dengan membaginya dalam beberapa tahap adalah mengidentifikasi biaya-biaya tidak langsung yang terjadi pada berbagai tingkat aktivitas. Adapun biaya tidak langsung dari penyelenggaraan ibadah haji adalah sebagai berikut:

a. Beban Tenaga Kerja Tidak Langsung

Beban tenaga kerja tidak langsung terdiri dari honor, uang makan dan transport yang diterima oleh tenaga kerja dalam organisasi non-permanen (kepanitiaan) dan tenaga kerja organisasi permanen yang diperbantukan sebagai tenaga kerja organisasi kepanitiaan. Proses penelusuran dilakukan dengan wawancara kepada masing-masing petugas dalam aktivitas tersebut dan wawancara dengan pegawai yang ada dalam organisasi Direktorat Jenderal Haji dan Umrah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jangka waktu pekerjaan sebagai tenaga kerja tidak langsung dilakukan.

Sejak September 2010 embarkasi antara Lampung digunakan sebagai tempat transit bagi jamaah haji asal provinsi Lampung, sehingga pada perhitungan tahap keberangkatan/kepulungan di embarkasi/debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG), tidak memperhitungkan biaya tenaga kerja tidak langsung di embarkasi antara Lampung. Sebelum membagi beban tenaga kerja tidak langsung ke masing-masing *cost pool*, adapun satuan beban tenaga kerja tidak langsung adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Satuan Beban Tenaga Kerja Tidak Langsung**

No.	Keterangan	Satuan (Rp.)
1	Gaji petugas bagian pendaftaran per bulan (PNS Gol.III/a)	1.875.000,-
2	Honor temus di Indonesia yang diangkat melalui Direktorat PHU (per bulan)	1.800.000,-
3	Honor pembantu PPIH di embarkasi JKG (per kegiatan)	1.800.000,-
4	Uang makan pembantu PPIH di embarkasi JKG (per keg.)	1.050.000,-
5	Honor temus di Arab Saudi yang diangkat melalui Kementerian Agama (per hari)	770.000,-
6	Honor temus di Arab Saudi yang diangkat melalui Kementerian Kesehatan (per hari)	500.000,-

Berikut besarnya beban tenaga kerja tidak langsung pada masing-masing *cost pool*

**Tabel 4.4Beban Tenaga Kerja Tidak Langsung**

No.	Tahapan	Jumlah (Rp.)
1	Tahap Pendaftaran	45.000.000,-
2	Tahap Persiapan	810.000.000,-
3	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	451.991.750,-
4	Tahap Pelaksanaan	33.397.700.000,-
5	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	356.250.000,-
<b>Total Beban Tenaga Kerja Tidak Langsung</b>		<b>35.060.941.750,-</b>

## 1) Tahap pendaftaran

- Pada Kankemenag Kota Jakarta Pusat, jumlah pendaftar haji per hari maksimal 25orang, sedangkan jumlah jamaah haji yang berangkat tahun 2010 adalah 610orang. Dua orang pegawai golongan III sudah cukup untuk melayani calon jamaah.
- Gaji petugas bank tidak diperhitungkan, karena pekerjaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan haji dilakukan oleh *customer service* pada saat pendaftaran haji dan *teller* pada saat pelunasan haji. Gaji petugas bank tersebut sulit dihitung, karena sulitnya memisahkan/membagi berapa jam waktu yang terpakai untuk melakukan pelayanan bagi jamaah dan berapa jam waktu pelayanan bagi nasabah bank tersebut.
- Begitu pula dengan petugas Puskesmas yang memeriksakan kesehatan.

## 2) Tahap persiapan

- Gaji petugas imigrasi tidak diperhitungkan dalam beban tenaga kerja tidak langsung, karena sulit memisahkan jumlah jam kerja yang terpakai dalam pembuatan/pelayananpaspor jamaah haji dengan pembuatan/pelayanan paspor biasa.
- Temus di kedutaan Arab Saudi (bagian penghubung dan pencetakan visa) sebanyak 50 orang dan bekerja selama 5 bulan sebelum keberangkatan haji.
- Temus di subdit dokumen dan perlengkapan haji (bagian scanning, yaitu pemaduan data dan request visa) sebanyak 40 orang dan bekerja selama 5bulan sebelum keberangkatan haji.



- 3) Tahap keberangkatan/kepulangan di embarkasi/debarkasi Jakarta
- Uang makan dan honorarium pembantu PPIH sebanyak 156 orang, dimana tenaga pembantu PPIH di embarkasi ini, direkrut selama jamaah menggunakan asrama haji sebagai tempat pemondokan sementara(sebelum berangkat ke Arab Saudi dan sesudah melaksanakan ibadah haji). Pembantu PPIH bertugas untuk melakukan pelayanan satu atap di asrama haji.
  - Honor tim pengadaan catering dihitung karena adanya proses lelang dalam menentukan perusahaan jasa catering yang akan dipakai sebagai penyedia catering asrama haji selama musim haji (masa keberangkatan 32hari dan masa kepulangan 32 hari).
- 4) Tahap pelaksanaan
- Tenaga musiman (temus)dari Kementerian Agama sebanyak 560 orang, dimana temus tersebut adalah warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi baik mahasiswa maupun pekerja yang bermukim di Arab Saudi dan sekitarnya.

b. Beban Konsumsi

Beban konsumsi yang dimaksud adalah biaya makan yang diberikan selama proses penyelenggaraan haji, makanan yang diberikan merupakan kerjasama antara pihak penyelenggara dengan pihak catering. Makanan tersebut dapat berupa prasmanan ataupun nasi box, dan adapula makanan ringan/kudapan, tergantung dari isi kontrak perjanjian antara kedua belah pihak. Perhitungan ini, menggunakan asumsi bahwa pada saat kepulangan, semua petugas kloter masih menginap 1 hari di debarkasi Jakarta. Sebelum membagi beban konsumsike masing-masing *cost pool*, adapun satuankonsumsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5Satuan Beban Konsumsi**

No.	Keterangan	Satuan (Rp.)
1	Konsumsi petugas kloter & jamaah di embarkasi/debarkasi Jakarta per hari	75.000,-
2	Konsumsi petugas PPIH atau konsumsi rapat per hari	40.000,-
3	Konsumsi petugas kloter per kali makan	19.279,-
4	Konsumsi petugas non-kloter per kali makan	21.689,-

Berikut besarnya beban konsumsi pada masing-masing *cost pool*

**Tabel 4.6Beban Konsumsi**

No.	Tahapan	Jumlah (Rp.)
1	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	324.470.000,-
2	Tahap Kedatangan di Arab Saudi	7.595.900,-
3	Tahap Pelaksanaan	16.977.300.854,-
4	Tahap Pemulangan di Arab Saudi	18.295.708,-
5	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	277.350.000,-
<b>Total Beban Konsumsi</b>		<b>17.605.012.461,-</b>

- 1) Tahap keberangkatan/kepulangan di embarkasi/debarkasi Jakarta
  - Petugas kloter memperoleh 3kali makan dan 2 kali makanan kudapan (kudapan).
  - Petugas PPIH, pembantu PPIH dan petugas lainnya, tidak menginap di asrama haji, dan hanya memperoleh 1kali makan disertai kudapan.
- 2) Tahap kedatangan/pemulangan di Arab Saudi
 

Beban konsumsi petugas kloter selama masa perjalanan adalah konsumsi selama di terminal Jeddah atau Madinah. Konsumsi di terminal hijrah sebanyak 1kali makan (masing-masing pada masa kedatangan dan pemulangan)
- 3) Tahap pelaksanaan
  - Petugas kloter di Madinah memperoleh 18kali makan disertai kudapan. Beban konsumsi di Madinah dilaksanakan oleh 10 perusahaan catering yang harus menjalin kerjasama dengan majmuah (group). Setiap catering melayani 6.000 hingga 37.000orang.
  - Petugas kloter memperoleh konsumsi di Armina sebanyak 4kali makan di Arafah, 1kali makan di Muzdalifah dan 11kali makan di Mina. Beban konsumsi dilaksanakan sebahagian (39 maktab) oleh Muassasah Mutawwif Asia Tenggara dan 32 maktab lagi disediakan oleh 15 perusahaan catering (muta'ahiddin) yang ditunjuk oleh Misi Haji Indonesia. Setiap maktab terdiri dari 2.800orang.
  - Di Makkah, petugas kloter membeli makan sendiri, tetapi diasumsikan biaya sekali makan sama dengan biaya catering yang diberikan oleh pemerintah. Petugas kloter diasumsikan membeli makan 3kali sehari,

maka total konsumsi makanan selama di Makkah sebanyak 69kali makan.

- Petugas non-kloter diasumsikan memperoleh makan 3kali sehari selama masa bertugas.

c. Beban Langganan Daya dan Jasa

Beban ini terdiri dari beban listrik, air, gas dan telp. Beban pada tahap pendaftaran, hanya memperhitungkan biaya langganan daya dan jasa di Kankemenag Jakarta Pusat. Begitupula dengan beban pada tahap keberangkatan di embarkasi Jakarta, merupakan rincian biaya yang dikeluarkan oleh bendahara embarkasi Jakarta. Adapun pengalokasian ke setiap aktivitas sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Beban Langganan Daya dan Jasa**

No.	Tahapan	Jumlah (Rp.)
1	Tahap Pendaftaran	11.428.571,-
2	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	75.000.000,-
3	Tahap Pelaksanaan	1.413.058.189,-
4	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	75.000.000,-
<b>Total Beban Langganan Daya dan Jasa</b>		<b>1.574.486.750,-</b>

1) Tahap pendaftaran

Biaya listrik setahun di Kankemenag Jakarta Pusat, dibagi ke 7 unit eselon 4 (yaitu: seksi urusan agama Islam, seksi penyelenggaraan haji dan umrah, seksi mapenda, seksi pekapontren, seksi penamas, penyelenggara bimbingan zakat dan wakaf, serta subbag tata usaha). Kemudian pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah dibagi lagi menjadi tiga sub, dimana salah satu sub menangani pendaftaran haji.

2) Tahap keberangkatan/kepulangan di embarkasi/debarkasi Jakarta

Beban listrik selama sebulan ±75 juta, pemakaian listrik selama 2 bulan, dimana 32hari pada masa keberangkatan dan 32 hari masa kepulangan di embarkasi/debarkasi.

## 3) Tahap pelaksanaan

Beban listrik selama pelaksanaan diperoleh dari laporan aktivitas keuangan 1431H/2010M *audited*, karena tidak adanya standar biaya penggunaan listrik di masing-masing pemondokan dan perkantoran.

## d. Beban Transportasi

Beban ini terdiri dari transportasi darat dan udara. Beban atas penyediaan jasa transportasi udara merupakan biaya penerbangan untuk mengangkut jamaah haji dari embarkasi keberangkatan Soekarno Hatta menuju Arab Saudi. Sedangkan transportasi darat untuk mengangkut calon jamaah haji dari embarkasi ke bandara dan pada saat kepulangan jamaah haji dari bandara ke asrama debarkasi termasuk dalam paket yang disediakan oleh jasa penerbangan. Sebelum membagi beban transportasi ke masing-masing *cost pool*, adapun satuan transportasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Satuan Beban Transportasi**

No.	Keterangan	Satuan
1	Transport Penerbangan PP	USD. 1691,-
2	<i>Airport Tax</i> bandara selain di Batam	Rp. 50.000,-
3	<i>Airport Tax</i> bandara di Batam	Rp. 100.000,-
4	<i>Surcharge Landing</i> Madinah	USD. 50,-
5	<i>Airport Tax</i> bandara KAAIA Jeddah/AMAA Madinah	USD. 14,-
6	Biaya Naqobah	SAR. 435,-

Berikut besarnya beban transportasi pada masing-masing *cost pool*

**Tabel 4.9 Beban Transportasi**

No.	Tahapan	Jumlah (Rp.)
1	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	10.575.000,-
2	Tahap Pelaksanaan	302.807.042.990,-
3	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	13.739.000,-
<b>Total Beban Transportasi</b>		<b>302.831.356.990,-</b>

## 1) Tahap keberangkatan/kepulangan di embarkasi/debarkasi Jakarta

Beban transportasi merupakan berbagai pengeluaran dari kendaraan operasional yang digunakan pada musim haji di asrama haji Pondok Gede.

## 2) Tahap pelaksanaan

- *Surcharge landing* Madinah hanya dikenakan pada petugas kloter yang mendarat di Madinah, sedangkan petugas non kloter hanyadikenakan pada petugas dakerdan sektor Madinah.
- Biaya naqobah petugas kloter dan temus dihitung berdasarkan laporan aktivitas keuangan 1431H/2010M *audited*, karena mobilitas dari setiap petugas, sulit untuk diperhitungkan.

## e. Sewa Pemandokan dan Perkantoran

Sewa rumah di Makkah dilakukan dengan kebijakan sistem kontrak langsung dengan pemilik atau yang mewakili atau melalui grup (maktab Aqari) dengan harga plafon yang dibebankan kepada jamaah sebesar SAR.2.850. Jamaah yang memperoleh rumah dengan harga kurang dari harga tersebut diberikan pengembalian berdasarkan perhitungan sistem kontrak. Begitu pula jika harga pemondokan lebih dari harga plafon, maka pemerintah menggunakan dana hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji untuk menutupi kekurangan pembayaran. Penempatan pemondokan Makkah ditetapkan berdasarkan qur'ah (pengundian) sebelum berangkat ke tanah suci.

**Tabel 4.10 Kapasitas dan Harga Pemandokan Makkah**

Ring	Jumlah Rumah	Kapasitas	Total Harga	Rata-Rata (SAR)	%
I	216	127.338	421.292.595	3.308	63
II	164	74.744	190.066.350	2.535	37
<b>Jumlah</b>	<b>380</b>	<b>202.082</b>	<b>611.358.945</b>	<b>3.022</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M

Ring I adalah pemondokan dengan wilayah yang jaraknya sampai dengan 2.000 meter ke Masjidil Haram. Sedangkan ring II jaraknya ke Masjidil Haram lebih dari 2.000 meter. Jarak yang dimaksud dalam istilah tersebut adalah jarak yang diperoleh dengan menarik garis lurus dari batas luar pelataran Masjidil Haram ke lokasi tersebut. Jarak terdekat pemondokan ke Masjidil haram adalah 750 meter dan jarak terjauh adalah 4.000 meter.

Biaya kontrak rumah di Madinah per jamaah sebesar SAR.600. bagi jamaah yang mendapatkan rumah dengan harga kurang dari SAR.500 diberikan pengembalian SAR.100.

**Tabel 4.11 Penempatan Jamaah Haji di Madinah**

No.	Tahun	Markaziyah <sup>35</sup>			Non Markaziyah			Total Jamaah
		Kloter	Jamaah	%	Kloter	Jamaah	%	
1	1430H	204	80.611	89,73	23	9.224	10,27	89.835
2	1431H	467	187.272	94,49	27	10.920	5,51	198.192

Sumber: Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M

Sewa kemah di Arafah dan Mina merupakan biaya akomodasi yang terdiri atas kemah, air, listrik, kebersihan, keamanan, furniture, kipas angin di Arafah dan AC di Mina. Pada perhitungan sewa pemondokan dan perkantoran, diperoleh data bahwa petugas non kloter Kemenag daker Makkah dan Madinah menggunakan kantor misi haji pada masing-masing kota tersebut sebagai pemondokan. Sedangkan petugas Kemenag sektor Makkah dan Madinah, menggunakan pemondokan bersama-sama dengan jamaah. Begitu pula dengan petugas non kloter di daker dan sektor Jeddah, menggunakan hotel bersama dengan jamaah.

Pada perhitungan sewa pemondokan dan perkantoran, menggunakan asumsi, bahwa penginapan bagi amirull hajj dan pengendali mutu adalah rata-rata dari jumlah pemondokan yang ada, dengan menghitung biaya per pemondokan (yang dikenakan pada jamaah) pada masing-masing kota di Arab Saudi dibagi jumlah hari jamaah tersebut bermukim. Dengan perhitungan tersebut, didapat sewa pemondokan per hari sebesar SAR.301. Petugas non kloter, menggunakan perhitungan biaya pemondokan jamaah dibagi dengan jumlah hari jamaah tersebut bermukim. Dari perhitungan tersebut didapat, pemondokan Madinah SAR.600 dibagi dengan 8hari sama dengan SAR.75/hari; pemondokan Makkah SAR.3.022 dibagi dengan 23hari sama dengan SAR.131/hari; dan penginapan di Jeddah sebesar SAR.80/hari. Sebelum membagi

<sup>35</sup>Markaziyah : pusat kota di Madinah atau hotel di ring satu Masjid Nabawi, Madinah.

beban sewa pemondokanke masing-masing *cost pool*, adapun satuanpemondokan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12 Satuan Sewa Pemondokan**

No.	Keterangan	Satuan
1	Akomodasi di asrama haji per hari	Rp. 60.000,-
2	Akomodasi di Madinah per hari	SAR. 75,-
3	Akomodasi di Makkah per hari	SAR. 131,-
4	Akomodasi di Jeddah per hari	SAR. 80,-

Berikut besarnya sewa pemondokan dan perkantoran pada masing-masing *cost pool*

**Tabel 4.13 Sewa Pemondokan dan Perkantoran**

No.	Tahapan	Jumlah (Rp.)
1	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	121.080.000,-
2	Tahap Pelaksanaan	83.512.595.414,-
3	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	20.280.000,-
<b>Total Sewa Pemondokan dan Perkantoran</b>		<b>83.653.955.414,-</b>

f. Beban Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan penting untuk mengetahui kategori kesehatan apakah masuk dalam kategori sehat, mempunyai penyakit dengan resiko tinggi (risti) atau sedang hamil. Petugas dengan kategori penyakit beresiko tinggi, dan sedang hamil sebaiknya tidak menjadi petugas. Total beban pemeriksaan kesehatan pada tahap persiapan haji adalah sebesar Rp.1.228.760.000,-.

g. Beban Dokumen dan Perbekalan Perjalanan Haji

Dokumen ini diperlukan demi kelancaran perjalanan ibadah haji, karena semua persyaratan perjalanan haji di tentukan oleh pihak pemerintah Arab Saudi sebagai negara tuan rumah pelaksanaan haji. Adapun dokumen dan perbekalan perjalanan haji berupa paspor, pengurusan visa, DAPIH, gelang identitas, buku paket manasik, buku panduan berhaji sehat dan asuransi. Total beban dokumen dan perbekalan perjalanan haji pada tahap persiapan haji adalah sebesar Rp.2.052.738.100,-

#### h. Beban Perlengkapan Penyelenggaraan Haji

Beban perlengkapan haji dibutuhkan sebagai identitas, pemberitahuan dan dokumentasi bagi penyelenggaraan haji. Perlengkapan haji terdiri dari pengadaan seragam, pengadaan ID *card*, pengadaan spanduk banner, pencetakan stiker kendaraan/bus. Dengan rincian per aktivitas sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Beban Perlengkapan Penyelenggaraan Haji**

No.	Tahapan	Jumlah (Rp.)
1	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	110.283.350,-
2	Tahap Pelaksanaan	4.624.283.739,-
3	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	13.704.000,-
<b>Total Beban Perlengkapan Penyelenggaraan Haji</b>		<b>4.728.271.089,-</b>

#### i. Beban operasional lainnya

Terdiri dari beban-beban yang tidak diperhitungkan pada beban-beban yang telah diperhitungkan diatas. Beban ini terbagi dari beberapa tahap aktivitas, yaitu:

**Tabel 4.15 Beban Operasional Lainnya**

No.	Tahapan	Jumlah (Rp.)
1	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	56.724.776,-
2	Tahap Pelaksanaan	32.526.262.938,-
3	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	22.637.429,-
<b>Total Beban Operasional Lainnya</b>		<b>32.605.625.143,-</b>

Pada beban operasional lainnya, tidak memperhitungkan operasional provinsi, embarkasi, kabupaten/kota, dan KUA, seperti pada laporan aktivitas keuangan yang dihitung oleh Kementerian Agama, karena biaya-biaya tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan lain, misalnya biaya penginapan diembarkasi/debarkasi haji, honor karu/karom. Selain itu ada biaya-biaya yang tidak jelas peruntukannya, seperti biaya kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, biaya pengantaran dan pengambilan paspor dari pusat ke provinsi atau dari provinsi ke kabupaten/kota, dll.

Setelah aktivitas-aktivitas tersebut didefinisikan dan dikelompokkan, lalu secara rinci disajikan dalam bentuk pengelompokan per aktivitas. Dari delapan aktivitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan haji, diperoleh



tujuh aktivitas utama yang dapat langsung dibebankan ke jasa penyelenggaraan haji. Pada satu aktivitas, yaitu aktivitas/tahap pemberangkatan di bandara Soekarno Hatta, biaya yang ada digabungkan pada aktivitas lain, yaitu pada tahap pelaksanaan, karena jika perhitungan ini dilakukan, maka biaya penerbangan (tiket penerbangan PP) yang ada dalam satu paket perjalanan menjadi terpisah.. Adapun total dari biaya tidak langsung per aktivitas, sebagai berikut :

**Tabel 4.16 Pengelompokan Biaya Tidak Langsung Berdasarkan Aktivitas**

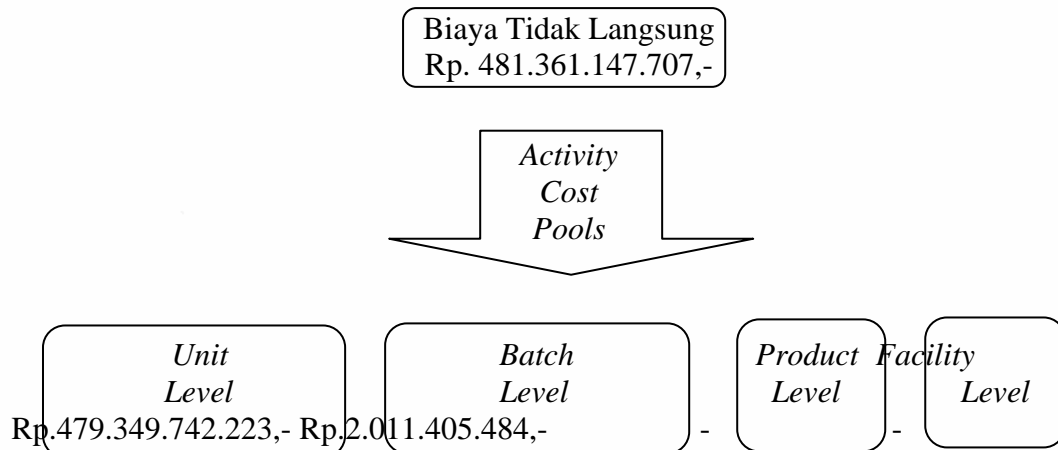
No.	Aktivitas	Biaya Tidak Langsung (Rp.)
1	Tahap Pendaftaran	56.428.571,-
2	Tahap Persiapan	4.091.498.100,-
3	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	1.150.124.876,-
4	Tahap Kedatangan di Arab Saudi	7.595.900,-
5	Tahap Pelaksanaan	475.258.244.123,-
6	Tahap Pemulangan di Arab Saudi	18.295.708,-
7	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	778.960.429,-
<b>Total Biaya Tidak Langsung</b>		<b>481.361.147.707,-</b>

Setelah diketahui biaya tidak langsung per aktivitas, kemudian aktivitas tersebut dikelompokkan berdasarkan hirarki biaya untuk mengklasifikasikan biaya tidak langsung menjadi *pool* biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya atau dasar alokasi biaya yang berbeda atau perbedaan kesulitan dalam menentukan hubungan sebab akibat (atau manfaat yang diterima).

**Tabel 4.17 Pengelompokan Biaya Tidak Langsung Berdasarkan Activity Cost pool**

No.	Aktivitas	Kelompok
1	Tahap Pendaftaran	Batch
2	Tahap Persiapan	Unit
3	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	Batch
4	Tahap Kedatangan di Arab Saudi	Batch
5	Tahap Pelaksanaan	Unit
6	Tahap Pemulangan di Arab Saudi	Batch
7	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	Batch

Adapun pengelompokan hirarki biaya tidak langsung menjadi *pool* biaya yang berbeda, adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Tahap Pertama Sistem ABC**

B. Identifikasi *Activity Cost Driver*, dan Menghitung Biaya Tidak Langsung yang dialokasikan ke Jasa (Tahap Kedua).

Setelah *cost pool* terbentuk, lalu langkah berikutnya adalah menentukan aktivitas pemicu biaya (*activity cost driver*) yang mencerminkan konsumsi biaya yang dikumpulkan dalam *cost pool* tersebut. Aktivitas pemicu biaya merupakan dasar yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung ke jasa. Dalam sistem ABC terdapat lebih dari satu pemicu biaya sebagai dasar alokasi biaya tidak langsung. Dengan kata lain, pemicu biaya digunakan untuk melakukan penelusuran biaya aktivitas ke dalam *cost object*, yang dalam hal ini adalah jasa. Penelusuran dilakukan dengan menghitung tingkat konsumsi dari pemicu biaya. Pengumpulan data tingkat konsumsi aktivitas merupakan langkah yang membutuhkan usaha lebih, dalam mendapatkan data yang benar-benar representatif. Hal ini merupakan kelebihan sistem ABC, yang memasukkan data operasional ke dalam perhitungan finansial, sehingga perhitungan biaya menggunakan sistem ABC menjadi lebih akurat dan informatif. Pemilihan aktivitas pemicu biaya untuk masing-masing kelompok biaya yang telah terbentuk adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.18 Aktivitas Pemicu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji**

No.	Aktivitas	Kelompok	Satuan Aktivitas Pemicu Biaya
1	Tahap Pendaftaran	Batch	Jumlah Jamaah Tahap Pendaftaran di Kankemenag Jak-Pus
2	Tahap Persiapan	Unit	Jumlah Jamaah Tahap Persiapan
3	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	Batch	Jumlah Jamaah Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta
4	Tahap Kedatangan di Arab Saudi	Batch	Jumlah Jamaah Tahap Kedatangan di Arab Saudi
5	Tahap Pelaksanaan	Unit	Jumlah Jamaah Tahap Pelaksanaan
6	Tahap Pemulangan di Arab Saudi	Batch	Jumlah Jamaah Tahap Pemulangan di Arab Saudi
7	Tahap Kepulangan di Debarbasi Jakarta	Batch	Jumlah Jamaah Tahap Kepulangan di Debarbasi Jakarta

Kemudian aktivitas pemicu biaya diidentifikasi berdasarkan satuan volumenya masing-masing. Berikut rincian volume setiap aktivitas yang digunakan

**Tabel 4.19 Rincian Volume Aktivitas Pemicu Biaya**

No.	Satuan Aktivitas Pemicu Biaya	Volume Aktivitas Pemicu Biaya (orang)
1	Jumlah Jamaah Tahap Pendaftaran di Kankemenag Jakarta Pusat	610
2	Jumlah Jamaah Tahap Persiapan	220.041
3	Jumlah Jamaah Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	19.138
4	Jumlah Jamaah Tahap Kedatangan di Arab Saudi	22.413
5	Jumlah Jamaah Tahap Pelaksanaan	220.041
6	Jumlah Jamaah Tahap Pemulangan di Arab Saudi	22.413
7	Jumlah Jamaah Tahap Kepulangan di Debarbasi Jakarta	19.138

Untuk membebankan biaya tidak langsung pada setiap aktivitas, harus ditentukan terlebih dahulu tarif biaya tidak langsung pada setiap aktivitas. Tarif biaya tidak langsung tersebut diperoleh dengan cara membagi *activity cost pool* dari biaya tidak langsung penyelenggaraan haji dengan *activity cost driver*-nya. Adapun rumus persamaan untuk mendapatkan tarif biaya tidak langsung adalah sebagai berikut:

$$\text{Indirect Cost Rate} = \frac{\text{Activity Cost Pool}}{\text{Driver Volume}}$$

**Tabel 4.20 Tarif Biaya Tidak Langsung pada Masing-Masing Aktivitas**

No	Aktivitas	Biaya Tidak Langsung (Rp.)	Driver Volume	Indirect Cost Rate (Rp.)
1	Tahap Pendaftaran	56.428.571,-	610	92.506,-
2	Tahap Persiapan	4.091.498.100,-	220.041	18.594,-
3	Tahap Keberangkatan di Embarkasi Jakarta	1.150.124.876,-	19.138	60.096,-
4	Tahap Kedatangan di Arab Saudi	7.595.900,-	22.413	339,-
5	Tahap Pelaksanaan	475.258.244.123,-	220.041	2.159.862,-
6	Tahap Pemulangan di Arab Saudi	18.295.708,-	22.413	816,-
7	Tahap Kepulangan di Debarkasi Jakarta	778.960.429,-	19.138	40.702,-
<b>Total</b>				<b>2.372.916,-</b>

Dari tabel 4.20 terlihat bahwa biaya tidak langsung pada tahap pelaksanaan merupakan biaya tidak langsung tertinggi. Hal ini disebabkan, karena sumber daya banyak digunakan pada tahap tersebut. Pada tahap kedatangan dan pemulangan di Arab Saudi merupakan biaya tidak langsung terendah, hal ini disebabkan karena penggunaan sumber daya pada tahap ini sudah termasuk dalam *general service fee* yang dibayarkan kepada pemerintah Arab Saudi, berupa pelayanan muasassah dan maktab. Sedangkan pada tahap keberangkatan/kepulangan di embarkasi/debarkasi relatif sedikit biaya yang dikeluarkan jamaah, karena pada tahap ini penggunaan fasilitas dan waktu yang terpakai hanya sedikit.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel diatas, maka **biaya tidak langsung** pada penyelenggaraan haji 1431H/2010M adalah sebesar **Rp.2.372.916,-**. Dari penjumlahan kedua biaya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung diperoleh total **BPIH tahun 1431H/2010M** sebesar **Rp.35.527.762,-** bagi jamaah haji **gelombang I**, dan **Rp.34.825.286,-** bagi jamaah haji **gelombang II**.

Biaya tersebut masih ditambah dengan biaya akomodasi pada jamaah haji asal provinsi Banten, tetapi biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi Banten. Sedangkan bagi jamaah asal provinsi Lampung dikenakan biaya Rp.2.100.000,- dimana biaya tersebut di subsidi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.750.000,- dan pemerintah daerah provinsi Lampung sebesar Rp.250.000,-. Biaya tersebut adalah pengeluaran untuk :

1. Biaya transport Lampung – Jakarta dengan pesawat (PP);
2. Biaya airport tax domestik keberangkatan (bandara Raden Inten II);
3. Biaya airport tax domestik kepulangan (bandara Soekarno Hatta Jakarta);
4. Biaya angkutan bus AC asrama haji Rajabasa – bandara Raden Intan II;
5. Biaya angkutan barang mobil box / kontainer (PP);
6. Biaya jasa porter asrama haji, bandara raden Intan II dan bandara Soekarno Hatta 2kali;
7. Biaya penginapan asrama haji Rajabasa;
8. Biaya konsumsi di asrama haji Rajabasa 3 kali;
9. Biaya konsumsi di bandara Soekarno Hatta 2 kali;
10. Biaya bahan seragam jamaah;
11. Biaya jaring koper jamaah.

Maka biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji asal provinsi Lampung adalah sebesar Rp.36.627.762,- bagi jamaah haji gelombang I, dan Rp.Rp.35.925.286,- gelombang II.

#### **4.2 Perbandingan Perhitungan BPIH Pemerintah dengan Perkiraan KBIHatas Biaya Akomodasidan Konsumsi yang dikeluarkan Pemerintah**

Perbandingan perhitungan BPIH pemerintah dengan perkiraan KBIH dilakukan untuk mengetahui apakah biaya hidup selama di Arab Saudi yang dikenakan pemerintah, terlalu rendah atau terlalu tinggi dari sudut pandang swasta. Kedua perusahaan pembanding, merupakan penyelenggara haji khusus atau umrah.PT. Jasa Wisata Makmur juga bertindak sebagai pelaksana haji reguler, tetapi kewenangan pihak swasta hanya sebatas jasa pengelompokan haji, danmanasik haji tambahan, sedangkan pelayanan lainnya mengikuti pemerintah.

Berikut perbandingan *direct cost* :

**Tabel 4.21Perbandingan Direct Cost**

No.	Keterangan	Pemerintah (Rp.)	PT. Jasa Wisata Makmur (Rp.)	PT. Mideast Express (Rp.)
1	Formulir surat pendaftaran pergi haji	20.000	20.000	20.000
2	Surat keterangan sehat dan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas	10.000	10.000	10.000
3	Paket foto untuk dokumen haji	85.000	85.000	85.000
4	Manasik haji	300.000	2.500.000	300.000
5	Pemeriksaan laboratorium darah, urine dan toraks 2 posisi	160.000	160.000	160.000
6	Imunisasi meningitis dan kartu ICV bagi jamaah haji	100.000	100.000	100.000
7	Paspor, sampul paspor, materai dan pengurusan visa	310.000	310.000	310.000

(Sambungan Tabel 4.21)

8	DAPIH, dan gelang identitas	11.500	11.500	11.500
9	Buku paket manasik dan biaya pengiriman 10%	9.350	9.350	9.350
10	Buku kesehatan jamaah haji (BKJH)	7.500	7.500	7.500
11	Buku panduan berhaji sehat	3.500	3.500	3.500
12	Asuransi	100.000	100.000	100.000
13	Koper jamaah	350.000	350.000	350.000
14	Transport PP	15.281.567	15.281.567	15.281.567
15	<i>Airport tax</i> bandara Soekarno Hatta	50.000	50.000	50.000
16	<i>Airport tax</i> bandara KAAIA Jeddah atau AMAA Makkah	126.518	126.518	126.518
17	<i>Surcharge landing</i>	451.850	451.850	451.850
18	Biaya Naqobah	1.048.292	1.048.292	1.048.292
19	Pelayanan Muasassah dan Maktab	708.501	708.501	708.501
20	Akomodasi di embarkasi	60.000	60.000	60.000
21	Akomodasi di Madinah	1.445.920	1.542.315	1.542.315
22	Kemah di Armina	722.960	722.960	722.960
23	Akomodasi di Makkah	7.282.617	6.928.367	8.314.040
24	Sewa hotel transit di Jeddah	192.789	180.740	192.789
25	Akomodasi di debarkasi	60.000	60.000	60.000
26	Konsumsi di embarkasi JKG	75.000	75.000	75.000
27	Konsumsi di bandara kedatangan KAAIA Jeddah atau AMAA Makkah	19.279	48.197	36.148
28	Konsumsi di Madinah	347.021	867.552	650.664
29	Konsumsi di Armina	518.121	771.157	578.368
30	Konsumsi di Makkah	1.330.246	3.325.616	2.494.212
31	Konsumsi di bandara kepulangan KAAIA Jeddah atau AMAA Makkah	19.279	48.197	36.148
32	Konsumsi di hotel transit	57.837	144.592	108.444
35	Konsumsi di debarkasi	75.000	75.000	75.000
37	Biaya DAM	988.045	988.045	988.045
<b>TOTAL</b>		<b>32.327.693</b>	<b>37.171.316</b>	<b>35.067.711</b>

Pada biaya tenaga kerja langsung tidak ada perbedaan/selisih perhitungan perkiraan KBIH, karena biaya tenaga kerja langsung tidak memperhitungkan biaya hidup di Arab Saudi. Sedangkan pada biaya tidak langsung terdapat selisih antara perhitungan pemerintah dengan perkiraan KBIH. Adapun perbandingan biaya per unit antara ABC pemerintah dengan perkiraan KBIH adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Perbandingan Biaya per Unit dari Biaya Tidak Langsung

No.	Aktivitas	Pemerintah (SAR)	PT. Jasa Wisata Makmur (SAR)	PT. Mideast Express (SAR)
1	Konsumsi petugas kloter di Arab Saudi (sekali makan)	8	20	15
2	Konsumsi petugas non-kloter di Arab Saudi (sekali makan)	9	20	15
3	Konsumsi jamaah safari wukuf (sekali makan)	9	20	15
4	Akomodasi di Madinah (per hari)	75	80	80
5	Akomodasi di Makkah (per hari)	131	125	150
6	Akomodasi di Jeddah (per hari)	80	75	80

Maka secara keseluruhan selisih biaya tidak langsung per aktivitas antara perhitungan pemerintah dengan perkiraan KBIH adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.23 Perbandingan Biaya Tidak Langsung**

No.	Aktivitas	Pemerintah (Rp.)	PT. Jasa Wisata Makmur (Rp.)	PT. Mideast Express (Rp.)
1	Tahap Pendaftaran	56.428.571,-	56.428.571,-	56.428.571,-
2	Tahap Kedatangan di Arab Saudi dan Pemulangan di Arab Saudi	25.891.607,-	64.729.019,-	48.546.764,-
3	Tahap Keberangkatan dan Kepulangan di Embarkasi dan Debarkasi	1.929.085.305,-	1.929.085.305,-	1.929.085.305,-
4	Tahap Persiapan dan Pelaksanaan	479.349.742.223,-	500.165.214.812,-	499.541.661.090,-
<b>Total Biaya Tidak Langsung</b>		<b>481.361.147.707,-</b>	<b>502.215.457.707,-</b>	<b>501.575.721.730,-</b>

Biaya pada tabel 23 kemudian dibagi dengan *driver volume* masing-masing, yaitu:

1. Tahap pendaftaran 610 orang
2. Tahap kedatangan dan pemulangan di Arab Saudi 22.413 orang
3. Tahap keberangkatan/kepulangan di embarkasi/debarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) 19.138 orang
4. Tahap persiapan dan pelaksanaan 220.041 orang

sehingga diperoleh tarif biaya tidak langsung per aktivitas, sebagai berikut:

**Tabel 4.24 Tarif Perbandingan Biaya Tidak Langsung**

No.	Aktivitas	Pemerintah (Rp.)	PT. Jasa Wisata Makmur (Rp.)	PT. Mideast Express (Rp.)
1	Tahap Pendaftaran	92.506,-	92.506,-	92.506,-
2	Tahap Kedatangan di Arab Saudi dan Pemulangan di Arab Saudi	1.155,-	2.888,-	2.166,-
3	Tahap Keberangkatan dan Kepulangan di Embarkasi dan Debarkasi	100.799,-	100.799,-	100.799,-
4	Tahap Persiapan dan Pelaksanaan	2.178.456,-	2.273.055,-	2.270.051,-
<b>Total Biaya Tidak Langsung</b>		<b>2.372.916,-</b>	<b>2.469.247,-</b>	<b>2.465.691,-</b>

Sehingga diperoleh selisih perhitungan pemerintah dengan perkiraan KBIH per jamaah sebagai berikut:

**Tabel 4.25 Perbandingan Biaya per Jamaah**

No.	Jenis Biaya	Pemerintah (Rp.)	PT. Jasa Wisata Makmur (Rp.)	PT. Mideast Express (Rp.)
1	Biaya Langsung	33.154.845,-	37.998.469,-	35.894.864,-
2	Biaya Tidak Langsung	2.372.916,-	2.469.247,-	2.465.691,-
<b>Total Biaya</b>		<b>35.528.331,-</b>	<b>40.467.716,-</b>	<b>38.360.555,-</b>

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Kementerian agama hingga saat ini belum menerapkan sistem manajemen biaya dalam melakukan perhitungan harga pokok penyelenggaraan haji. Perhitungan yang dilakukan selama ini berdasarkan estimasi atau perkiraan. Pendekatan berdasarkan estimasi ini tentunya tidak akurat dan tidak mampu mencerminkan komposisi biaya yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya biaya haji yang terlalu tinggi, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat mencari jalur lain untuk melaksanakan ibadah haji, misalnya haji non kuota, dimana jamaah haji tersebut juga memperoleh visa dari kedutaan besar negara Arab Saudi sebagai calon jamaah haji. Atau biaya haji terlalu rendah, sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan sejumlah dana dari APBN, karena pendapatan dari investasi setoran awal jamaah haji sudah tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional haji, dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus dalam jangka panjang menjadi beban negara.
2. Pembagian pendanaan antara APBN dengan dana hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji tidak jelas. Misalnya biaya penerbangan, dan uang harian petugas menggunakan APBN, sedangkan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji tingkat provinsi atau kabupaten/kota menggunakan dana hasil optimalisasi setoran awal.
3. Biaya penyelenggaraan haji yang dikenakan pemerintah kepada jamaah lebih kecil dari harga perkiraan KBIH atas biaya akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan pemerintah. Biaya tersebut tidak semua ditanggung oleh jamaah secara langsung, karena kekurangan biaya operasional haji ditutupi dengan menggunakan dana hasil investasi setoran awal jamaah haji.



## 5.2 Saran

Dengan memperhatikan beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diajukan saran terkait dengan penerapan sistem manajemen biaya yang tepat, yaitu :

1. Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat mengadopsi sistem manajemen biaya *activity-based costing* (ABC) sebagai alternatif perhitungan yang saat ini masih menggunakan pendekatan berdasarkan estimasi dalam menentukan biaya ibadah haji. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh perhitungan biaya ibadah haji yang akurat, tidak terjadi distorsi biaya (*undercosting* maupun *overcosting*). Dan pada akhirnya pengelolaan dan penggunaan pendapatan penyelenggaraan haji menjadi efisien dan transparan.
2. Setelah besarnya BPIH dihitung mendekati biaya riil, pemerintah sebaiknya tidak lagi menanggung kekurangan biaya penyelenggaraan haji, baik dengan menggunakan dana hasil investasi setoran awal jamaah haji, APBN, ataupun APBD.
3. Pihak swasta dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji reguler, agar terjadi mekanisme persaingan yang kompetitif, sehingga ada opsi atau pilihan bagi jamaah haji untuk beralih ke penyelenggara haji lain, apabila hak-hak konsumen atau jamaah haji tidak ditunaikan dan terjadi ketidakpuasan; dan konsumen atau jamaah haji mendapatkan informasi yang tepat apakah biaya tersebut merupakan biaya yang sesuai dengan biaya atas mekanisme pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

CharlesT. Horngren, Srikant M. Datar dan Madhav Rajan, Cost Accounting-A Manjerial Emphasis, (16th ed.), Prentice Hall.

Don R. Hansen, Maryanne M.Mowen dan Liming Guan (2006), Cost Management : accounting and control, (6th ed.).

Cokins, Gary (1996). Activity Based Cost Management: Mc Graw-Hill Companies, Inc.

Hugh, C., David, H., & Ellis, J., Management Accounting and Principles, 2005.

Islahuzzaman, Activity Based Costing Teori dan Aplikasi, cetakan ke-1,2011.

Tuntunan Praktis Perjalanan Ibadah Haji, Direktorat Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Kementerian Agama, tahun 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 Kementerian Agama.

Data dan profil penyelenggaraan haji, ditjen PHU, Kementerian Agama, tahun 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 11 Ayat 4.

PeraturanPresiden No.51 Tahun 2010 tentang BPIH 1431H/2010M.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1431H.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tambahan Kuota Jamaah Haji Indonesia Tahun 1431H/2010M.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.6 Tahun 2010 tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran jamaah haji.

Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kandepag Kabupaten Kota.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/527/V.VI/HK/2010.

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1431H/2010M *Audited*.

Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Agama Tahun 2010.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Kesehatan Tahun 2010.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2010.

Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Realisasi Embarkasi Jakarta.

Laporan Akhir Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia Tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Perancangan Perubahan Undang-Undang No.17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji.

Rekapitulasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Tahun 1431 H berdasarkan Airlines.

Summary Hajj Price 1994 – 2011 PT. Garuda Indonesia.

Republika, 30 Januari 2011.

<http://asramahajipondokgedejakarta.blogspot.com/2011/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>.

<http://news.okezone.com/read/2010/02/18/337/304756/komisi-pengawas-haji-dibentuk>, 18 Februari 2010.

<http://www.Hukumonline.com/berita/baca/hol18191/>.

<http://www.tempo.co/read/news/2011/10/11/136360888/Vaksin-Haji-Masih-Dipungut-Bayaran>.

<http://doniismanto.com/2011/04/29/290411-biaya-angkutan-haji-diperkirakan-sulit-turun>.

<http://www.haluankepri.com/news/nasional/6165-katering-jamaah-haji-basi-lagi.html>.

Valy (2012, Februari 22). Personal interview customer service Bank Syariah Mandiri (BSM).

Amud (2012, Mei 12). Personal interview pelaksana pada seksi haji Kankemenag Jakarta Pusat.

H. Wahidin (2012, Juni 15) Personal interview PT. Jasa Wisata Makmur.

Personal interview (2012, Juni 16) bagian perjalanan haji PT. Mideast Express.

<b>Tabel 1. Direct Cost Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG)</b>				
<b>A</b>		<b>BIAYA PENERBANGAN JAMAAH HAJI</b>	<b>USD</b>	<b>1.755</b>
	1	Tiket Indonesia-Arab Saudi PP	USD	1.691
	2	Surcharge landing Madinah	USD	50
	3	Airporttax di Arab Saudi	USD	14
<b>B</b>		<b>GENERAL SERVICE FEE KSA</b>	<b>USD</b>	<b>277</b>
	1	Pelayanan Muasassah Thawwafah, Al Adilla dan Maktab Wukala Al Muwajad	SAR	294
	2	Perkemahan di Armina	SAR	300
	3	Angkutan darat (Naqobah) Jeddah, Makkah, Madinah dan Armina	SAR	435
<b>C</b>		<b>BIAYA PELAYANAN DI ARAB SAUDI</b>	<b>USD</b>	<b>927</b>
	1	Sewa pemondokan di Makkah	SAR	2.850
	2	Sewa pemondokan di Madinah	SAR	600
<b>D</b>		<b>LIVING COST (SAR.1.500,-)</b>	<b>USD</b>	<b>405</b>
<b>TOTAL DIRECT COST</b>			<b>USD</b>	<b>3.364</b>

Tabel 2. Indirect Cost Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Tanggal 21 Juli 2010

Asumsi kurs 1431H/2010M			
1 SAR.	=	Rp.	2.500,00
1 USD.	=	SAR	3,72
1 USD.	=	Rp.	9.300,00

Jamaah biasa : 194.000 orang, khusus : 17.000 orang

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA BPIH 1431H			
		SATUAN HARGA		JUMLAH	
<b>A</b>	<b>BIAYA PENERBANGAN :</b>			<b>USD 1.688.371</b>	<b>Rp 15.701.854.000</b>
	1 Tiket petugas kloter Indonesia - Arab Saudi PP *)	2 org x	487 klt	USD 1.720	USD 1.675.280 Rp 15.580.104.000
	2 Surcharge landing Madinah tax petugas kloter dari Arab Saudi	2 org x	487 klt	SAR 50	USD 13.091 Rp 121.750.000
<b>B</b>	<b>GENERAL SERVICE FEE KSA (KINGDOM OF SAUDI ARABIA) UNTUK PETUGAS :</b>			<b>SAR 1.177.101</b>	<b>Rp 2.942.753.000</b>
	1 Pelayanan Muassasah Thawwafah, Muassasah Al Adilla & Maktab Wukala Al Muwahad petugas kloter	2 org x	487 klt	SAR 59	SAR 57.271 Rp 143.178.000
	2 Biaya perkemahan Armina :				
	a Petugas kloter	2 org x	487 klt	SAR 60	SAR 58.440 Rp 146.100.000
	b Petugas non kloter dan temus		1.145 org	SAR 60	SAR 68.700 Rp 171.750.000
	3 Angkutan darat/transportasi :				
	a Naqobah petugas kloter (Jed - Mak - Mad & Armina)	2 org x	487 klt	SAR 435	SAR 423.690 Rp 1.059.225.000
	b Sewa bus petugas non kloter dan temus (Jed - Mak - Mad & Armina)		1 pkt	SAR 569.000	SAR 569.000 Rp 1.422.500.000
<b>C</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL DAN PETUGAS DI ARAB SAUDI :</b>			<b>SAR 240.336.454</b>	<b>Rp 600.841.133.750</b>
	<b>1 Akomodasi :</b>			<b>SAR 97.974.178</b>	<b>Rp 244.935.443.750</b>
	a Biaya selisih sewa pemondokan jamaah haji di Makkah		1 pkt	SAR 68.834.960	SAR 68.834.960 Rp 172.087.400.000
	b Biaya selisih distribusi pemondokan di Makkah 368 gedung x 3 orang x SR.2850		1 pkt	SAR 3.146.400	SAR 3.146.400 Rp 7.866.000.000
	c Sewa cadangan pemondokan di Makkah (1%)		1.940 org	SAR 2.850	SAR 5.529.000 Rp 13.822.500.000
	d Sewa hotel transit di Jeddah		194.000 org	SAR 80	SAR 15.520.000 Rp 38.800.000.000
	e Sewa pemondokan petugas kloter di Makkah	2 kpst x	487 klt	SAR 2.850	SAR 2.775.900 Rp 6.939.750.000
	f Sewa pemondokan petugas kloter di Madinah	2 kpst x	487 klt	SAR 600	SAR 584.400 Rp 1.461.000.000
	g Sewa pemondokan petugas non kloter & temus Jeddah/Makkah yang ziarah di Madinah	1.059 org x	3 hr	SAR 18	SAR 55.598 Rp 138.993.750
	h Sewa wisma di Jeddah		1 pkt	SAR 1.450.000	SAR 1.450.000 Rp 3.625.000.000
	i Sewa hotel transit petugas kloter di Jeddah	2 kpst x	487 klt	SAR 80	SAR 77.920 Rp 194.800.000
	<b>2 Sewa kantor, gudang dan tempat pelayanan jamaah haji</b>			<b>SAR 8.730.000</b>	<b>Rp 21.825.000.000</b>
	a Kantor sektor di Makkah	12 skt x	75 kpst	SAR 2.850	SAR 2.565.000 Rp 6.412.500.000
	b Kantor sektor di Madinah		8 skt	SAR 40.000	SAR 320.000 Rp 800.000.000
	c Kantor Misi Haji di Jeddah		1 pkt	SAR 250.000	SAR 250.000 Rp 625.000.000
	d Sewa rumah pejabat kantor misi haji		- pkt	SAR 250.000	SAR - Rp -
	e Kantor Daker di Makkah (wisma I, II dan Gudang)		1 pkt	SAR 2.250.000	SAR 2.250.000 Rp 5.625.000.000
	f Kantor Daker di Madinah		1 pkt	SAR 2.200.000	SAR 2.200.000 Rp 5.500.000.000
	g Kantor Daker Jeddah di airport		1 pkt	SAR 164.000	SAR 164.000 Rp 410.000.000
	h Gudang penyimpanan kendaraan di Madinatul Hujjaj Jeddah		1 pkt	SAR 190.000	SAR 190.000 Rp 475.000.000
	i Gudang penyimpanan inventaris di Madinatul Hujjaj Jeddah		1 pkt	SAR 185.000	SAR 185.000 Rp 462.500.000
	j Pool bengkel kendaraan di Ruwais		1 pkt	SAR 25.000	SAR 25.000 Rp 62.500.000
	k Posko dan kemah Misi Haji di Arafah		1 pkt	SAR 381.000	SAR 381.000 Rp 952.500.000
	l Posko dan kemah Misi Haji di Mina		1 pkt	SAR 100.000	SAR 100.000 Rp 250.000.000
	m Posko pelayanan di Muzdalifah		4 kmh	SAR 25.000	SAR 100.000 Rp 250.000.000
	n Posko pelayanan di Jamarot		- kmh	SAR 100.000	SAR - Rp -
	<b>3 Konsumsi :</b>			<b>SAR 98.342.416</b>	<b>Rp 245.856.040.000</b>
	a Makan jamaah di Madinah	19 kl x	194.000 org	SAR 9	SAR 33.174.000 Rp 82.935.000.000
	b Masa kedatangan & kepulangan di bandara 2 x SR.8	2 kl x	194.000 org	SAR 8	SAR 3.104.000 Rp 7.760.000.000
	c Di tempat transit Jeddah	3 kl x	194.000 org	SAR 8	SAR 4.656.000 Rp 11.640.000.000

Estimasi perhitungan..., Leni Nopilia, FEUI, 2012

(Sambungan Tabel 2)

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA BPIH 143IH									
		SATUAN HARGA		JUMLAH							
	d Di Arafah Mina	194.000	org	SAR	275	SAR	53.350.000	Rp	133.375.000.000		
	e Petugas non kloter :										
	1) Amirulhaj dan anggota	3	kl x 20 hr x 7	org	SAR	9	SAR	3.780	Rp	9.450.000	
	2) Petugas PPIH Arab Saudi :										
	a) Advanced team	3	kl x 90 hr x 50	org	SAR	9	SAR	121.500	Rp	303.750.000	
	b) Nonkloter Dep. Agama	3	kl x 70 hr x 615	org	SAR	9	SAR	1.162.350	Rp	2.905.875.000	
	c) Nonkloter Dep. Kesehatan										
	d) Petugas temus Arab Saudi	3	kl x 70 hr x 560	org	SAR	9	SAR	1.058.400	Rp	2.646.000.000	
	3) Petugas non kloter dan temus Jeddah/Makkah ziarah di Madinah		6 kl x 1.059	org	SAR	9	SAR	57.186	Rp	142.965.000	
	4) Petugas non kloter dan temus di Armina		16 kl x 1.145	org	SAR	10	SAR	183.200	Rp	458.000.000	
	5) Rapat-rapat koordinasi TUH, Daker, Sektor selama operasional			1 musim	SAR	100.000	SAR	100.000	Rp	250.000.000	
	6) Malam ta'aruf			1 pkt	SAR	46.000	SAR	46.000	Rp	115.000.000	
	7) Penataran tenaga musim :										
	a) Makan	2	kl x 3 hr x 560	org	SAR	9	SAR	30.240	Rp	75.600.000	
	b) Snack	2	kl x 3 hr x 560	org	SAR	3	SAR	10.080	Rp	25.200.000	
	8) Makanan tambahan selama operasional			1.059 org	SAR	250	SAR	264.750	Rp	661.875.000	
	9) Tim penyewaan pemondokan, catering dan transportasi	3	kl x 90 hr x 15	org	SAR	9	SAR	36.450	Rp	91.125.000	
	10) Tim penyewaan pemondokan, catering dan transportasi	3	kl x 120 hr x 30	org	SAR	9	SAR	97.200	Rp	243.000.000	
	f Petugas kloter :										
	1) Petugas kloter masa kedatangan dan kepulangan di KAAlA	2	kl x 2 org x 487	kl	SAR	8	SAR	15.584	Rp	38.960.000	
	2) Petugas kloter di Madinah	19	kl x 2 org x 487	kl	SAR	9	SAR	166.554	Rp	416.385.000	
	3) Petugas kloter di Makkah	5 hr x 2	kl x 2 org x 487	kl	SAR	9	SAR	87.660	Rp	219.150.000	
	4) Petugas kloter di Armina			2 org x 487	kl	SAR	275	SAR	267.850	Rp	669.625.000
	5) Petugas kloter di tempat transit	2	kl x 2 org x 487	kl	SAR	9	SAR	17.532	Rp	43.830.000	
	g Jamaah haji sakit, safari wukuf dan tersesat :										
	1) Makan pasien & jamaah tersesat	4	kl x 3 kl x 3.000	org	SAR	9	SAR	324.000	Rp	810.000.000	
	2) Makan khusus jamaah safari wukuf			3 kl x 300	org	SAR	9	SAR	8.100	Rp	20.250.000
	<b>4 Transportasi darat (angkutan jamaah dari pemondokan ke Masjidilharom)</b>	<b>71.254</b>	<b>org</b>	<b>SAR</b>	<b>140</b>	<b>SAR</b>	<b>9.975.560</b>	<b>Rp</b>	<b>24.938.900.000</b>		
	<b>5 Pelayanan bongkar muat &amp; angkutan barang (bandara, hotel transit, pondokan Madinah dan Makkah)</b>	<b>194.000</b>	<b>org</b>	<b>SAR</b>	<b>16</b>	<b>SAR</b>	<b>3.104.000</b>	<b>Rp</b>	<b>7.760.000.000</b>		
	<b>6 Honor petugas :</b>						<b>SAR</b>	<b>16.610.300</b>	<b>Rp</b>	<b>41.525.750.000</b>	
	a Tim dan tenaga harian penyewaan pemondokan, catering dan transportasi			1 pkt	SAR	1.165.500	SAR	1.165.500	Rp	2.913.750.000	
	b Honor temus PPIH Arab Saudi		76 hr x 560	org	SAR	330	SAR	14.044.800	Rp	35.112.000.000	
	c Honor rapat dan lembur petugas pra dan paska operasional			- pkt	SAR	1.165.500	SAR	-	Rp	-	
	d Tenaga honorer Kantor Misi Haji dan Daker			1 pkt	SAR	1.000.000	SAR	1.000.000	Rp	2.500.000.000	
	e Tenaga kebersihan, catering dan lain-lain			1 pkt	SAR	400.000	SAR	400.000	Rp	1.000.000.000	
	<b>7 Administrasi dan perlengkapan operasional kantor :</b>						<b>SAR</b>	<b>1.275.000</b>	<b>Rp</b>	<b>3.187.500.000</b>	
	a Sarana administrasi & perkantoran Kantor Misi Haji, Daker di Makkah, Madinah, Jeddah & Armina :										
	1) Sarana administrasi dan perkantoran			1 pkt	SAR	250.000	SAR	250.000	Rp	625.000.000	
	2) Daker, sektor, perkemahan & pos pelayanan Armina			1 pkt	SAR	250.000	SAR	250.000	Rp	625.000.000	
	b Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan naskah lainnya			1 pkt	SAR	175.000	SAR	175.000	Rp	437.500.000	
	c Perjalanan dinas rapat koordinasi			1 pkt	SAR	600.000	SAR	600.000	Rp	1.500.000.000	
	<b>8 Pemeliharaan dan langganan daya jasa :</b>						<b>SAR</b>	<b>1.670.000</b>	<b>Rp</b>	<b>4.175.000.000</b>	
	a Langganan daya dan jasa			1 pkt	SAR	600.000	SAR	600.000	Rp	1.500.000.000	
	b Pemeliharaan Kantor Misi Haji di Jeddah, Daker di Makkah, Madinah dan Jeddah			1 pkt	SAR	500.000	SAR	500.000	Rp	1.250.000.000	
	c Pemeliharaan dan operasional kendaraan			1 pkt	SAR	570.000	SAR	570.000	Rp	1.425.000.000	

(Sambungan Tabel 2)

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA BPIH 1431H			
		SATUAN HARGA		JUMLAH	
		SAR	Rp	SAR	Rp
<b>9</b>	<b>Media center haji :</b>			<b>SAR 336.400</b>	<b>Rp 841.000.000</b>
	a Sarana dan prasarana Media Center Haji (MCH)	1	pkt	SAR 196.400	Rp 491.000.000
	b Penyediaan studio mini di Makkah	1	pkt	SAR 40.000	Rp 100.000.000
	c Operasional MCH	1	pkt	SAR 100.000	Rp 250.000.000
<b>10</b>	<b>Biaya penunjang operasional :</b>			<b>SAR 2.318.600</b>	<b>Rp 5.796.500.000</b>
	a Pakaian seragam temus	3	stl x 560	org SAR 130	Rp 546.000.000
	b Badal haji		150	org SAR 1.500	Rp 562.500.000
	c Pelayanan keprotokolan dan delegasi misi		1	pkt SAR 600.000	Rp 1.500.000.000
	d Pengurusan ID card, stiker kendaraan airport, masyair & taraddudi		1	pkt SAR 100.000	Rp 250.000.000
	e Pengelolaan keuangan :				
	1) Biaya kirim SPJ keuangan dan surat dinas		12	bln SAR 2.100	Rp 63.000.000
	2) Pengelolaan keuangan dan evaluasi	12	bln x 10	org SAR 2.500	Rp 750.000.000
	f Pengadaan kendaraan		10	unit SAR -	Rp -
	g Pemulangan jamaah sakit ke Indonesia pasca operasional haji		25	pkt SAR 10.000	Rp 625.000.000
	h Pengadaan laoha, stiker untuk pemondokan, bendera, umbul-umbul, peta dan lain-lain		1	pkt SAR 450.000	Rp 1.125.000.000
	i Biaya lawyer, notaris dan penterjemah resmi		1	pkt SAR 150.000	Rp 375.000.000
	Total (A + B + C)				
<b>D</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL DI DALAM NEGERI :</b>				<b>Rp 389.685.246.993</b>
<b>1</b>	<b>Konsumsi :</b>			<b>Rp 25.522.050.000</b>	<b>Rp 25.522.050.000</b>
	a Jamaah haji di embarkasi		194.000	org Rp 75.000	Rp 14.550.000.000
	b Petugas kloter di embarkasi		2	org x 487 klt Rp 75.000	Rp 73.050.000
	c PPIH di embarkasi	14	emb x 172	kl x 60 org Rp 75.000	Rp 10.836.000.000
	d Rapat-rapat	14	emb x 30	kl x 5 org Rp 30.000	Rp 63.000.000
<b>2</b>	<b>Biaya operasional asrama haji embarkasi :</b>				<b>Rp 29.724.900.000</b>
	a Pemeliharaan sarana dan prasarana		14	lok Rp 97.000.000	Rp 1.358.000.000
	b Layanan daya dan jasa		14	lok Rp 300.000.000	Rp 4.200.000.000
	c Sarana administrasi perkantoran dan ATK		14	lok Rp 25.000.000	Rp 350.000.000
	d Pencetakan/penggandaan dokumen, leaflet		14	lok Rp 20.000.000	Rp 280.000.000
	e Perjalanan dinas PPIH		14	lok Rp 22.000.000	Rp 308.000.000
	f Insentif ketua rombongan (karom)		4.311	org SAR 360	Rp 3.879.900.000
	g Insentif ketua regu (karu)		19.400	org SAR 250	Rp 12.125.000.000
	h Honor PPIH embarkasi	172	org x 2	kl x 14 lok Rp 1.500.000	Rp 7.224.000.000
<b>3</b>	<b>Peningkatan fasilitas dan rehabilitasi asrama haji :</b>				<b>Rp 23.500.000.000</b>
	a Embarkasi		14	lok Rp 1.000.000.000	Rp 14.000.000.000
	b Transit		19	lok Rp 500.000.000	Rp 9.500.000.000
<b>4</b>	<b>Passenger service charge bandara :</b>				<b>Rp 10.319.400.000</b>
	a Jamaah haji :				
	1) Embarkasi Batam		9.705	org Rp 100.000	Rp 970.500.000
	2) Embarkasi lainnya		184.295	org Rp 50.000	Rp 9.214.750.000
	b Petugas kloter :				
	1) Embarkasi Batam		23	org Rp 100.000	Rp 2.300.000
	2) Embarkasi lainnya		957	org Rp 50.000	Rp 47.850.000
	c Petugas non kloter		560	org Rp 150.000	Rp 84.000.000
<b>5</b>	<b>Paspor jamaah haji dan petugas :</b>				<b>Rp 72.706.665.469</b>
	a Tingkat pusat				
	1) Biaya paspor jamaah haji		194.000	org Rp 270.000	Rp 52.380.000.000

Estimasi perhitungan..., Leni Nopilia, FEUI, 2012

(Sambungan Tabel 2)

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA BPIH 1431H			
		SATUAN HARGA	JUMLAH		
	2) Pengurusan dan pemvisaan paspor jamaah haji dan petugas	197.286 org	Rp 29.078	Rp 5.736.739.469	Rp 5.736.739.469
	3) Pengurusan paspor jamaah haji dan petugas	- org	Rp 100.000	Rp -	Rp -
	4) Pengadaan dan pendistribusian DAPIH	197.286 org	Rp 6.000	Rp 1.183.716.000	Rp 1.183.716.000
	b Tingkat provinsi				
	1) Biaya verifikasi dan pengurusan paspor jamaah haji	1 pkt	Rp 8.355.750.000	Rp 8.355.750.000	Rp 8.355.750.000
	2) Proses pengisian data DAPIH	1 pkt	Rp 351.750.000	Rp 351.750.000	Rp 351.750.000
	3) Proses verifikasi data DAPIH	1 pkt	Rp 1.055.250.000	Rp 1.055.250.000	Rp 1.055.250.000
	c Tingkat kabupaten/kota				
	1) Biaya verifikasi dan pengurusan paspor jamaah haji	469 lok	Rp 6.340.000	Rp 2.973.460.000	Rp 2.973.460.000
	2) Pengambilan foto biometrik dan sidik jari jamaah haji	469 lok	Rp 1.428.571	Rp 670.000.000	Rp 670.000.000
	<b>6 Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat)</b>			<b>Rp 56.324.102.000</b>	<b>Rp 56.324.102.000</b>
	a Tingkat pusat				
	1) Sewa jaringan	1 pkt	Rp 7.982.650.000	Rp 7.982.650.000	Rp 7.982.650.000
	2) Operasional dan pemeliharaan infrastruktur siskohat dan switching	1 pkt	Rp 19.630.000.000	Rp 19.630.000.000	Rp 19.630.000.000
	3) Pelatihan SDM	1 pkt	Rp 1.140.630.000	Rp 1.140.630.000	Rp 1.140.630.000
	4) Pengadaan sarana dan prasarana Siskohat	1 pkt	Rp 984.272.000	Rp 984.272.000	Rp 984.272.000
	5) Tenaga pendampingan (outsourcing)	1 pkt	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
	b Tingkat provinsi				
	Bantuan operasional siskohat 33 lokasi	33 lok	Rp 108.250.000	Rp 3.572.250.000	Rp 3.572.250.000
	c Tingkat kabupaten/kota				
	1) Bantuan operasional Siskohat	469 lok	Rp 26.700.000	Rp 12.522.300.000	Rp 12.522.300.000
	2) Bantuan pengadaan meubelair & renov ruang komputer 127 Kankemenag Kab/Kota	127 lok	Rp 36.000.000	Rp 4.572.000.000	Rp 4.572.000.000
	3) Bantuan pengadaan genset & stabilizer 5kva 246 Kankemenag Kab/Kota	246 lok	Rp 20.000.000	Rp 4.920.000.000	Rp 4.920.000.000
	<b>7 Identitas jamaah dan petugas haji</b>			<b>Rp 2.757.899.750</b>	<b>Rp 2.757.899.750</b>
	a Pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah (194.000 + 1% + 3.500 pet) @ Rp.7.100	1 pkt	Rp 1.557.899.750	Rp 1.557.899.750	Rp 1.557.899.750
	b Rancangan batik seragam jamaah	1 pkt	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.200.000.000
	<b>8 Qur'ah pemondokan di Makkah</b>	<b>1 pkt</b>	<b>Rp 550.000.000</b>	<b>Rp 550.000.000</b>	<b>Rp 550.000.000</b>
	<b>9 Jasa konsultan manajemen dan lawyer :</b>			<b>Rp 11.500.000.000</b>	<b>Rp 11.500.000.000</b>
	a Jasa konsultan manajemen	1 pkt	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	b Bantuan pelayanan konsultasi hukum	1 pkt	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
	c Jasa konsultan keuangan BPIH	1 pkt	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000
	d Pengelolaan aset	1 pkt	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000
	e Surveillance dan sertifikasi pengembangan SMM haji (ISO 9000 : 2008)	1 pkt	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000
	<b>10 Pembinaan dan bimbingan jamaah dan petugas haji :</b>			<b>Rp 76.744.714.375</b>	<b>Rp 76.744.714.375</b>
	a Tingkat pusat				
	1) Supervisi bimbingan manasik haji dan perjalanan haji	33 pkt	Rp 18.560.606	Rp 612.500.000	Rp 612.500.000
	2) Pengadaan buku manasik, alat peraga, buklet, piagam dan sarana bimbingan :				
	a) Buku paket manasik (194.000 orang + 3.500 pet. + 2,5%) dan 10% pengiriman @Rp.8.500	1 pkt	Rp 2.055.714.375	Rp 2.055.714.375	Rp 2.055.714.375
	b) Pengadaan alat peraga pembinaan jamaah	215 unit	Rp 4.000.000	Rp 860.000.000	Rp 860.000.000
	c) Pengadaan piagam dan buku-buku pedoman	4 kl	Rp 85.000.000	Rp 340.000.000	Rp 340.000.000
	d) Pengadaan buklet penyuluhan	25.000 eks	Rp 1.800	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
	3) Pelatihan pembimbing manasik				
	Seleksi dan sertifikasi pembimbing manasik	1 pkt	Rp 477.500.000	Rp 477.500.000	Rp 477.500.000
	4) Pengadaan alat pengolahan data untuk pelayanan petugas haji	1 pkt	Rp 192.000.000	Rp 192.000.000	Rp 192.000.000
	5) Seleksi dan pelatihan petugas non kloter :				
	a) Rekrutment petugas non kloter	1 pkt	Rp 1.075.000.000	Rp 1.075.000.000	Rp 1.075.000.000
	b) Pelatihan petugas non kloter	10 hr x 590 klt	Rp 379.661	Rp 2.240.000.000	Rp 2.240.000.000

Estimasi perhitungan..., Leni Nopilia, FEUI, 2012



(Sambungan Tabel 2)

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA BPIH 1431H		
		SATUAN HARGA	JUMLAH	
	b Tingkat provinsi			
	1) Bantuan biaya rekrutment dan tes petugas kloter dan non kloter	33 lok	Rp 22.000.000	Rp 726.000.000
	2) Pelatihan petugas kloter	10 hr x 487 klt x 2 org	Rp 400.000	Rp 3.896.000.000
	3) Pengadaan seragam petugas kloter & PPIH embarkasi :			
	a) Seragam petugas kloter	2 slt x 2 org x 490 klt	Rp 250.000	Rp 490.000.000
	b) Seragam petugas PPIH embarkasi	1 slt x 25 org x 12 lok	Rp 250.000	Rp 75.000.000
	4) TOT bagi KUA di (33 - 16 = 17) provinsi	17 lok	Rp 150.000.000	Rp 2.550.000.000
	c Tingkat kabupaten/kota			
	1) Pemantapan petugas karom dan karu :			
	a) Pemantapan karu di kab/kota	3 kl x 19.400 org	Rp 40.000	Rp 2.328.000.000
	b) Pemantapan karom di kab/kota	3 kl x 4.850 org	Rp 40.000	Rp 582.000.000
	2) Biaya penyelenggaraan manasik	4 kl x 194.000 org	Rp 20.000	Rp 15.520.000.000
	d Kantor Urusan Agama			
	Biaya penyelenggaraan manasik	11 kl x 194.000 org	Rp 20.000	Rp 42.680.000.000
	<b>11 Image building</b>	<b>1 pkt</b>	<b>Rp 10.911.025.500</b>	<b>Rp 10.911.025.500</b>
	a Persiapan pengadaan image building			
	b Pengadaan image building :			
	1) Di media elektronik			
	2) Di media cetak dan online			
	3) Seminar, media gathering, konferensi pers dan teleconference			
	c Monitoring dan pengendalian image building			
	<b>12 Pengelolaan dan pelaporan keuangan BPIH :</b>		<b>Rp 5.030.000.000</b>	<b>Rp 5.030.000.000</b>
	a Pengelolaan keuangan BPIH	1 pkt	Rp 2.700.000.000	Rp 2.700.000.000
	b Penyusunan rencana (RKA) dan laporan keuangan BPIH	1 pkt	Rp 1.380.000.000	Rp 1.380.000.000
	c Publikasi laporan keuangan BPIH dan penggandaan	1 pkt	Rp 350.000.000	Rp 350.000.000
	b Verifikasi dan pengendalian internal	1 pkt	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000
	<b>13 Penyusunan dan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan</b>	<b>1 pkt</b>	<b>Rp 2.780.000.000</b>	<b>Rp 2.780.000.000</b>
	<b>14 Penyiapan transportasi udara :</b>		<b>Rp 928.989.900</b>	<b>Rp 928.989.900</b>
	a Honor penyusunan spesifikasi dan pengadaan transportasi haji	2 bln x 20 org	Rp 975.000	Rp 39.000.000
	b Penyusunan dan koordinasi jadwal pemberangkatan dan pemulangan di 12 embarkasi :			
	1) Penyusunan jadwal pemberangkatan & pemulangan	1 pkt	Rp 637.989.900	Rp 637.989.900
	2) Koordinasi dan pemantapan jadwal pemberangkatan & pemulangan di 12 embarkasi	12 emb	Rp 21.000.000	Rp 252.000.000
	<b>15 Rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan haji :</b>		<b>Rp 1.520.000.000</b>	<b>Rp 1.520.000.000</b>
	a Rapat koordinasi instansi terkait	1 pkt	Rp 720.000.000	Rp 720.000.000
	b Rapat lainnya	4 kl	Rp 200.000.000	Rp 800.000.000
	<b>16 Media center haji dalam negeri</b>		<b>Rp 1.100.000.000</b>	<b>Rp 1.100.000.000</b>
	a Pengadaan sarana MCH di pusat	1 pkt	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000
	b Operasional MCH	1 pkt	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	<b>17 Penyusunan dan penggandaan buku dan laporan</b>	<b>1 pkt</b>	<b>Rp 1.000.000.000</b>	<b>Rp 1.000.000.000</b>
	<b>18 Operasional penyelenggaraan haji :</b>		<b>Rp 32.539.500.000</b>	<b>Rp 32.539.500.000</b>
	a Tingkat pusat			
	1) Operasional PPIH pusat	1 pkt	Rp 1.250.000.000	Rp 1.250.000.000
	2) ATK dan barang habis pakai lainnya	1 pkt	Rp 1.783.500.000	Rp 1.783.500.000
	3) Sewa peralatan kantor (foto copy)	1 pkt	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000

(Sambungan Tabel 2)

NO	URAIAN KEGIATAN	RENCANA BPIH 1431H							
		SATUAN HARGA		JUMLAH					
	4) Pemeliharaan :								
	a) Kantor wisma	1	pkt	Rp	300.000.000	Rp	300.000.000	Rp	300.000.000
	b) Kendaraan operasional	1	pkt	Rp	500.000.000	Rp	500.000.000	Rp	500.000.000
	5) Pengadaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan ibadah haji	1	pkt	Rp	1.000.000.000	Rp	1.000.000.000	Rp	1.000.000.000
	b Bantuan operasional penyelenggaraan ibadah haji tingkat provinsi	33	lok	Rp	250.000.000	Rp	8.250.000.000	Rp	8.250.000.000
	c Bantuan operasional penyelenggaraan ibadah haji tingkat kabupaten/kota	469	lok	Rp	5.000.000	Rp	2.345.000.000	Rp	2.345.000.000
	d Bantuan operasional penyelenggaraan ibadah haji tingkat kecamatan (KUA)	5.637	lok	Rp	3.000.000	Rp	16.911.000.000	Rp	16.911.000.000
	<b>19 Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji :</b>					<b>Rp</b>	<b>4.826.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>4.826.000.000</b>
	a Dalam negeri	1	pkt	Rp	2.000.000.000	Rp	2.000.000.000	Rp	2.000.000.000
	b Luar negeri	1	pkt	Rp	2.826.000.000	Rp	2.826.000.000	Rp	2.826.000.000
	<b>20 Asuransi jamaah haji</b>	<b>194.000</b>	<b>org</b>	<b>Rp</b>	<b>100.000</b>	<b>Rp</b>	<b>19.400.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>19.400.000.000</b>
	Total (A + B + C + D)								1.009.170.987.743
<b>E</b>	<b>SAFEGUARDING DAN CONTIGENCY</b>							<b>Rp</b>	<b>5.139.849.211</b>
<b>F</b>	<b>Safeguarding/contingency (ex direct cost)</b>	<b>194.000</b>	<b>org</b>	<b>USD</b>	<b>10</b>	<b>USD</b>	<b>1.940.000</b>	<b>Rp</b>	<b>18.042.000.000</b>
	TOTAL INDIRECT COST								Rp 1.032.352.836.954
<b>G</b>	<b>Komponen Kementerian Kesehatan</b>							<b>Rp</b>	<b>18.798.854.500</b>
	TOTAL INDIRECT COST								Rp 1.051.151.691.454
	<b>TOTAL INDIRECT COST TERDIRI DARI :</b>							<b>USD</b>	<b>3.628.371</b>
								<b>SAR</b>	<b>241.513.555</b>
								<b>Rp</b>	<b>413.623.950.704</b>
	<b>TOTAL KESELURUHAN INDIRECT COST</b>							<b>Rp</b>	<b>1.051.151.691.454</b>

\*) harga tiket rata-rata USD.1,720

\*\*) seluruh pembayaran dengan Riyals/US Dollar dalam indirect cost dihitung berdasarkan kurs pada saat transaksi pengiriman ke Arab Saudi dan penerbangan

**Tabel 3. Kertas Kerja Laporan Aktivitas Keuangan  
Periode tanggal 1 Maret 2010 s.d 31 Desember 2010**

<b>AKUN</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>PENDAPATAN BPIH BIASA</b>		
311 1101	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Aceh	115.122.159.572
311 1102	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Medan	236.354.282.470
311 1103	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Batam	298.190.597.242
311 1104	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Padang	221.263.985.746
311 1105	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Palembang	219.610.549.485
311 1106	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Jakarta	692.215.327.686
311 1107	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Bekasi	1.170.732.128.148
311 1108	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Solo	987.897.058.529
311 1109	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Surabaya	1.240.295.920.206
311 1110	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Banjarmasin	163.717.078.671
311 1111	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Balikpapan	173.629.468.422
311 1112	Pendapatan BPIH Biasa - Emb. Makassar	486.863.520.281
311 2101	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Aceh	(1.706.438.092)
311 2102	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Medan	(2.164.795.930)
311 2103	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Batam	(2.163.548.772)
311 2104	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Padang	(2.074.467.317)
311 2105	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Palembang	(1.541.415.533)
311 2106	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Jakarta Pondok Gede	(10.589.582.459)
311 2107	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Jakarta Bekasi	(39.355.665.935)
311 2108	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Solo	(6.284.078.921)
311 2109	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Surabaya	(9.303.937.523)
311 2111	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Banjarmasin	(932.657.616)
311 2112	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Balikpapan	(1.601.188.764)
311 2113	Retur Pendapatan BPIH Biasa-Emb Makassar	(3.674.417.960)
311 3101	Mutasi BPIH - In	84.460.746
311 3102	Mutasi BPIH - Out	(67.886.193)
<b>Jumlah Pendapatan BPIH Biasa</b>		<b>5.924.516.456.189</b>
<b>PENDAPATAN BPIH KHUSUS</b>		
312 1101	Pendapatan BPIH - Khusus	75.222.519.276
312 2101	Retur Pendapatan BPIH Khusus - Jemaah	(314.340.697)
312 2102	Retur Pendapatan BPIH Khusus - PIHK	(1.852.358.315)
<b>Jumlah Pendapatan BPIH Khusus</b>		<b>73.055.820.264</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>		
391 1101	Pendapatan Jasa Giro-USD	2.419.162.296
391 1102	Pendapatan Jasa Giro - IDR	2.251.731.635
<b>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Keuangan</b>		<b>4.670.893.931</b>
<b>PENDAPATAN LAIN</b>		
392 2101	Pendapatan Lain Arab Saudi	133.210.861
392 2102	Pendapatan Lain-Pusat	16.534.881.722
392 2103	Pendapatan lain - adm. pengembalian set.lunas	35.667.920
392 2104	Pendapatan lain - kelebihan setoran lunas	(7.359.283)
392 2201	Pendapatan Surplus Asuransi	822.530.224
392 2401	Pendapatan - Pengelolaan Setoran Awal	1.045.948.858.815
392 2501	Pendapatan Selisih Kurs	12.509.602.778
	Pendapatan Lain-Saldo Awal Kas & Bank Kanwil	1.212.486.267
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>		<b>1.077.189.879.304</b>
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>		<b>1.081.860.773.235</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>7.079.433.049.688</b>

AKUN	KETERANGAN	JUMLAH
<b>BEBAN</b>		
<b>BEBAN OPERASIONAL ARAB SAUDI</b>		
<b>Biaya Langsung Jamaah</b>		
<b>Maslahat Ammah</b>		
	Pelayanan Muassasah	159.191.021.086
	Kemah Arafah-Mina	156.961.030.611
<b>Jumlah Maslahat Ammah</b>		<b>316.152.051.697</b>
<b>Akomodasi</b>		
	Sewa pemondokan Makkah	1.352.738.410.534
	Sewa pemondokan Madinah	282.080.276.625
	Sewa Hotel Transito di Jeddah	33.350.110.991
	Biaya selisih sewa pemondokan di Makkah	141.873.232.283
	Biaya selisih distribusi Makkah	7.790.688.307
	Sewa cadangan pemondokan Makkah	13.542.952.620
<b>Jumlah Akomodasi</b>		<b>1.831.375.671.360</b>
<b>Konsumsi</b>		
	Makan Jemaah di Madinah	66.823.100.778
	Makan masa kedatangan & kepulangan di Bandara	5.327.475.355
	Makan di tempat transit Transito Jeddah	-
	Makan masa Arafah-Mina	129.007.353.272
	Jemaah sesat, pasien dan safari Wukuf	719.485.203
<b>Jumlah Konsumsi</b>		<b>201.877.414.608</b>
<b>Angkutan Darat (Naqabah)</b>		
	Angkutan Madinatul Hujjaj - Airport KAIA Jeddah	204.448.693.950
	Bongkar muat barang di Jeddah dan Madinah	6.926.804.279
	Angkutan dr pondokan ke Masj.Haram Mkh	19.140.107.912
<b>Jumlah Angkutan Darat (Naqabah)</b>		<b>230.515.606.141</b>
<b>Jumlah Biaya Langsung Jamaah</b>		<b>2.579.920.743.806</b>
<b>BIAYA TIDAK LANGSUNG JAMAAH</b>		
<b>Maslahat Ammah</b>		
	Pelayanan Muasassah Petugas Kloter	231.311.104
	Perkemahan Arafah-Mina Petugas Kloter	236.031.739
	Naqabah ptg kloter	(3.783.086)
	Angkutan ptg non kloter & temus	1.362.462.406
<b>Jumlah Maslahat Ammah</b>		<b>1.826.022.163</b>
<b>Akomodasi</b>		
	Sewa pemondokan petugas kloter di Makkah	13.238.531.309
	Sewa pemondokan petugas kloter di Madinah	579.122.366
	Sewa hotel transit petugas kloter di Jeddah	427.070.680
	Sewa Wisma di Jeddah	1.491.910.950
<b>Jumlah Beban Akomodasi</b>		<b>15.736.635.305</b>
<b>Naqabah-Petugas</b>		
	Sewa Angkutan Darat Biaya Perjalanan Jeddah-Makkah-Madinah dan Armina	950.732.376
	Pencetakan Stiker Kendaraan/Bus (Jeddah-Madinah-Makkah-Armina)	550.677.688
<b>Jumlah Naqabah Petugas</b>		<b>1.501.410.064</b>
<b>Konsumsi</b>		
<i>Petugas Non Kloter dan Temus</i>		
	Makan, snack ptgs non klote ,Temus	8.722.082.828
	Petugas non Kloter,Temus di Arafah & Mina	462.793.563
	Rapat Teknis Haji, Daker, Sektor	143.156.083
	Malam Ta'aruf	63.436.279
	Penataran Tenaga Musim ( Makan & snack )	18.934.350

AKUN	KETERANGAN	JUMLAH
	Makan tambahan selama operasional	269.782.686
	Tim dan tenaga harian penyewaan	313.146.798
	<b>Petugas Kloter</b>	
	Petugas kloter masa kedatangan&pemulangan	69.486.204
	Petugas kloter di Madinah	841.856.161
	Petugas kloter di Makkah	902.560.348
	Petugas kloter di Armina	1.632.973.918
	Petugas kloter di tempat transit	-
	<b>Jumlah Konsumsi</b>	<b>13.440.209.218</b>
	<b>Insentif/Honorarium Petugas Operasional Haji</b>	
	Honor Tim dan tenaga harian pemondokan	3.856.985.693
	Honor Temus PPIH Arab Saudi	33.615.805.108
	Tenaga Honorer kantor Misi Haji	1.377.562.061
	Tenaga kebersihan, catering dan lain-lain	817.248.619
	<b>Jumlah Insentif/Honorarium Petugas Operasional Haji</b>	<b>39.667.601.481</b>
	<b>Administrasi dan perlengkapan operasional kantor</b>	
	Sarana Administrasi dan perkantoran	428.568.827
	Penyu. pedoman petunjuk teknis, naskah	2.128.419
	Perjalanan dinas dan rapat Koordinasi	165.666.711
	Pindahan Ptg L & kubikasi barang pindahan	97.444.296
	<b>Jumlah Administrasi dan perlengkapan operasional kantor</b>	<b>693.808.253</b>
	<b>Pemeliharaan dan langganan daya dan jasa</b>	
	Langganan daya dan jasa	1.413.058.189
	Pemeliharaan ktr misi haji ,Jeddh,Makkah & Mdh	1.087.885.745
	Pemeliharaan dan operasional kendaraan	1.150.501.488
	<b>Jumlah Pemeliharaan dan langganan daya dan jasa</b>	<b>3.651.445.422</b>
	<b>Media Centre Haji</b>	
	Sarana ,prasarana Media Center	166.106.520
	Penyewaan studio mini di Makkah	95.342.720
	Operasional MCH	63.623.155
	<b>Jumlah Media Centre Haji</b>	<b>325.072.395</b>
	<b>Sewa kantor,gedung dan tempat pelayanan jamaah</b>	
	Sewa kantor Sektor di Makkah	5.522.646.669
	Sewa kantor Sektor di Madinah	544.184.618
	Kantor Missi Haji di Jeddah	1.626.728.400
	Kantor Daker di Makkah ( I , II & gudang )	12.778.089.562
	Kantor Daker di Madinah	5.024.185.600
	Kantor Daker Jeddah di Arport	1.596.497.501
	Gudang penyimpanan kendaraan di M. Hujjaj	-
	Gudang penyimpanan inventaris di M. Hujjaj	67.075.788
	Pool bengkel kendaraan di Rowes	99.540.400
	Posko dan kemah missi haji di Arafah	783.770.994
	Posko dan kemah missi haji di Mina	288.140.160
	Posko pelayanan di Muzdalifah	-
	<b>Jumlah Sewa kantor,gedung dan tempat pelayanan jamaah</b>	<b>28.330.859.692</b>
	<b>Biaya Penunjang Operasional</b>	
	Pakaian seragam Temus dan TUH	384.351.806
	Badal Haji	533.080.450
	Pely. keprotokolan, Delegasi Misi Haji	2.463.174.870
	Biaya ID card, stiker kendaraan	244.186.989
	Biaya PJ & Pengelolaan keuangan	93.109.909
	Pemulangan jamaah sakit	322.210.312

(Sambungan Tabel 3)

AKUN	KETERANGAN	JUMLAH
	pengadaan laohah stiker pemondokan	274.684.422
	Biaya lawyer di Arab Saudi	361.993.040
	Biaya selisih Kurs	21.722.770.698
	Biaya Lain-Lain	285.631.468
<b>Jumlah Biaya Penunjang Operasional</b>		<b>26.685.193.964</b>
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung Jamaah</b>		<b>131.858.257.957</b>
<b>Jumlah Biaya Arab Saudi</b>		<b>2.711.779.001.763</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL DALAM NEGERI</b>		
<b>Beban Penerbangan</b>		
411 1101	Beban Penerbangan Embarkasi Aceh	56.488.272.208
411 1102	Beban Penerbangan Embarkasi Medan	116.447.887.381
411 1103	Beban Penerbangan Embarkasi Batam	151.095.674.861
411 1104	Beban Penerbangan Embarkasi Padang	110.482.892.262
411 1105	Beban Penerbangan Embarkasi Palembang	111.732.085.907
411 1106	Beban Penerbangan Embarkasi Jakarta	359.955.497.062
411 1107	Beban Penerbangan Embarkasi Bekasi	585.557.889.662
411 1108	Beban Penerbangan Embarkasi Solo	509.519.039.364
411 1109	Beban Penerbangan Embarkasi Surabaya	654.503.852.335
411 1110	Beban Penerbangan Embarkasi Banjarmasin	87.232.149.423
411 1111	Beban Penerbangan Embarkasi Balikpapan	92.760.853.619
411 1112	Beban Penerbangan Embarkasi Makassar	263.000.950.448
<b>Jumlah Beban Penerbangan</b>		<b>3.098.777.044.532</b>
<b>Beban Uang Saku</b>		
412 1101	Beban Uang Saku Embarkasi Aceh	14.912.773.796
412 1102	Beban Uang Saku Embarkasi Medan	30.020.132.012
412 1103	Beban Uang Saku Embarkasi Batam	36.348.578.168
412 1104	Beban Uang Saku Embarkasi Padang	27.635.365.841
412 1105	Beban Uang Saku Embarkasi Palembang	27.163.419.776
412 1106	Beban Uang Saku Embarkasi Jakarta	83.795.272.940
412 1107	Beban Uang Saku Embarkasi Bekasi	136.981.336.191
412 1108	Beban Uang Saku Embarkasi Solo	120.677.390.162
412 1109	Beban Uang Saku Embarkasi Surabaya	130.423.813.032
412 1110	Beban Uang Saku Embarkasi Banjarmasin	19.509.767.547
412 1111	Beban Uang Saku Embarkasi Balikpapan	20.206.001.539
412 1112	Beban Uang Saku Embarkasi Makassar	53.351.503.283
412 1113	Beban uang saku embarkasi Mataram	16.903.837.448
412 1114	Beban uang saku embarkasi Gorontalo	3.516.022.783
<b>Jumlah Beban Uang Saku</b>		<b>721.445.214.518</b>
<b>Beban Operasional - Indonesia</b>		
<b>Perbekalan</b>		
414 3110	Paspor	53.799.872.856
414 3301	Buku Pedoman	457.092.000
414 3401	asuransi	21.982.144.000
423 3101	Paspor & Biaya Penyelesaian	14.725.392.752
423 3201	Identitas	2.744.926.650
<b>Jumlah Beban Perbekalan</b>		<b>93.709.428.258</b>
<b>ATK &amp; Peralatan Kantor</b>		
423 4101	ATK	369.503.390
423 4102	Peralatan Kantor	610.759.950
423 4103	Barang Cetak	3.381.501.917
423 4105	Teknologi Informasi	52.969.014.503
<b>Jumlah Beban ATK &amp; Peralatan Kantor</b>		<b>57.330.779.760</b>

AKUN	KETERANGAN	JUMLAH
<b>Konsumsi</b>		
423 5101	Konsumsi Jemaah - Emb. Aceh	288.828.000
423 5102	Konsumsi Jemaah - Emb. Medan	479.021.370
423 5103	Konsumsi Jemaah - Emb. Batam	743.850.000
423 5104	Konsumsi Jemaah - Emb. Padang	546.118.848
423 5105	Konsumsi Jemaah - Emb. Palembang	435.138.000
423 5106	Konsumsi Jemaah - Emb. Jakarta Pd. Gede	1.473.454.450
423 5107	Konsumsi Jemaah - Emb. Jakarta Bekasi	2.110.581.250
423 5108	Konsumsi Jemaah - Emb. Solo	2.369.569.000
423 5109	Konsumsi Jemaah - Emb. Surabaya	2.054.245.000
423 5110	Konsumsi Jemaah - Emb. Mataram	331.848.000
423 5111	Konsumsi Jemaah - Emb. Banjarmasin	384.515.000
423 5112	Konsumsi Jemaah - Emb. Balikpapan	422.325.000
423 5113	Konsumsi Jemaah - Emb. Makassar	1.085.716.577
423 5114	Konsumsi Jemaah - Emb. Gorontalo	80.740.000
423 5201	Konsumsi Petugas Embarkasi	10.199.006.670
423 5202	Konsumsi Petugas Kloter	125.302.854
<b>Jumlah Konsumsi</b>		<b>23.130.260.019</b>
<b>Operasional Kantor</b>		
423 1101	Beban Pegawai	274.072.400
423 1102	Beban Perjalanan Dinas	4.264.448.500
423 1103	Langganan daya dan jasa	634.239.135
423 1104	Rapat-rapat Pegawai	835.277.100
	Operasional Propinsi	8.165.895.409
	Operasional Embarkasi	13.683.519.603
	Operasional Kabupaten/Kota	2.225.000.000
	Operasional KUA	15.840.000.000
	Biaya Operasional - Tahun 1430H	284.780.610
<b>Jumlah Beban Operasional Kantor</b>		<b>46.207.232.757</b>
<b>Pembinaan dan Bimbingan Jemaah dan Petugas Haji</b>		
423 2101	Pembinaan	1.060.436.000
423 2103	Pelatihan	2.891.487.600
	TOT KUA Propinsi	2.186.182.500
	Biaya Rekrutmen	714.178.743
	Pelatihan Petugas Haji	3.847.918.550
	Pengadaan Seragam Petugas	541.963.904
	Pemantapan Petugas Karu dan Karom	2.645.718.000
	Biaya Penyelenggaraan Manasik	57.644.631.998
<b>Jumlah Beban Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan Manasik</b>		<b>71.532.517.295</b>
<b>Pemeliharaan</b>		
423 7101	Pemeliharaan Asrama Haji	21.249.905.452
423 7102	Pemeliharaan Kendaraan	
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>		<b>21.249.905.452</b>
<b>Passenger Service Charge</b>		
414 8101	Passenger Service Charge-emb Aceh	204.700.000
414 8102	Passenger Service Charge-Emb Medan	411.200.000
414 8103	Passenger Service Charge-Emb Batam	995.700.000
414 8104	Passenger Service Charge-Emb Padang	378.950.000
414 8105	Passenger Service Charge-Emb Palembang	372.450.000
414 8106	Passenger Service Charge-Emb Jakarta Pd. Gede	3.110.950.000
414 8108	Passenger Service Charge-Emb Solo	1.652.050.000
414 8109	Passenger Service Charge-Emb Surabaya	1.767.200.000

(Sambungan Tabel 3)

<b>AKUN</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
414 8110	Passenger Service Charge-Emb Mataram	216.800.000
414 8111	Passenger Service Charge-Emb Banjarmasin	370.200.000
414 8112	Passenger Service Charge-Emb Balikpapan	277.000.000
414 8113	Passenger Service Charge-Emb Makassar	772.550.000
<b>Jumlah Beban Passenger Service Charge</b>		<b>10.529.750.000</b>
<b>Beban Operasional Indonesia Lainnya</b>		
423 9101	Beban Administrasi Bank	4.540.408.532
422 9103	Pajak Jasa Giro - IDR	-
423 9102	Pajak Jasa giro	735.901.391
423 9103	Beban Lainnya	828.322.462
423 9104	Penyelenggaraan Qur'ah	532.232.000
423 9105	Jasa Konsultan dan Lawyer	2.544.525.266
423 9106	Image Building	9.878.229.836
423 9107	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan BPIH	2.189.639.260
423 9108	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan	1.480.803.630
423 9109	Transportasi Udara	148.484.800
423 9112	Media Center Haji Dalam Negeri	1.621.469.650
423 9113	Operasional Penyelenggaraan Haji	1.525.762.235
423 9114	Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji	733.386.000
423 9115	Penyelenggaraan BPIH Khusus	2.780.118.000
423 9117	Pertemuan silaturahmi antara Menag dengan duta besar	75.260.000
	Beban Selisih Kurs	42.140.677.846
	Safeguarding	3.211.765.000
423 9190	Beban Operasional Indonesia - Lainnya	14.419.937.246
<b>Jumlah Operasional Indonesia Lainnya</b>		<b>89.386.923.154</b>
<b>Jumlah Beban Operasional - Indonesia</b>		<b>413.076.796.695</b>
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL - DALAM NEGERI</b>		<b>4.233.299.055.745</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>6.945.078.057.508</b>
<b>Efisiensi - Pusat dan Dearah</b>		<b>134.354.992.180</b>



**TABEL 4. Laporan Aktivitas Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1431H/2010M**

Uraian	1431H/2010M Audited	1430H/2009M Audited
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>Pendapatan BPIH</b>		
Setoran BPIH Biasa	5.924.516.456.189	6.584.498.668.400
Setoran BPIH Khusus	73.055.820.264	74.054.856.448
<b>Jumlah Pendapatan BPIH</b>	<b>5.997.572.276.453</b>	<b>6.658.553.524.848</b>
<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
Pendapatan Lain-lain	1.081.860.773.235	771.012.635.777
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.081.860.773.235</b>	<b>771.012.635.777</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.079.433.049.688</b>	<b>7.429.566.160.625</b>
<b>BEBAN</b>		
<b>Beban Penerbangan Haji</b>	<b>3.098.777.044.532</b>	<b>3.245.940.098.069</b>
<b>Beban Living Cost</b>	<b>721.445.214.518</b>	<b>732.272.432.367</b>
<b>Beban Operasional Arab Saudi</b>		
Maslahat ammah (general service)	317.978.073.860	306.760.912.864
Akomodasi	1.847.112.306.665	1.754.982.874.841
Konsumsi jamaah dan petugas	215.317.623.826	117.005.313.869
Angkutan darat (naqobah)	232.017.016.205	246.885.725.362
Sewa kantor, Wisma, pemeliharaan	32.307.377.509	6.279.732.765
Beban operasional lainnya	67.046.603.698	117.686.016.964
<b>Jumlah Beban Operasional Arab Saudi</b>	<b>2.711.779.001.763</b>	<b>2.549.600.576.665</b>
<b>Beban Operasional Dalam Negeri</b>		
Konsumsi Jamaah dan Petugas	23.130.260.019	23.845.733.241
Akomodasi	-	16.532.365.000
Perbekalan Jamaah dan Petugas	93.709.428.258	98.741.256.890
ATK dan Peralatan Kantor	4.361.765.257	3.578.717.483
Operasional Pusat, Kanwil dan Embarkasi	46.207.232.757	32.657.529.772
Pemeliharaan	74.218.919.955	57.993.063.414
Pembinaan, Penyuluhan & Pelatihan	71.532.517.295	83.811.708.926
Passenger Service Charge	10.529.750.000	9.467.250.000
Beban Operasional Dalam Negeri Lainnya	89.386.923.154	589.941.271.597
<b>Jumlah Beban Operasional Dalam Negeri</b>	<b>413.076.796.695</b>	<b>916.568.896.323</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>6.945.078.057.508</b>	<b>7.444.382.003.424</b>
<b>Hasil Efisiensi BPIH Tahun Berjalan</b>	<b>134.354.992.180</b>	<b>(14.815.842.799)</b>

**Tabel 5. Beban Tenaga Kerja Tidak Langsung**

No.	Tahapan	Satuan	Jumlah
<b>1</b>	<b>Tahap pendaftaran</b>		<b>Rp 45.000.000</b>
	Petugas bagian pendaftaran (pegawai)	2 org x Rp 1.875.000 12 bulan	Rp 45.000.000
<b>2</b>	<b>Tahap persiapan</b>		<b>Rp 810.000.000</b>
1	Temus di kedutaan Arab Saudi (bagian penghubung dan pencetakan visa)	50 org x Rp 1.800.000 5 bulan	Rp 450.000.000
2	Temus di subdit dokumen dan perlengkapan haji (bagian scanning yang terdiri dari pemaduan data dan request visa)	40 org x Rp 1.800.000 5 bulan	Rp 360.000.000
<b>3</b>	<b>Tahap keberangkatan di embarkasi Jakarta</b>		<b>Rp 451.991.750</b>
1	Honorarium pembantu PPIH	156 org x Rp 1.800.000 1 kegiatan	Rp 280.800.000
2	Uang makan pembantu PPIH	156 org x Rp 1.050.000 1 kegiatan	Rp 163.800.000
3	Honor tim pengadaan catering	1 kegiatan	Rp 7.391.750
<b>4</b>	<b>Tahap pelaksanaan</b>		<b>Rp 33.397.700.000</b>
1	Uang harian temus TUH Jeddah	80 org x Rp 770.000 76 hari	Rp 4.681.600.000
2	Uang harian temus daker Jeddah	85 org x Rp 770.000 76 hari	Rp 4.974.200.000
3	Uang harian temus daker Madinah	90 org x Rp 770.000 76 hari	Rp 5.266.800.000
4	Uang harian temus daker Makkah	305 org x Rp 770.000 66 hari	Rp 15.500.100.000
5	Uang harian temus kesehatan Jeddah	2 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 70.000.000
6	Uang harian pengemudi ambulans di Jeddah	5 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 175.000.000
7	Uang harian petugas kebersihan di Jeddah	2 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 70.000.000
8	Uang harian temus kesehatan Madinah	6 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 210.000.000
9	Uang harian pengemudi ambulans di Madinah	11 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 385.000.000
10	Uang harian petugas kebersihan di Madinah	2 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 70.000.000
11	Uang harian temus kesehatan Makkah	16 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 560.000.000
12	Uang harian pengemudi ambulans di Makkah	38 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 1.330.000.000
13	Uang harian petugas kebersihan di Makkah	3 org x Rp 500.000 70 hari	Rp 105.000.000
<b>5</b>	<b>Tahap kepulangan di debarkasi Jakarta</b>		<b>Rp 356.250.000</b>
1	Honorarium pembantu PPIH	125 org x Rp 1.800.000 1 kegiatan	Rp 225.000.000
2	Uang makan pembantu PPIH	125 org x Rp 1.050.000 1 kegiatan	Rp 131.250.000
<b>JUMLAH BEBAN TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>Rp 35.060.941.750</b>

Tabel 6. Beban Konsumsi

No.	Tahapan	Satuan						Jumlah			
<b>A</b>	<b>Tahap keberangkatan di embarkasi Jakarta</b>							<b>Rp</b>	<b>324.470.000</b>		
1	Konsumsi petugas kloter	338	org	x	1	hr	x	Rp	75.000	Rp	25.350.000
2	Konsumsi PPIH	22	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	28.160.000
3	Konsumsi pembantu PPIH	156	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	199.680.000
4	Konsumsi dan snack untuk briefing petugas pembantu PPIH	156	org	x	1	kl	x	Rp	30.000	Rp	4.680.000
5	Konsumsi dan snack rapat persiapan pelepasan	20	org	x	1	kegiatan	x	Rp	40.000	Rp	800.000
6	Konsumsi dan snack pelepasan kloter pertama				1	pkt	x	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000
7	Bantuan untuk interdep keberangkatan										
	Petugas kesehatan	11	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	14.080.000
	Petugas bea cukai	4	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	5.120.000
	Petugas imigrasi	4	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	5.120.000
	Satgas pengamanan	17	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	21.760.000
	Kodam/koramil	4	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	5.120.000
	Petugas PLN	2	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	2.560.000
	Petugas pemadam kebakaran	2	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	2.560.000
	Petugas angkasa pura (x-ray)	4	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	5.120.000
	Itjen Kemenag	2	org	x	32	hr	x	Rp	40.000	Rp	2.560.000
<b>B</b>	<b>Tahap kedatangan di Arab Saudi</b>							<b>Rp</b>	<b>7.595.900</b>		
	Konsumsi petugas kloter	394	org	x	1	kl	x	SAR	8	Rp	7.595.900
<b>C</b>	<b>Tahap pelaksanaan</b>							<b>Rp</b>	<b>16.977.300.854</b>		
1	Konsumsi petugas kloter di Madinah	3.886	org	x	18	kl	x	SAR	8	Rp	1.348.522.829
2	Konsumsi petugas kloter di Armina	3.886	org	x	1	paket	x	SAR	215	Rp	2.013.419.501
3	Konsumsi petugas kloter di Makkah	3.886	org	x	69	kl	x	SAR	8	Rp	5.169.337.510
4	Konsumsi amirul hajj	10	org	x	180	kali	x	SAR	9	Rp	39.039.840
5	Konsumsi pengendali mutu	9	org	x	180	kali	x	SAR	9	Rp	35.135.856
6	Konsumsi petugas tata usaha haji (TUH) Jeddah	16	org	x	270	kali	x	SAR	9	Rp	93.695.616
7	Konsumsi petugas daker Jeddah	35	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	173.076.624
8	Konsumsi petugas sektor Jeddah	38	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	187.911.763
9	Konsumsi petugas daker Madinah	36	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	178.021.670
10	Konsumsi petugas sektor Madinah	88	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	435.164.083
11	Konsumsi petugas sektor Bir Ali & penimbangan barang	6	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	29.670.278
12	Konsumsi petugas terminal hijrah & check point	8	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	39.560.371
13	Konsumsi petugas daker Makkah	51	org	x	198	kali	x	SAR	9	Rp	219.013.502
14	Konsumsi petugas sektor Makkah	233	org	x	198	kali	x	SAR	9	Rp	1.000.591.099
15	Konsumsi petugas non kloter kesehatan Jeddah	25	org	x	225	kali	x	SAR	9	Rp	121.999.500
16	Konsumsi petugas non kloter kesehatan Madinah	85	org	x	225	kali	x	SAR	9	Rp	414.798.300
17	Konsumsi petugas non kloter kesehatan Makkah	200	org	x	198	kali	x	SAR	9	Rp	858.876.480
18	Konsumsi temus tata usaha haji (TUH) Jeddah	80	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	395.603.712
19	Konsumsi temus daker Jeddah	85	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	420.328.944
20	Konsumsi temus daker Madinah	90	org	x	228	kali	x	SAR	9	Rp	445.054.176
21	Konsumsi temus daker Makkah	305	org	x	198	kali	x	SAR	9	Rp	1.309.786.632

(Sambungan Tabel 6)

No.	Tahapan	Satuan					Jumlah		
22	Konsumsi temus kesehatan Jeddah	2 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		9.109.296
23	Konsumsi pengemudi ambulans di Jeddah	5 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		22.773.240
24	Konsumsi petugas kebersihan di Jeddah	2 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		9.109.296
25	Konsumsi temus kesehatan Madinah	6 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		27.327.888
26	Konsumsi pengemudi ambulans di Madinah	11 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		50.101.128
27	Konsumsi petugas kebersihan di Madinah	2 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		9.109.296
28	Konsumsi temus kesehatan Makkah	16 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		72.874.368
29	Konsumsi pengemudi ambulans di Makkah	38 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		173.076.624
30	Konsumsi petugas kebersihan di Makkah	3 org	x	210 kali	x	SAR	9 Rp		13.663.944
31	Konsumsi jamaah safari wukuf			900 org	x	SAR	9 Rp		19.519.920
32	Rapat Teknis Haji, Daker, Sektor			1 paket	x	Rp	143.156.083 Rp		143.156.083
33	Malam Ta'aruf			1 paket	x	Rp	63.436.279 Rp		63.436.279
34	Akomodasi orientasi temus di Arab Saudi	2 hr	x	645 org	x	Rp	330.000 Rp		425.700.000
35	Konsumsi orientasi temus di Arab Saudi	9 OK	x	645 org	x	Rp	50.000 Rp		290.250.000
36	Konsumsi Jamaah Sakit dan Sesat			1 pkt	x	Rp	719.485.203 Rp		719.485.203
<b>D</b>	<b>Tahap pemulangan di Arab Saudi</b>						<b>Rp</b>		<b>18.295.708</b>
1	Konsumsi petugas kloter di bandara	394 org	x	1 kl	x	SAR	8 Rp		7.595.900
2	Konsumsi petugas kloter di hotel transit	185 org	x	3 kl	x	SAR	8 Rp		10.699.808
<b>E</b>	<b>Tahap kepulangan di debarkasi Jakarta</b>						<b>Rp</b>		<b>277.350.000</b>
1	Konsumsi petugas kloter	338 org	x	1 hr	x	Rp	75.000 Rp		25.350.000
2	Konsumsi PPIH	22 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		28.160.000
3	Konsumsi pembantu PPIH	125 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		160.000.000
4	Konsumsi dan snack rapat persiapan kepulangan	15 org	x	1 kegiatan	x	Rp	40.000 Rp		600.000
5	Konsumsi dan snack untuk penyambutan kloter terakhir			1 pkt	x	Rp	1.800.000 Rp		1.800.000
6	Bantuan untuk interdep keberangkatan								
	Petugas kesehatan	11 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		14.080.000
	Petugas bea cukai	4 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		5.120.000
	Petugas imigrasi	4 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		5.120.000
	Satgas pengamanan	15 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		19.200.000
	Kodam/koramil	3 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		3.840.000
	Petugas PLN	2 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		2.560.000
	Petugas pemadam kebakaran	2 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		2.560.000
	Petugas angkasa pura (x-ray)	4 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		5.120.000
	Itjen Kemenag	2 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		2.560.000
	Petugas RRI	1 org	x	32 hr	x	Rp	40.000 Rp		1.280.000
<b>JUMLAH BEBAN KONSUMSI</b>							<b>Rp</b>		<b>17.605.012.461</b>

**Tabel 7. Beban Langganan Daya dan Jasa**

No.	Tahapan	Satuan	Jumlah
<b>A</b>	<b>Tahap pendaftaran</b>		<b>Rp 11.428.571</b>
	Kankemenag Kota Jakarta Pusat	Rp 240.000.000 ÷ 7 es.4 ÷ 3 Rp	11.428.571
<b>B</b>	<b>Tahap keberangkatan di embarkasi Jakarta</b>	<b>1 kegiatan x Rp 75.000.000</b>	<b>Rp 75.000.000</b>
<b>C</b>	<b>Tahap pelaksanaan</b>	<b>1 kegiatan x Rp 1.413.058.189</b>	<b>Rp 1.413.058.189</b>
<b>D</b>	<b>Tahap kepulangan di debarkasi Jakarta</b>	<b>1 kegiatan x Rp 75.000.000</b>	<b>Rp 75.000.000</b>
<b>JUMLAH BEBAN LANGGANAN DAYA DAN JASA</b>			<b>Rp 1.574.486.760</b>

**Tabel 8. Beban Transportasi**

No.	Tahapan	Satuan	Jumlah
<b>A</b>	<b>Tahap keberangkatan di embarkasi Jakarta</b>		<b>Rp 10.575.000</b>
1	BBM kendaraan operasional	1 paket x Rp 6.390.000	Rp 6.390.000
2	Tol kendaraan operasional	1 paket x Rp 1.820.000	Rp 1.820.000
3	Service dan penggantian sparepart mobil	1 paket x Rp 2.365.000	Rp 2.365.000
<b>B</b>	<b>Tahap pelaksanaan</b>		<b>Rp 302.807.042.990</b>
1	Transport penerbangan PP petugas non kloter - Kemenag	530 org x 1 paket x USD 1.691	Rp 8.099.230.510
2	Transport penerbangan PP petugas non kloter - Kemenkes	310 org x 1 paket x USD 1.691	Rp 4.737.285.770
3	Transport penerbangan PP petugas kloter	3.886 org x 1 paket x USD 1.691	Rp 59.384.169.362
4	Airport tax petugas kloter&non kloter di bandara selain Batam	4.623 org x 1 paket x Rp 50.000	Rp 231.150.000
5	Airport tax petugas kloter&non kloter di bandara Batam	103 org x 1 paket x Rp 100.000	Rp 10.300.000
6	Surcharge landing Madinah petugas non kloter - Kemenag	138 org x 1 paket x USD 50	Rp 62.355.300
7	Surcharge landing Madinah petugas non kloter - Kemenkes	85 org x 1 paket x USD 50	Rp 38.407.250
8	Surcharge landing Madinah petugas kloter	1.375 org x 1 paket x USD 50	Rp 621.293.750
9	Airport tax petugas di bandara KAAIA Jeddah/AMAA Madinah	4.726 org x 1 paket x USD 14	Rp 597.924.068
10	Biaya naqabah petugas kloter	3.886 org x 1 paket x SAR 435	Rp 4.073.662.712
11	Biaya naqabah petugas non kloter dan temus	1 paket Rp 1.362.462.406	Rp 1.362.462.406
12	Angkutan Madinatul Hujjaj - Airport Jeddah	1 paket Rp 204.448.693.950	Rp 204.448.693.950
13	Angkutan dr pondokan ke Masjidil Haram Makkah	1 paket Rp 19.140.107.912	Rp 19.140.107.912
<b>C</b>	<b>Tahap kepulangan di debarkasi Jakarta</b>		<b>Rp 13.739.000</b>
1	Pembelian BBM seksi kedatangan	1 paket x Rp 7.290.000	Rp 7.290.000
2	Tol kendaraan seksi kedatangan	1 paket x Rp 2.764.000	Rp 2.764.000
3	Service dan penggantian sparepart mobil operasional	1 paket x Rp 3.685.000	Rp 3.685.000
<b>JUMLAH BEBAN TRANSPORTASI</b>			<b>Rp 302.831.356.990</b>

**Tabel 9. Beban Sewa Pemandokan dan Perkantoran**

No.	Tahapan	Satuan						Jumlah			
<b>A</b>	<b>Tahap keberangkatan di embarkasi Jakarta</b>							<b>Rp</b>	<b>121.080.000</b>		
	Akomodasi petugas kloter	338	org	x	1	hr	x	Rp	60.000	Rp	20.280.000
1	Akomodasi petugas non kloter di masing-masing embarkasi keberangkatan	840		x	2	hr	x	Rp	60.000	Rp	100.800.000
<b>B</b>	<b>Tahap pelaksanaan</b>							<b>Rp</b>	<b>83.512.595.414</b>		
2	Akomodasi petugas kloter di Madinah	3.886	org	x	1	paket	x	SAR	600	Rp	5.618.845.120
3	Akomodasi petugas non kloter sektor di Madinah	102	org	x	76	hari	x	SAR	75	Rp	1.401.096.480
4	Kemah petugas kloter di Armina	3.886	org	x	1	paket	x	SAR	300	Rp	2.809.422.560
5	Akomodasi petugas kloter di Makkah	3.886	org	x	1	paket	x	SAR	3.022	Rp	28.300.249.921
6	Akomodasi petugas non kloter sektor di Makkah	233	org	x	66	hari	x	SAR	131	Rp	4.854.719.778
7	Sewa hotel transit petugas kloter di Jeddah	1.780	org	x	1	paket	x	SAR	80	Rp	343.165.013
8	Akomodasi petugas non kloter daker dan sektor di Jeddah	73	org	x	76	hari	x	SAR	80	Rp	1.069.595.221
9	Akomodasi petugas TUH Jeddah	16	org	x	90	hari	x	SAR	80	Rp	277.616.640
10	Akomodasi Amirul Hajj dan pengendali mutu	19	org	x	60	hari	x	SAR	95	Rp	260.988.560
11	Akomodasi Petugas non kloter Kesehatan Jeddah	25	org	x	76	hari	x	SAR	80	Rp	366.299.733
12	Akomodasi Petugas non kloter Kesehatan Madinah	85	org	x	76	hari	x	SAR	75	Rp	1.167.580.400
13	Akomodasi Petugas non kloter Kesehatan Makkah	200	org	x	66	hari	x	SAR	131	Rp	4.167.141.440
14	Sewa Wisma di Jeddah				1	paket	x	Rp	1.491.910.950	Rp	1.491.910.950
15	Sewa kantor TUH (Misi Haji Indonesia) dan daker di Jeddah				1	paket	x	Rp	3.223.225.901	Rp	3.223.225.901
16	Sewa kantor Sektor dan Daker di Makkah				1	paket	x	Rp	18.300.736.231	Rp	18.300.736.231
17	Sewa kantor Sektor dan Daker di Madinah				1	paket	x	Rp	5.568.370.218	Rp	5.568.370.218
18	Sewa gudang, Posko dan Pelayanan Armina				1	paket	x	Rp	1.238.527.342	Rp	1.238.527.342
19	Pool bengkel kendaraan di Rowes				1	paket	x	Rp	99.540.400	Rp	99.540.400
20	Sewa gudang penyimpanan inventaris di Madinatul Hujaj Jeddah				1	paket	x	Rp	67.075.788	Rp	67.075.788
21	Sewa gudang obat di Jeddah				1	paket	x	Rp	250.000.000	Rp	250.000.000
22	Sarana administrasi perkantoran - Kementerian Agama				1	paket	x	Rp	428.568.827	Rp	428.568.827
23	Sarana administrasi perkantoran pelayanan kesehatan				1	paket	x	Rp	325.000.000	Rp	325.000.000
24	Sarana dan prasarana Media Center Haji (MCH) Arab Saudi				1	paket	x	Rp	166.106.520	Rp	166.106.520
25	Penyewaan studio mini di Makkah				1	paket	x	Rp	95.342.720	Rp	95.342.720
26	Sarana dan prasarana MCH dalam negeri				1	paket	x	Rp	1.621.469.650	Rp	1.621.469.650
<b>C</b>	<b>Tahap kepulangan di debarkasi Jakarta</b>							<b>Rp</b>	<b>20.280.000</b>		
	Akomodasi petugas kloter	338	org	x	1	hr	x	Rp	60.000	Rp	20.280.000
<b>JUMLAH SEWA PEMONDOKAN DAN PERKANTORAN</b>									<b>Rp</b>	<b>83.653.955.414</b>	

**Tabel 10. Beban Pemeriksaan Kesehatan**

No.	Tahapan	Satuan						Jumlah			
	<b>Tahap persiapan</b>							<b>Rp</b>	<b>1.228.760.000</b>		
1	Pemeriksaan laboratorium petugas kloter	3.886	org	x	1	paket	x	Rp	160.000	Rp	621.760.000
2	Pemeriksaan laboratorium petugas non kloter	840	org	x	1	paket	x	Rp	160.000	Rp	134.400.000
3	Imunisasi meningitis dan kartu ICV bagi petugas kloter	3.886	org	x	1	paket	x	Rp	100.000	Rp	388.600.000
4	Imunisasi meningitis dan kartu ICV bagi petugas non kloter	840	org	x	1	paket	x	Rp	100.000	Rp	84.000.000
<b>JUMLAH BEBAN PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>									<b>Rp</b>	<b>1.228.760.000</b>	

**Tabel 11. Beban Perbekalan Perjalanan Haji**

No.	Tahapan	Satuan						Jumlah			
<b>A</b>	<b>Tahap persiapan</b>							<b>Rp</b>	<b>2.052.738.100</b>		
1	Paspor	4.726	org	x	1	paket	x	Rp	255.000	Rp	1.205.130.000
2	Sampul paspor dan materai	4.726	org	x	1	paket	x	Rp	25.000	Rp	118.150.000
3	Pengurusan visa	4.726	org	x	1	paket	x	Rp	30.000	Rp	141.780.000
4	DAPIH	4.726	org	x	1	paket	x	Rp	4.500	Rp	21.267.000
5	Gelang identitas	4.726	org	x	1	paket	x	Rp	7.000	Rp	33.082.000
6	Buku paket manasik dan biaya pengiriman 10%	4.726	org	x	1	paket	x	Rp	9.350	Rp	44.188.100
7	Buku panduan berhaji sehat	4.726	org	x	1	paket	x	Rp	3.500	Rp	16.541.000
8	Asuransi	4.726	org	x	1	paket	x	Rp	100.000	Rp	472.600.000
<b>JUMLAH BEBAN PERBEKALAN PERJALANAN HAJI</b>								<b>Rp</b>	<b>2.052.738.100</b>		

**Tabel 12. Beban Perlengkapan Penyelenggaraan Haji**

No.	Tahapan	Satuan						Jumlah			
<b>A</b>	<b>Tahap keberangkatan di embarkasi Jakarta</b>							<b>Rp</b>	<b>110.283.350</b>		
1	Pengadaan seragam untuk petugas PPIH				22	org	x	Rp	175.000	Rp	3.850.000
2	Pengadaan seragam untuk pembantu PPIH				156	org	x	Rp	120.000	Rp	18.720.000
3	Pengadaan ID card petugas, dan jamaah				1	paket	x	Rp	21.445.000	Rp	21.445.000
4	Pengadaan ID card bandara Soetta - keberangkatan				1	paket	x	Rp	2.121.000	Rp	2.121.000
5	Pengadaan spanduk banner				1	paket	x	Rp	700.000	Rp	700.000
6	Kegiatan kehumasan untuk pengukuhan				1	paket	x	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000
7	Kegiatan kehumasan untuk pelepasan				1	paket	x	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000
8	Pengadaan multimedia dan tiang pembatas				1	paket	x	Rp	53.339.000	Rp	53.339.000
9	Pembelian koran untuk bahan kliping				1	paket	x	Rp	255.000	Rp	255.000
10	Penjilidan kliping tentang operasional haji				1	paket	x	Rp	2.353.350	Rp	2.353.350
<b>B</b>	<b>Tahap pelaksanaan</b>							<b>Rp</b>	<b>4.624.283.739</b>		
1	Pencetakan stiker kendaraan/bus (Jeddah-Madinah-Makkah-Armina)				1	paket	x	Rp	550.677.688	Rp	550.677.688
2	Pakaian seragam petugas non kloter	840	org		2	stel	x	Rp	350.000	Rp	588.000.000
3	Pakaian seragam temus	645	org		2	stel	x	SAR	130	Rp	404.134.640
4	Pakaian seragam petugas kloter	3.886	org		2	stel	x	Rp	250.000	Rp	1.943.000.000
5	Pengadaan jaket petugas non kloter				840	org	x	Rp	225.000	Rp	189.000.000
6	Pengadaan koper petugas non kloter				840	org	x	Rp	350.000	Rp	294.000.000
7	Pengadaan rompi petugas non kloter				840	org	x	Rp	140.000	Rp	117.600.000
8	Pengadaan jas amirul haji dan pengendali mutu				19	org	x	Rp	1.000.000	Rp	19.000.000
9	Biaya ID card kendaraan				1	paket	x	Rp	244.186.989	Rp	244.186.989
10	Pengadaan stiker pemondokan				1	paket	x	Rp	274.684.422	Rp	274.684.422
<b>C</b>	<b>Tahap kepulangan di debarkasi Jakarta</b>							<b>Rp</b>	<b>13.704.000</b>		
1	Pengadaan ID card bandara soetta - pemulangan				1	paket	x	Rp	4.404.000	Rp	4.404.000
2	Kegiatan kehumasan untuk penyambutan kloter				1	paket	x	Rp	5.600.000	Rp	5.600.000
3	Kegiatan kehumasan untuk penyambutan kloter akhir				1	paket	x	Rp	3.700.000	Rp	3.700.000
<b>JUMLAH BEBAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN HAJI</b>								<b>Rp</b>	<b>4.748.271.089</b>		

**Tabel 13. Beban Operasional Lainnya**

No.	Tahapan	Satuan					Jumlah	
<b>A</b>	<b>Tahap keberangkatan di embarkasi Jakarta</b>						<b>Rp</b>	<b>56.724.776</b>
1	ATK untuk operasional embarkasi	1	paket	x	Rp	32.247.276	Rp 32.247.276	
2	Pengadaan barang kebutuhan dapur untuk PPIH	1	paket	x	Rp	1.131.500	Rp 1.131.500	
3	Pengadaan air galon dan dapur PPIH	1	paket	x	Rp	1.346.000	Rp 1.346.000	
4	Rekrutment petugas kloter	1	paket	x	Rp	22.000.000	Rp 22.000.000	
<b>B</b>	<b>Tahap pelaksanaan</b>						<b>Rp</b>	<b>32.526.262.938</b>
1	Badal Haji	1	paket	x	Rp	533.080.450	Rp 533.080.450	
2	Pelatihan petugas kloter dan non kloter	4.726	org	x	10	hari	x Rp 400.000 Rp 18.904.000.000	
3	Operasional Media Center Haji	1	paket	x	Rp	63.623.155	Rp 63.623.155	
4	Pemeliharaan kantor dan wisma	1	paket	x	Rp	1.087.885.745	Rp 1.087.885.745	
5	Pemeliharaan dan operasional kendaraan	1	paket	x	Rp	1.150.501.488	Rp 1.150.501.488	
6	Pelayanan bongkar muat dan angkutan barang	1	paket	x	Rp	6.926.804.279	Rp 6.926.804.279	
7	Jasa lawyer, notaris dan penterjemah resmi	1	paket	x	Rp	361.993.040	Rp 361.993.040	
8	Pelayanan muasassah dan maktab	4.726	orang	x	SAR	294	Rp 3.348.374.781	
12	Pengadaan aplikasi jasa konsultan qur'ah perumahan haji	1	paket	x	Rp	50.000.000	Rp 50.000.000	
13	Jasa konsultan aktuarial asuransi jiwa	1	paket	x	Rp	50.000.000	Rp 50.000.000	
14	Jasa konsultan hukum kontrak penerbangan	1	paket	x	Rp	50.000.000	Rp 50.000.000	
<b>C</b>	<b>Tahap kepulangan di debarkasi Jakarta</b>						<b>Rp</b>	<b>22.637.429</b>
1	ATK untuk operasional debarkasi	1	paket	x	Rp	20.159.929	Rp 20.159.929	
2	Pengadaan barang kebutuhan dapur untuk PPIH	1	paket	x	Rp	1.131.500	Rp 1.131.500	
3	Pengadaan air galon dan dapur PPIH	1	paket	x	Rp	1.346.000	Rp 1.346.000	
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>						<b>Rp</b>	<b>32.605.625.143</b>	



**Tabel 14. Perbandingan Indirect Cost Tahap Pendaftaran**

Biaya Tahap Pendaftaran						ABC Pemerintah	PT. Jasa Wisata Makmur	PT. Mideast Express	
1	Gaji Petugas bagian pendaftaran (pegawai)	2 org	x	12 bln	x Rp	1.875.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
2	Beban Langganan Daya dan Jasa Kankemenag Kota Jakarta Pusat	Rp 240.000.000	÷	7 es.4	÷	3	Rp 11.428.571	Rp 11.428.571	Rp 11.428.571
<b>Jumlah</b>							<b>Rp 56.428.571</b>	<b>Rp 56.428.571</b>	<b>Rp 56.428.571</b>

**Tabel 15. Perbandingan Indirect Cost Tahap Kedatangan/Pemulangan di Arab Saudi**

Biaya Tahap kedatangan/pemulangan di Arab Saudi						ABC Pemerintah	PT. Jasa Wisata Makmur	PT. Mideast Express	
1	Konsumsi petugas kloter di bandara kedatangan Arab Saudi	394 org	x	2 kl	x SAR	8	Rp 15.191.799	Rp 37.979.499	Rp 28.484.624
2	Konsumsi petugas kloter di hotel transit	185 org	x	3 kl	x SAR	8	Rp 10.699.808	Rp 26.749.520	Rp 20.062.140
<b>Jumlah</b>							<b>Rp 25.891.607</b>	<b>Rp 64.729.019</b>	<b>Rp 48.546.764</b>

**Tabel 16. Perbandingan Indirect Cost Tahap Keberangkatan/Kepulangan di Embarkasi/Debarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG)**

Biaya tahap keberangkatan/kepulangan di embarkasi/debarkasi Jakarta						ABC Pemerintah	PT. Jasa Wisata Makmur	PT. Mideast Express	
1	Honorarium pembantu PPIH (embarkasi)	156 org	x	1 keg	x Rp	1.800.000	Rp 280.800.000	Rp 280.800.000	Rp 280.800.000
2	Uang makan pembantu PPIH (embarkasi)	156 org	x	1 keg	x Rp	1.050.000	Rp 163.800.000	Rp 163.800.000	Rp 163.800.000
3	Honor tim pengadaan catering (embarkasi)			1 keg	x Rp	7.391.750	Rp 7.391.750	Rp 7.391.750	Rp 7.391.750
4	Honorarium pembantu PPIH (debarkasi)	125 org	x	1 keg	x Rp	1.800.000	Rp 225.000.000	Rp 225.000.000	Rp 225.000.000
5	Uang makan pembantu PPIH (debarkasi)	125 org	x	1 keg	x Rp	1.050.000	Rp 131.250.000	Rp 131.250.000	Rp 131.250.000
6	Konsumsi petugas kloter	338 org	x	2 hr	x Rp	75.000	Rp 50.700.000	Rp 50.700.000	Rp 50.700.000
7	Konsumsi PPIH	22 org	x	64 hr	x Rp	40.000	Rp 56.320.000	Rp 56.320.000	Rp 56.320.000
8	Konsumsi pembantu PPIH (embarkasi)	156 org	x	32 hr	x Rp	40.000	Rp 199.680.000	Rp 199.680.000	Rp 199.680.000
9	Konsumsi pembantu PPIH (debarkasi)	125 org	x	32 hr	x Rp	40.000	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
10	Konsumsi dan snack untuk briefing petugas pembantu PPIH	156 org	x	1 kl	x Rp	30.000	Rp 4.680.000	Rp 4.680.000	Rp 4.680.000
11	Konsumsi dan snack rapat persiapan pelepasan	20 org	x	1 keg	x Rp	40.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000
12	Konsumsi dan snack pelepasan kloter pertama			1 pkt	x Rp	1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
13	Konsumsi dan snack rapat persiapan kepulangan (debarkasi)	15 org	x	1 keg	x Rp	40.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000
14	Konsumsi Petugas kesehatan	11 org	x	64 hr	x Rp	40.000	Rp 28.160.000	Rp 28.160.000	Rp 28.160.000
15	Konsumsi Petugas bea cukai	4 org	x	64 hr	x Rp	40.000	Rp 10.240.000	Rp 10.240.000	Rp 10.240.000
16	Konsumsi Petugas imigrasi	4 org	x	64 hr	x Rp	40.000	Rp 10.240.000	Rp 10.240.000	Rp 10.240.000
17	Konsumsi Satgas pengamanan (embarkasi)	17 org	x	32 hr	x Rp	40.000	Rp 21.760.000	Rp 21.760.000	Rp 21.760.000
18	Konsumsi Satgas pengamanan (debarkasi)	15 org	x	32 hr	x Rp	40.000	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000
19	Konsumsi Kodam/koramil (embarkasi)	4 org	x	32 hr	x Rp	40.000	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000
20	Konsumsi Kodam/koramil (debarkasi)	3 org	x	32 hr	x Rp	40.000	Rp 3.840.000	Rp 3.840.000	Rp 3.840.000
21	Konsumsi Petugas PLN	2 org	x	64 hr	x Rp	40.000	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000
22	Konsumsi Petugas pemadam kebakaran	2 org	x	64 hr	x Rp	40.000	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000
23	Konsumsi Petugas angkasa pura (x-ray)	4 org	x	64 hr	x Rp	40.000	Rp 10.240.000	Rp 10.240.000	Rp 10.240.000
24	Konsumsi Itjen Kemenag	2 org	x	64 hr	x Rp	40.000	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000
25	Konsumsi Petugas RRI	1 org	x	32 hr	x Rp	40.000	Rp 1.280.000	Rp 1.280.000	Rp 1.280.000
26	Beban Langganan Daya dan Jasa di debarkasi Jakarta			1 keg	x Rp	75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
27	Beban Langganan Daya dan Jasa di embarkasi Jakarta			1 keg	x Rp	75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
28	BBM kendaraan operasional			1 pkt	x Rp	6.390.000	Rp 6.390.000	Rp 6.390.000	Rp 6.390.000
29	Tol kendaraan operasional			1 pkt	x Rp	1.820.000	Rp 1.820.000	Rp 1.820.000	Rp 1.820.000
30	Service dan penggantian sparepart mobil			1 pkt	x Rp	2.365.000	Rp 2.365.000	Rp 2.365.000	Rp 2.365.000
31	Pembelian BBM seksi kedatangan			1 pkt	x Rp	7.290.000	Rp 7.290.000	Rp 7.290.000	Rp 7.290.000
32	Tol kendaraan seksi kedatangan			1 pkt	x Rp	2.764.000	Rp 2.764.000	Rp 2.764.000	Rp 2.764.000
33	Service dan penggantian sparepart mobil operasional			1 pkt	x Rp	3.685.000	Rp 3.685.000	Rp 3.685.000	Rp 3.685.000
34	Akomodasi petugas kloter	338 org	x	2 hr	x Rp	60.000	Rp 40.560.000	Rp 40.560.000	Rp 40.560.000
35	Pengadaan seragam untuk petugas PPIH			22 org	x Rp	175.000	Rp 3.850.000	Rp 3.850.000	Rp 3.850.000
36	Pengadaan seragam untuk pembantu PPIH			156 org	x Rp	120.000	Rp 18.720.000	Rp 18.720.000	Rp 18.720.000
37	Pengadaan ID card petugas, dan jamaah			1 pkt	x Rp	21.445.000	Rp 21.445.000	Rp 21.445.000	Rp 21.445.000
38	Pengadaan ID card bandara Soetta - keberangkatan			1 pkt	x Rp	2.121.000	Rp 2.121.000	Rp 2.121.000	Rp 2.121.000
39	Pengadaan spanduk banner			1 pkt	x Rp	700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000
40	Kegiatan kehumasan untuk pengukuhan			1 pkt	x Rp	3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000

Estimasi perhitungan..., Leni Nopilia, FEUI, 2012

(Sambungan Tabel 16)

Biaya tahap keberangkatan dan kepulangan di embarkasi/debarkasi Jakarta						ABC Pemerintah	PT. Jasa Wisata Makmur	PT. Mideast Express			
41	Kegiatan kehumasan untuk pelepasan	1	pkt	x	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	
42	Pengadaan multimedia dan tiang pembatas	1	pkt	x	Rp	53.339.000	Rp	53.339.000	Rp	53.339.000	
43	Pembelian koran untuk bahan kliping	1	pkt	x	Rp	255.000	Rp	255.000	Rp	255.000	
44	Penjilidan kliping tentang operasional haji	1	pkt	x	Rp	2.353.350	Rp	2.353.350	Rp	2.353.350	
45	Pengadaan ID card bandara soetta - pemulangan	1	pkt	x	Rp	4.404.000	Rp	4.404.000	Rp	4.404.000	
46	Kegiatan kehumasan untuk penyambutan kloter	1	pkt	x	Rp	5.600.000	Rp	5.600.000	Rp	5.600.000	
47	Kegiatan kehumasan untuk penyambutan kloter akhir	1	pkt	x	Rp	3.700.000	Rp	3.700.000	Rp	3.700.000	
48	Konsumsi dan snack untuk penyambutan kloter terakhir	1	pkt	x	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	
49	ATK untuk operasional embarkasi	1	pkt	x	Rp	32.247.276	Rp	32.247.276	Rp	32.247.276	
50	Pengadaan barang kebutuhan dapur untuk PPIH	1	pkt	x	Rp	1.131.500	Rp	1.131.500	Rp	1.131.500	
51	Pengadaan air galon dan dapur PPIH	1	pkt	x	Rp	1.346.000	Rp	1.346.000	Rp	1.346.000	
52	Rekrutment petugas kloter	1	pkt	x	Rp	22.000.000	Rp	22.000.000	Rp	22.000.000	
53	ATK untuk operasional debarkasi	1	pkt	x	Rp	20.159.929	Rp	20.159.929	Rp	20.159.929	
54	Pengadaan barang kebutuhan dapur untuk PPIH	1	pkt	x	Rp	1.131.500	Rp	1.131.500	Rp	1.131.500	
55	Pengadaan air galon dan dapur PPIH	1	pkt	x	Rp	1.346.000	Rp	1.346.000	Rp	1.346.000	
56	Akomodasi petugas non kloter di masing-masing embarkasi keberangkatan	840		x	2	hr	x	Rp	60.000	Rp	100.800.000
<b>Jumlah</b>						<b>Rp</b>	<b>1.929.085.305</b>	<b>Rp</b>	<b>1.929.085.305</b>	<b>Rp</b>	<b>1.929.085.305</b>



**Tabel 17. Perbandingan Indirect Cost Tahap Persiapan dan Pelaksanaan**

Biaya tahap persiapan dan pelaksanaan						ABC Pemerintah	PT. Jasa Wisata Makmur	PT. Mideast Express	
1	Konsumsi petugas kloter di Madinah	3.886	org	x	18 kl x SAR	8	Rp 1.348.522.829	Rp 3.371.307.072	Rp 2.528.480.304
2	Konsumsi petugas kloter di Armina	3.886	org	x	1 pkt x SAR	215	Rp 2.013.419.501	Rp 2.013.419.501	Rp 2.013.419.501
3	Konsumsi petugas kloter di Makkah	3.886	org	x	69 kl x SAR	8	Rp 5.169.337.510	Rp 12.923.343.776	Rp 9.692.507.832
4	Konsumsi amirul haji	10	org	x	180 kali x SAR	9	Rp 39.039.840	Rp 86.755.200	Rp 65.066.400
5	Konsumsi pengendali mutu	9	org	x	180 kali x SAR	9	Rp 35.135.856	Rp 78.079.680	Rp 58.559.760
6	Konsumsi petugas tata usaha haji (TUH) Jeddah	16	org	x	270 kali x SAR	9	Rp 93.695.616	Rp 208.212.480	Rp 156.159.360
7	Konsumsi petugas daker Jeddah	35	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 173.076.624	Rp 384.614.720	Rp 288.461.040
8	Konsumsi petugas sektor Jeddah	38	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 187.911.763	Rp 417.581.696	Rp 313.186.272
9	Konsumsi petugas daker Madinah	36	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 178.021.670	Rp 395.603.712	Rp 296.702.784
10	Konsumsi petugas sektor Madinah	88	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 435.164.083	Rp 967.031.296	Rp 725.273.472
11	Konsumsi petugas sektor Bir Ali & penimbangan barang	6	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 29.670.278	Rp 65.933.952	Rp 49.450.464
12	Konsumsi petugas terminal hijrah & check point	8	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 39.560.371	Rp 87.911.936	Rp 65.933.952
13	Konsumsi petugas daker Makkah	51	org	x	198 kali x SAR	9	Rp 219.013.502	Rp 486.696.672	Rp 365.022.504
14	Konsumsi petugas sektor Makkah	233	org	x	198 kali x SAR	9	Rp 1.000.591.099	Rp 2.223.535.776	Rp 1.667.651.832
15	Konsumsi petugas non kloter kesehatan Jeddah	25	org	x	225 kali x SAR	9	Rp 121.999.500	Rp 271.110.000	Rp 203.332.500
16	Konsumsi petugas non kloter kesehatan Madinah	85	org	x	225 kali x SAR	9	Rp 414.798.300	Rp 921.774.000	Rp 691.330.500
17	Konsumsi petugas non kloter kesehatan Makkah	200	org	x	198 kali x SAR	9	Rp 858.876.480	Rp 1.908.614.400	Rp 1.431.460.800
18	Konsumsi temus tata usaha haji (TUH) Jeddah	80	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 395.603.712	Rp 879.119.360	Rp 659.339.520
19	Konsumsi temus daker Jeddah	85	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 420.328.944	Rp 934.064.320	Rp 700.548.240
20	Konsumsi temus daker Madinah	90	org	x	228 kali x SAR	9	Rp 445.054.176	Rp 989.009.280	Rp 741.756.960
21	Konsumsi temus daker Makkah	305	org	x	198 kali x SAR	9	Rp 1.309.786.632	Rp 2.910.636.960	Rp 2.182.977.720
22	Konsumsi temus kesehatan Jeddah	2	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 9.109.296	Rp 20.242.880	Rp 15.182.160
23	Konsumsi pengemudi ambulans di Jeddah	5	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 22.773.240	Rp 50.607.200	Rp 37.955.400
24	Konsumsi petugas kebersihan di Jeddah	2	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 9.109.296	Rp 20.242.880	Rp 15.182.160
25	Konsumsi temus kesehatan Madinah	6	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 27.327.888	Rp 60.728.640	Rp 45.546.480
26	Konsumsi pengemudi ambulans di Madinah	11	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 50.101.128	Rp 111.335.840	Rp 83.501.880
27	Konsumsi petugas kebersihan di Madinah	2	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 9.109.296	Rp 20.242.880	Rp 15.182.160
28	Konsumsi temus kesehatan Makkah	16	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 72.874.368	Rp 161.943.040	Rp 121.457.280
29	Konsumsi pengemudi ambulans di Makkah	38	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 173.076.624	Rp 384.614.720	Rp 288.461.040
30	Konsumsi petugas kebersihan di Makkah	3	org	x	210 kali x SAR	9	Rp 13.663.944	Rp 30.364.320	Rp 22.773.240
31	Konsumsi jamaah safari wukuf				900 org x SAR	9	Rp 19.519.920	Rp 43.377.600	Rp 32.533.200
32	Rapat Teknis Haji, Daker, Sektor				1 pkt x Rp	143.156.083	Rp 143.156.083	Rp 143.156.083	Rp 143.156.083
33	Malam Ta'aruf				1 pkt x Rp	63.436.279	Rp 63.436.279	Rp 63.436.279	Rp 63.436.279
34	Akomodasi orientasi temus di Arab Saudi	2	hr	x	645 org x Rp	330.000	Rp 425.700.000	Rp 425.700.000	Rp 425.700.000
35	Konsumsi orientasi temus di Arab Saudi	9	OK	x	645 org x Rp	50.000	Rp 290.250.000	Rp 290.250.000	Rp 290.250.000
36	Konsumsi Jamaah Sakit dan Sesat				1 pkt x Rp	719.485.203	Rp 719.485.203	Rp 719.485.203	Rp 719.485.203
37	Beban Langganan Daya dan Jasa di Arab Saudi				1 keg x Rp	1.413.058.189	Rp 1.413.058.189	Rp 1.413.058.189	Rp 1.413.058.189
38	Transport penerbangan PP petugas non kloter - Kemenag	530	org	x	1 pkt x USD	1.691	Rp 8.099.230.510	Rp 8.099.230.510	Rp 8.099.230.510
39	Transport penerbangan PP petugas non kloter - Kemenkes	310	org	x	1 pkt x USD	1.691	Rp 4.737.285.770	Rp 4.737.285.770	Rp 4.737.285.770
40	Transport penerbangan PP petugas kloter	3.886	org	x	1 paket x USD	1.691	Rp 59.384.169.362	Rp 59.384.169.362	Rp 59.384.169.362
41	Airport tax petugas kloter&non kloter di bandara selain Batam	4.623	org	x	1 paket x USD	50.000	Rp 231.150.000	Rp 231.150.000	Rp 231.150.000
42	Airport tax petugas kloter&non kloter di bandara Batam	103	org	x	1 paket x USD	100.000	Rp 10.300.000	Rp 10.300.000	Rp 10.300.000
43	Surcharge landing Madinah petugas non kloter - Kemenag	138	org	x	1 pkt x USD	50	Rp 62.355.300	Rp 62.355.300	Rp 62.355.300
44	Surcharge landing Madinah petugas non kloter - Kemenkes	85	org	x	1 pkt x USD	50	Rp 38.407.250	Rp 38.407.250	Rp 38.407.250
45	Surcharge landing Madinah petugas kloter	1.375	org	x	1 paket x USD	50	Rp 621.293.750	Rp 621.293.750	Rp 621.293.750
46	Airport tax petugas di bandara KAATA Jeddah/AMAA Madinah	4.726	org	x	1 pkt x USD	14	Rp 597.924.068	Rp 597.924.068	Rp 597.924.068
47	Biaya naqobah petugas kloter	3.886	org	x	1 pkt x SAR	435	Rp 4.073.662.712	Rp 4.073.662.712	Rp 4.073.662.712
48	Biaya naqobah petugas non kloter dan temus				1 pkt Rp	1.362.462.406	Rp 1.362.462.406	Rp 1.362.462.406	Rp 1.362.462.406
49	Angkutan Madinatul Hujjaj - Airport Jeddah				1 pkt Rp	204.448.693.950	Rp 204.448.693.950	Rp 204.448.693.950	Rp 204.448.693.950
50	Angkutan dr pondokan ke Masjidil Haram Makkah				1 pkt Rp	19.140.107.912	Rp 19.140.107.912	Rp 19.140.107.912	Rp 19.140.107.912
51	Akomodasi petugas kloter di Madinah	3.886	org	x	1 pkt x SAR	600	Rp 5.618.845.120	Rp 5.993.434.795	Rp 5.993.434.795
52	Akomodasi petugas non kloter sektor di Madinah	102	org	x	76 hari x SAR	75	Rp 1.401.096.480	Rp 1.494.502.912	Rp 1.494.502.912
53	Kemah petugas kloter di Armina	3.886	org	x	1 paket x SAR	300	Rp 2.809.422.560	Rp 2.809.422.560	Rp 2.809.422.560
54	Akomodasi petugas kloter di Makkah	3.886	org	x	1 paket x SAR	3.022	Rp 28.300.249.921	Rp 26.923.632.867	Rp 32.308.359.440

Estimasi perhitungan..., Leni Nopilia, FEUI, 2012

Biaya Tahap Persiapan dan Pelaksanaan							ABC Pemerintah	PT. Jasa Wisata Makmur	PT. Mideast Express						
55	Akomodasi petugas non kloter sektor di Makkah	233	org	x	66	hari	x	SAR	131	Rp	4.854.719.778	Rp	4.632.366.200	Rp	5.558.839.440
56	Sewa hotel transit petugas kloter di Jeddah	1.780	org	x	1	paket	x	SAR	80	Rp	343.165.013	Rp	321.717.200	Rp	343.165.013
57	Akomodasi petugas non kloter daker dan sektor di Jeddah	73	org	x	76	hari	x	SAR	80	Rp	1.069.595.221	Rp	1.002.745.520	Rp	1.069.595.221
58	Akomodasi petugas TUH Jeddah	16	org	x	90	hari	x	SAR	80	Rp	277.616.640	Rp	260.265.600	Rp	277.616.640
59	Akomodasi Amirul Haji dan pengendali mutu	19	org	x	60	hari	x	SAR	95	Rp	260.988.560	Rp	255.494.064	Rp	282.966.544
60	Akomodasi Petugas non kloter Kesehatan Jeddah	25	org	x	76	hari	x	SAR	80	Rp	366.299.733	Rp	343.406.000	Rp	366.299.733
61	Akomodasi Petugas non kloter Kesehatan Madinah	85	org	x	76	hari	x	SAR	75	Rp	1.167.580.400	Rp	1.245.419.093	Rp	1.245.419.093
62	Akomodasi Petugas non kloter Kesehatan Makkah	200	org	x	66	hari	x	SAR	131	Rp	4.167.141.440	Rp	3.976.280.000	Rp	4.771.536.000
63	Sewa Wisma di Jeddah				1	pkt	x	Rp	1.491.910.950	Rp	1.491.910.950	Rp	1.491.910.950	Rp	1.491.910.950
64	Sewa kantor TUH (Misi Haji Indonesia) dan daker di Jeddah				1	pkt	x	Rp	3.223.225.901	Rp	3.223.225.901	Rp	3.223.225.901	Rp	3.223.225.901
65	Sewa kantor Sektor dan Daker di Makkah				1	pkt	x	Rp	18.300.736.231	Rp	18.300.736.231	Rp	18.300.736.231	Rp	18.300.736.231
66	Sewa kantor Sektor dan Daker di Madinah				1	pkt	x	Rp	5.568.370.218	Rp	5.568.370.218	Rp	5.568.370.218	Rp	5.568.370.218
67	Sewa gudang, Posko dan Pelayanan Armina				1	pkt	x	Rp	1.238.527.342	Rp	1.238.527.342	Rp	1.238.527.342	Rp	1.238.527.342
68	Pool bengkel kendaraan di Rowes				1	pkt	x	Rp	99.540.400	Rp	99.540.400	Rp	99.540.400	Rp	99.540.400
69	Sewa gudang penyimpanan inventaris di Madinatul Hujaj Jeddah				1	pkt	x	Rp	67.075.788	Rp	67.075.788	Rp	67.075.788	Rp	67.075.788
70	Sewa gudang obat di Jeddah				1	pkt	x	Rp	250.000.000	Rp	250.000.000	Rp	250.000.000	Rp	250.000.000
71	Sarana administrasi perkantoran - Kementerian Agama				1	pkt	x	Rp	428.568.827	Rp	428.568.827	Rp	428.568.827	Rp	428.568.827
72	Sarana administrasi perkantoran pelayanan kesehatan				1	pkt	x	Rp	325.000.000	Rp	325.000.000	Rp	325.000.000	Rp	325.000.000
73	Sarana dan prasarana Media Center Haji (MCH) Arab Saudi				1	pkt	x	Rp	166.106.520	Rp	166.106.520	Rp	166.106.520	Rp	166.106.520
74	Penyewaan studio mini di Makkah				1	pkt	x	Rp	95.342.720	Rp	95.342.720	Rp	95.342.720	Rp	95.342.720
75	Sarana dan prasarana MCH dalam negeri				1	pkt	x	Rp	1.621.469.650	Rp	1.621.469.650	Rp	1.621.469.650	Rp	1.621.469.650
76	Pemeriksaan laboratorium petugas kloter	3.886	org	x	1	pkt	x	Rp	160.000	Rp	621.760.000	Rp	621.760.000	Rp	621.760.000
77	Pemeriksaan laboratorium petugas non kloter	840	org	x	1	pkt	x	Rp	160.000	Rp	134.400.000	Rp	134.400.000	Rp	134.400.000
78	Imunisasi meningitis dan kartu ICV bagi petugas kloter	3.886	org	x	1	pkt	x	Rp	100.000	Rp	388.600.000	Rp	388.600.000	Rp	388.600.000
79	Imunisasi meningitis dan kartu ICV bagi petugas non kloter	840	org	x	1	pkt	x	Rp	100.000	Rp	84.000.000	Rp	84.000.000	Rp	84.000.000
80	Paspor petugas haji non kloter dan kloter	4.726	org	x	1	pkt	x	Rp	255.000	Rp	1.205.130.000	Rp	1.205.130.000	Rp	1.205.130.000
81	Sampul paspor dan materai non kloter dan kloter	4.726	org	x	1	pkt	x	Rp	25.000	Rp	118.150.000	Rp	118.150.000	Rp	118.150.000
82	Pengurusan visa non kloter dan kloter	4.726	org	x	1	pkt	x	Rp	30.000	Rp	141.780.000	Rp	141.780.000	Rp	141.780.000
83	DAPIH non kloter dan kloter	4.726	org	x	1	pkt	x	Rp	4.500	Rp	21.267.000	Rp	21.267.000	Rp	21.267.000
84	Gelang identitas non kloter dan kloter	4.726	org	x	1	pkt	x	Rp	7.000	Rp	33.082.000	Rp	33.082.000	Rp	33.082.000
85	Buku paket manasik dan biaya pengiriman 10% non kloter dan kloter	4.726	org	x	1	pkt	x	Rp	9.350	Rp	44.188.100	Rp	44.188.100	Rp	44.188.100
86	Buku panduan berhaji sehat non kloter dan kloter	4.726	org	x	1	pkt	x	Rp	3.500	Rp	16.541.000	Rp	16.541.000	Rp	16.541.000
87	Asuransi non kloter dan kloter	4.726	org	x	1	pkt	x	Rp	100.000	Rp	472.600.000	Rp	472.600.000	Rp	472.600.000
88	Pencetakan stiker kendaraan/bus (Jeddah-Madinah-Makkah-Armina)				1	pkt	x	Rp	550.677.688	Rp	550.677.688	Rp	550.677.688	Rp	550.677.688
89	Pakaian seragam petugas non kloter	840	org		2	stel	x	Rp	350.000	Rp	588.000.000	Rp	588.000.000	Rp	588.000.000
90	Pakaian seragam temus	645	org		2	stel	x	SAR	130	Rp	404.134.640	Rp	404.134.640	Rp	404.134.640
91	Pakaian seragam petugas kloter	3.886	org		2	stel	x	Rp	250.000	Rp	1.943.000.000	Rp	1.943.000.000	Rp	1.943.000.000
92	Pengadaan jaket petugas non kloter				840	org	x	Rp	225.000	Rp	189.000.000	Rp	189.000.000	Rp	189.000.000
93	Pengadaan koper petugas non kloter				840	org	x	Rp	350.000	Rp	294.000.000	Rp	294.000.000	Rp	294.000.000
94	Pengadaan rompi petugas non kloter				840	org	x	Rp	140.000	Rp	117.600.000	Rp	117.600.000	Rp	117.600.000
95	Pengadaan jas amirul haji dan pengendali mutu				19	org	x	Rp	1.000.000	Rp	19.000.000	Rp	19.000.000	Rp	19.000.000
96	Biaya ID card kendaraan				1	pkt	x	Rp	244.186.989	Rp	244.186.989	Rp	244.186.989	Rp	244.186.989
97	Pengadaan stiker pemondokan				1	pkt	x	Rp	274.684.422	Rp	274.684.422	Rp	274.684.422	Rp	274.684.422
98	Badal Haji				1	pkt	x	Rp	533.080.450	Rp	533.080.450	Rp	533.080.450	Rp	533.080.450
99	Pelatihan petugas kloter dan non kloter	4.726	org	x	10	hari	x	Rp	400.000	Rp	18.904.000.000	Rp	18.904.000.000	Rp	18.904.000.000
100	Operasional Media Center Haji				1	pkt	x	Rp	63.623.155	Rp	63.623.155	Rp	63.623.155	Rp	63.623.155
101	Pemeliharaan kantor dan wisma				1	pkt	x	Rp	1.087.885.745	Rp	1.087.885.745	Rp	1.087.885.745	Rp	1.087.885.745
102	Pemeliharaan dan operasional kendaraan				1	pkt	x	Rp	1.150.501.488	Rp	1.150.501.488	Rp	1.150.501.488	Rp	1.150.501.488
103	Pelayanan bongkar muat dan angkutan barang				1	pkt	x	Rp	6.926.804.279	Rp	6.926.804.279	Rp	6.926.804.279	Rp	6.926.804.279
104	Jasa lawyer, notaris dan penterjemah resmi				1	pkt	x	Rp	361.993.040	Rp	361.993.040	Rp	361.993.040	Rp	361.993.040
105	Pelayanan muasassah dan maktab				4.726	org	x	SAR	294	Rp	3.348.374.781	Rp	3.348.374.781	Rp	3.348.374.781
106	Pengadaan aplikasi jasa konsultan qur'ah perumahan haji				1	paket	x	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000

(Sambungan Tabel 17)

Biaya Tahap Persiapan dan Pelaksanaan							ABC Pemerintah	PT. Jasa Wisata Makmur	PT. Mideast Express				
107	Jasa konsultan aktuarial asuransi jiwa		1	pkt	x	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000
108	Jasa konsultan hukum kontrak penerbangan		1	pkt	x	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000
109	Honor temus di kedutaan Arab Saudi (bagian penghubung dan pencetakan visa)	50	org	x	5	bln	x	Rp	1.800.000	Rp	450.000.000	Rp	450.000.000
110	Honor temus di subdit dokumen dan perlengkapan haji (bagian scanning yang terdiri dari pemaduan data dan request visa)	40	org	x	5	bln	x	Rp	1.800.000	Rp	360.000.000	Rp	360.000.000
111	Uang harian temus TUH Jeddah	80	org	x	76	hr	x	Rp	770.000	Rp	4.681.600.000	Rp	4.681.600.000
112	Uang harian temus daker Jeddah	85	org	x	76	hr	x	Rp	770.000	Rp	4.974.200.000	Rp	4.974.200.000
113	Uang harian temus daker Madinah	90	org	x	76	hr	x	Rp	770.000	Rp	5.266.800.000	Rp	5.266.800.000
114	Uang harian temus daker Makkah	305	org	x	66	hr	x	Rp	770.000	Rp	15.500.100.000	Rp	15.500.100.000
115	Uang harian temus kesehatan Jeddah	2	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	70.000.000	Rp	70.000.000
116	Uang harian pengemudi ambulans di Jeddah	5	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	175.000.000	Rp	175.000.000
117	Uang harian petugas kebersihan di Jeddah	2	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	70.000.000	Rp	70.000.000
118	Uang harian temus kesehatan Madinah	6	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	210.000.000	Rp	210.000.000
119	Uang harian pengemudi ambulans di Madinah	11	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	385.000.000	Rp	385.000.000
120	Uang harian petugas kebersihan di Madinah	2	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	70.000.000	Rp	70.000.000
121	Uang harian temus kesehatan Makkah	16	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	560.000.000	Rp	560.000.000
122	Uang harian pengemudi ambulans di Makkah	38	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	1.330.000.000	Rp	1.330.000.000
123	Uang harian petugas kebersihan di Makkah	3	org	x	70	hr	x	Rp	500.000	Rp	105.000.000	Rp	105.000.000
<b>Jumlah</b>							<b>Rp</b>	<b>479.349.742.223</b>	<b>Rp</b>	<b>496.064.490.668</b>	<b>Rp</b>	<b>495.473.302.177</b>	

